

HASIL PENELITIAN
PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT
PENGUATAN RESILIENSI SOSIAL INOVASI LORONG WISATA
DI KOTA MAKASSAR



Tim Peneliti :

Jabatan	Nama
Ketua	Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si
Anggota	Marta Suharsih, S.Sos., M.Si Pratiwi Wulandari, S.Sos., M.Si

PUSAT PENELITIAN OPINI PUBLIK
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
ABSTRAK.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pernyataan Masalah	7
1.3 Obyektif Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
A. Kajian tentang Kebijakan Inovatif Program Lorong Wisata.....	11
B. Tinjauan tentang Masalah Sosial di Kota Makassar	13
C. Kajian tentang Resiliensi Sosial dalam Perspektif Sosiologi	16
D. Landasan Teori sebagai Pisau Analisis	19
2.2 Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Desain Penelitian.....	25
3.2 Sumber Data.....	25
3.3 Teknik Pengumpulan Data	26
3.4 Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4. 1 Hasil Penelitian dan Pembahasan	31
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
2. Hasil Penelitian	38
3. Pembahasan	100
4.2 Implikasi	108
BAB V PENUTUP	111
4.1 Kesimpulan	111
4.2 Rekomendasi.....	111

DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN	115

DAFTAR TABEL

2.1 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Makassar	22
---	----

DAFTAR GAMBAR

- 4.1 Kondisi Fisik Lorong Wisata pada Lorong *Saga*, Lorong *Daeng Jakking*,
dan Lorong *Kyoto*.....
- 4.2 Kondisi Fisik Lorong Wisata pada Lorong UMKM, Lorong Cinta Damai
dan Lorong *Sipakatau*.....
- 4.3 Kondisi Fisik Lorong Wisata pada Lorong Sulapa Appa dan Lorong
Mr Big

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada kajian penguatan resiliensi sosial melalui inovasi lorong wisata pada masyarakat lorong di Kota Makassar. Data dan fakta menunjukkan bahwa terdapat banyaknya masalah-masalah sosial yang nampak pada kehidupan masyarakat lorong. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data dalam penelitian diambil dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Masalah-masalah sosial yang nampak pada masyarakat di dalam lorong wisata, diantaranya; Masalah Kemiskinan, sebagian besar masyarakat dalam lorong wisata masih berada di bawah garis kemiskinan yang divalidasi oleh banyaknya penerima manfaat dalam lorong wisata; Kurangnya Infrastruktur, penyediaan infrastruktur seperti drainase lorong, penerangan jalan dan pengoptimalisasian CCTV dalam menunjang keamanan masyarakat lorong wisata; Masalah kebersihan terutama pada pengelolaan sampah, ditemukan di dalam beberapa lorong wisata dengan kondisi pemandangan kontraks antara dinding-dinding berwarna dan tumpukan sampah di pinggir lorong; Potensi kriminalitas yang mengancam keamanan, kondisi yang rentan terhadap potensi terjadinya kriminalitas yang mengancam keamanan pada masyarakat di lorong wisata; Konflik Sosial antar Warga, ketegangan yang mewarnai hirup kehidupan masyarakat lorong atas perebutan ruang publik; Minimnya keterlibatan pemerintah lokal, kurangnya inisiatif pemerintah setempat terkait program lorong wisata juga mematikan semangat dan inisiasi masyarakat untuk mengembangkan potensi lorong mereka; Ketergantungan intitusional dewan lorong, Dewan Lorong sangat bergantung pada arahan atau dukungan dari institusi lain (dalam hal ini pemerintah setempat) untuk menjalankan fungsinya sehingga tidak muncul inisiatif dan inovasi dalam pengembangan potensi lorongnya. (2) Bentuk kebijakan aplikatif dalam memperkuat penguatan resiliensi sosial pada masyarakat lorong wisata, termuat dalam kebijakan aplikatif yang kompherensif dan terintegrasi. Bentuk kebijakan aplikatif tersebut bermuara pada aspek penataan dan revitalisasi lingkungan pada lorong wisata, pemberdayaan ekonomi masyarakat lorong wisata, Penguatan kapasitas masyarakat lorong wisata. ketiga kebijakan aplikatif tersebut diimplementasikan dengan berbagai inovasi program. (3) Pemanfaatan kelompok sosial pada program lorong wisata dalam memperkuat resiliensi sosial masyarakat lorong dengan melibatkan kader posyandu, kader PKK, majelis taklim, dan kelompok pemuda meski belum maksimal. Mengacu pada hasil temuan diatas menunjukkan bahwa resiliensi sosial pada masyarakat lorong melalui program lorong wisata sudah terbentuk, tetapi masih pada tatanan mikro. Sehingga dibutuhkan intervensi dari berbagai pihak terkait untuk melakukan penguatan resiliensi sosial masyarakat lorong secara optimal. Hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya (1) Penguatan kebijakan aparat pemerintah dalam hal pengalokasian anggaran maupun program, (2) Penguatan fungsi pranata sosial dalam program lorong wisata, diantaranya Dewan Lorong dan Penanggungjawab Lorong, (3) Perlu dibentuk suatu badan khusus yang bertanggungjawab atas program lorong wisata, (4) Perlu dibangun kesadaran

masyarakat untuk memperkuat resiliensi sosial sehingga membentuk partisipasi aktif masyarakat dalam program lorong wisata, (5) Perlunya peninjauan kembali regulasi terkait target kuantitas jumlah lorong wisata.

Kata Kunci: Resiliensi Sosial, Masalah Sosial, Keijakan Aplikatif, Pemanfaatan Kelompok Sosial dan Program Lorong Wisata.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan inovasi “Lorong Wisata” Kota Makassar yang digagas Walikota Makassar. Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto (sering dipanggil Dany Pomanto), dari perspektif sosiologi dimaknai sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan resiliensi sosial masyarakat kota Makassar. Resiliensi sosial adalah kemampuan suatu sistem sosial untuk mempertahankan keutuhan atau integrasi sosialnya pada saat dan/atau setelah mendapat gangguan baik dari dalam maupun dari luar (Rilus Kinseng, 2019).

Lorong Wisata adalah kebijakan yang diambil bertepatan dengan situasi masyarakat yang makin rentan karena diterpa pandemi “*covid-19*” dan Kota Makassar juga merasakan dampaknya yang sangat signifikan dari baik sisi ekonomi, sosial maupun politik. Itulah sebabnya kebijakan ini diberi payung hukum yang kuat yaitu Peraturan Walikota (Perwali) Makassar Nomor 3 Tahun 2021 dan Perwali Makassar Nomor 94 tahun 2022. Kebijakan ini juga sejalan dengan visi misi Kota Makassar yaitu Makassar dua kali tambah baik dan percepatan mewujudkan Makassar kota dunia yang “Sombere dan *Smart City*” dengan imunitas yang kuat. Melalui tiga strategi utama, yaitu reformasi Sumber Daya Manusia (SDM), Rekonstruksi Kesehatan dan Restorasi Ruang Kota yang inklusif.

Kota Makassar menggambarkan lorong sebagai fenomena kehidupan sosial masyarakat yang memberi makna segregasi. Karena umumnya masyarakat yang bermukim di lorong adalah kelompok masyarakat miskin dan pendatang dari daerah. Itulah sebabnya, Makassar boleh dikonotasikan sebagai kota Lorong. Menurut data Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Makassar (2022) disebutkan bahwa jumlah lorong di Kota Makassar sebanyak kurang lebih 7.250 lorong dan tersebar di seluruh kecamatan dan kelurahan. Jumlah lorong yang besar ini, selain sebagai potensi pengembangan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri, juga memproduksi masalah-masalah sosial yang berimplikasi pada gangguan sosial. Seperti halnya, masalah kriminalitas dalam bentuk perkelahian, pencurian, penjam-bretan, begal, prostitusi dan semacamnya. Ditambah masalah sosial ekonomi, seperti putus sekolah, pernikahan dini, pengangguran dan semacamnya. Dalam perspektif sosiologi, alah satu karakteristik (ciri khas) perkotaan adalah

makin kompleksnya masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Fenomena ini lebih diakibatkan oleh persaingan hidup yang makin ketat, baik disebabkan oleh aspek kultural (pendidikan dan sebagainya) maupun aspek struktural (kebijakan dan sebagainya). Karena itu, kehidupan yang kontras selalu saja mewarnai dinamika perkembangan masyarakat perkotaan.

Namun pesatnya pertumbuhan penduduk, sistem pemukiman yang tidak tertata dengan baik membawa konsekuensi negatif seperti: persoalan sosial, ekonomi dan keamanan lingkungan. Sehingga inovasi Lorong Wisata hadir dengan tujuan untuk: (1) Mengubah citra lorong, yang sebelumnya kumuh, jorok menjadi lorong yang hijau dan produktif; (2) Mengembangkan kegiatan ekonomi lorong yang berbasis green garden, kuliner dan kerajinan; (3) Melakukan pemetaan dan klasterisasi potensi lorong berbasis teknologi informasi berdasarkan potensi lorong yang terkait dengan sumber daya manusia, potensi fisik lingkungan dan potensi pengembangan ekonomi; (4) Mengubah persepsi lorong yang rawan akan kriminalitas menjadi wilayah dengan sosial interaksi yang humanis; (5) Masyarakat yang apatis berubah menjadi kelompok masyarakat yang produktif dan ingin berkompetisi atas potensi yang dimiliki; (6) Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk mengembangkan ekonomi lorong berdasarkan potensi yang dimiliki.

Pemerintah Kota Makassar dalam merencanakan Lorong Wisata dengan melibatkan beberapa pendekatan tematik diantaranya: tematik KULINER dengan menu kuliner khas kota Makassar yang dapat dijadikan sebagai objek wisata dan penciptaan ekonomi kreatif, tematik UMKM dengan meningkatkan kapasitas produksi, kualitas dan market share pelaku usaha kecil menengah, tematik BUDAYA dengan pelestarian nilai-nilai budaya sebagai simbol kearifan lokal, tematik RELIGI dengan menekankan pada pembinaan mental masyarakat yang ramah dan berakhlak mulia. Pelibatan berbagai unsur tersebut untuk memecahkan persoalan pokok yang mendasar dalam lorong yang didukung dengan paradigma spasial berupa pendekatan pembangunan berdasarkan daya dukung ruang yang ada sesuai peruntukannya, yang diawali dengan melakukan penandatanganan komitmen bersama dengan beberapa perangkat daerah sehingga dapat membangkitkan ekonomi sirkular berbasis Lorong.

Adapun sasaran dari lorong wisata yaitu lorong-lorong yang memiliki karakteristik potensi untuk dikembangkan. Kegiatan ini adalah bentuk intervensi

pemerintah dengan menggerakkan *potential resources* masyarakat yang berbasis lorong yang merupakan implementasi dari program prioritas yakni *recovery economy* pada saat pandemi hingga pasca pandemi Covid 19. Bentuk percepatan pemulihan ekonomi terdiri dari: aspek pemenuhan kebutuhan pangan, penguatan UMKM dan Industri, penataan infrastruktur dasar dan teknologi informasi, ramah anak dan wisata pendidikan, kearifan lokal dan destinasi wisata, pengabdian masyarakat, *Corporate Social Responsibility* dan pemberdayaan masyarakat melalui intervensi kegiatan beberapa organisasi perangkat daerah. Hal ini sejalan dengan RKP 2023 bertema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan berfokus pada pondasi ekonomi masyarakat yang berdomisili di lorong. Penentuan lorong wisata berdasarkan potensi lorong antara lain terkait dengan sumber daya manusia, potensi fisik lingkungan, dan potensi pengembangan ekonomi. Hal ini untuk memastikan bahwa lorong wisata yang dijalankan benar-benar sesuai dengan potensi lorong tersebut, sehingga dapat dipastikan pelaksanaannya akan berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik masyarakat.

Tahapan yang dilaksanakan dalam identifikasi penetapan Lorong sebagai Lorong wisata dimulai dari tahap mendasar hingga tahap yang kompleks, hal tersebut dimulai dari: (1). Pemetaan Potensi Lorong: Usulan berasal dari pihak kelurahan, RT dan RW sebagai hasil rembuk bersama warga, tentang potensi usaha yg ada di lokasi tersebut pihak kelurahan mengusulkan ke tingkat kecamatan; (2) Penetapan Lorong Wisata: kecamatan menetapkan nama lorong wisata lengkap dengan Surat Keputusan Dewan Lorong (SK Delor) dan SK Lorong Wisata. Selanjutnya pihak Kecamatan melapor ke Dinas Ketahanan Pangan, lalu data lorong diinput ke aplikasi lorong wisata. Di aplikasi tersebut semua SKPD yang bertanggung jawab untuk pembinaan lorong memilih dan memverifikasi lorong yang dapat mereka bina berdasarkan potensi lorong kepada SKPD selaku penanggung jawab dan pelaksana teknis; (3) Pelaksanaan Program: Masing-masing SKPD membuat perencanaan penganggaran untuk pembinaan Lorong Wisata sesuai bidang teknis masing-masing SKPD. Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Lorong tersebut sesuai dengan hasil pemetaan sebelumnya dan diverifikasi oleh SKPD terkait; (4) Tahapan Pengawasan terhadap pelaksanaan program Lorong Wisata dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar.

Inovasi Longwis (Lorong Wisata) digerakkan dengan berbagai sumber daya untuk menjamin keberlanjutannya. Sumber daya manusia yang terlibat dalam inovasi ini adalah kolaborasi dari perangkat daerah dan masyarakat Lorong. Dengan adanya lorong wisata, potensi kuliner, UMKM, dan industri kecil dapat lebih berkembang dengan bantuan SKPD terkait. Lorong wisata merupakan program strategis yang tentunya banyak manfaat yang dihasilkan. Selain membuka lapangan pekerjaan juga secara tidak langsung memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat lorong menjadi lebih sejahtera. Unsur-unsur yang terkait dengan upaya yang dilakukan agar inovasi dapat menjawab permasalahan dan mencapai tujuan yang diinginkan, meliputi penjelasan manajemen sumber daya yang digunakan untuk mencapai *output* dan *outcome* yang diharapkan dari adanya inovasi ini.

Regulasi yang dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan inovasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lorong Wisata memberdayakan sumber daya manusia yang terdiri dari pranata: (1) Dewan Lorong; terdiri atas unsur tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan unsur tokoh perempuan. yang memiliki tugas menjadi mitra dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat, pendampingan dalam pengembangan lorong wisata, melakukan koordinasi dengan perangkat kelurahan dan kecamatan serta stakeholder terkait, mengelola dan menjaga aset yang ada di lorong wisata, serta melakukan pertemuan rutin dalam rangka penguatan kelembagaan lorong wisata. (2) Gugus Tugas Lorong Wisata; beranggotakan wakil dari unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan. yang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, mengumpulkan data, menyusun prioritas program, melakukan evaluasi, monitoring, dan pelaporan kebijakan pelaksanaan, dan melaporkan hasil kegiatan kepada walikota melalui Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar.

Selanjutnya, (3) Tim Teknis Lorong Wisata; dibentuk oleh masing-masing SKPD sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan tugas dan perannya pada pelaksanaan program lorong wisata, yang bertugas mengkoordinir naam penetapan lorong wisata, melaksanakan kegiatan lorong wisata, dan melaporkan hasil kegiatan kepada wali kota. (4) Sekretariat Gugus Tugas Lorong Wisata (Dinas Pariwisata Kota Makassar) berfungsi untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas gugus tugas dalam hal ini mengkoordinir tiap SKPD,

Kecamatan, Perguruan Tinggi dan Organisasi Non Pemerintah. (5) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Lorong Wisata dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Inisiator dan penanggung jawab pelaksana inovasi adalah Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto selaku Walikota Makassar Institusi/*stakeholders* lain yang terlibat; badan/lembaga pemerintah, perguruan tinggi/lembaga pendidikan, kelompok disabilitas, organisasi non pemerintah, dan lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Tahapan awal untuk pembentukan dan pembinaan Lorong Wisata sebanyak 1.000 (seribu) lorong yang tersebar di 153 Kelurahan, hal ini sesuai dengan perencanaan dalam dokumen RPJMD Kota Makassar 2021-2026 dimana ditargetkan setiap tahun sebanyak seribu lorong. Sehingga seiring dengan perjalanannya, setiap kelurahan diwajibkan membentuk minimal 7 lorong wisata setiap tahunnya. Oleh karena itu, hingga saat ini jumlah lorong yang sudah terbentuk menjadi lorong wisata sesuai data dari Dinas Pariwisata Makassar (2023) sebanyak 1.846 (per 31 Mei 2023) dari target yang akan dicapai pada tahun 2026 sebesar 5.000 lorong wisata.

Dalam perjalanannya program Lorong wisata menemui sekelumit problematika yang datang baik dari masalah internal maupun masalah eksternal. Masalah internal yang dihadapi sebagai berikut: pemahaman masyarakat mengenai lorong wisata, kesadaran masyarakat dalam pengembangan lorong wisata, jumlah lokus lorong yang sangat banyak sehingga sarana prasarana yang digunakan untuk lorong wisata tidak dapat menjangkau keseluruhan lorong secara maksimal. Tindak lanjutnya yaitu memaksimalkan partisipasi masyarakat lorong, penetapan jenis usaha/ kegiatan yang tepat sesuai karakteristik lorong. Masalah Eksternal yaitu kurangnya partisipasi pihak lain dalam menyukseskan lorong wisata seperti CSR. Mempromosikan secara maksimal tentang lorong wisata agar menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke lorong wisata Dampak yang signifikan dapat dilihat dengan adanya peningkatan Skor PPH yang sempat turun di akibatkan oleh Covid 19.

Oleh karena itu, ditemukan sejumlah studi-studi yang berkaitan dengan lorong wisata, juga sudah banyak dilakukan, seperti penelitian Mohammad Tahir Haning (2023) yang menyimpulkan bahwa secara umum kebijakan Lorong memberi dampak positif terhadap kepercayaan publik (*public trust*) mengenai kebijakan tersebut. Walaupun demikian, masih terdapat sejumlah masalah yang perlu

dibenahi, antara lain; (1) tidak ada transparansi dalam hal anggaran atau bantuan pengelolaan Lorong wisata (Longwis); (2) tidak ada pemerataan bantuan atau pelatihan pada kelompok masyarakat pengrajin di Longwis industri; (3) bantuan yang diberikan UMKM kurang signifikan untuk pengembangan UMKM di Longwis, dan; (4) kurangnya kesadaran menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan.

Begitu juga studi yang dilakukan Asrianto (2023) yang menggambarkan adanya relasi sosial antara struktur dan agen didalam pengelolaan Lorong wisata (Longwis). Kesimpulan penelitiannya menegaskan bahwa maju dan berkembangnya lorong wisata lebih diakibatkan adanya kerjasama antara struktur (pemerintah setempat) dengan agen (kelompok masyarakat) di daerah tersebut. Studi lain yang dilakukan Pratiwi Wulandari (2024) yang mengkaji Lorong wisata dari perspektif kebijakan sosial, menyimpulkan bahwa terjadi diferensiasi (perbedaan) dalam pengelolaan Lorong wisata yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Perbedaan tersebut, karena fungsi Dewan Lorong (Delor) sebagai penggerak partisipasi masyarakat Lorong ada yang sangat optimal dan tidak optimal. Hal ini yang menyebabkan adanya Longwis yang maju dengan unggul, dan juga ada yang tidak berkembang.

Walaupun sejak dicanangkannya kebijakan Lorong wisata tahun 2021, telah memperlihatkan gambaran yang positif dari sisi peningkatan partisipasi dan pendapatan masyarakat. Termasuk adanya dukungan struktur kelembagaan (dewan Lorong, gugus tugas dan tim teknis) dan dukungan regulasi yang memadai. Namun dari sisi kemanfaatan lorong wisata, belum ada studi yang menggambarkan dan menganalisis keberadaan lorong wisata dalam upaya memperkuat resiliensi sosial dan menangani masalah-masalah sosial masyarakat lorong.

Berangkat dari pandangan di atas, maka penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan dan menganalisis penguatan resiliensi sosial dan penanganan masalah-masalah sosial berbasis lorong wisata di Kota Makassar. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan merumuskan bentuk-bentuk kebijakan aplikatif yang dapat memperkuat implementasi dari Perwali Makassar Nomor 3 tahun 2021 dan Nomor 94 tahun 2022 sebagai payung hukum kebijakan inovatif lorong wisata. Penelitian ini, juga menggambarkan bentuk dinamika sosial (integrasi dan harmoni) yang berkembang pada masyarakat setelah ditetapkan sebagai Lorong wisata. Penelitian ini juga sejalan dengan visi - misi Walikota Makassar

yaitu, percepatan mewujudkan Makassar Kota Dunia yang *Sombere* dan *Smart City* dengan Imunitas Kuat untuk semua dengan misi restorasi kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan yang kuat untuk semua, dimana melalui misi ini dapat mewujudkan Makassar menjadi *Livable City* dan *Resilient City* dan meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang nyaman dan inklusif serta meningkatkan tata Kelola lingkungan hidup yang lestari.

1.2 Pernyataan Masalah

Inovasi lorong wisata, sebagai produk kebijakan pemerintah Kota Makassar yang usianya masih relatif muda (mulai ditetapkan tahun 2021) sehingga masih memerlukan kajian yang mendalam agar kemanfaatan lorong wisata ini sesuai dengan target yang diharapkan. Oleh karena itu, fokus penelitian ini diarahkan untuk menjawab pernyataan masalah yang berkenaan dengan keberadaan lorong wisata sebagai upaya penguatan resiliensi sosial masyarakat lorong di Kota Makassar. Dengan demikian, maka penelitian ini akan menjawab pernyataan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Masalah-masalah sosial apa saja yang tampak dalam kehidupan masyarakat di dalam lorong wisata?
2. Bentuk kebijakan aplikatif apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan penguatan resiliensi sosial pada masyarakat di lorong wisata?
3. Bagaimana bentuk pemanfaatan kelompok sosial pada lorong wisata untuk menangani masalah sosial sebagai penguatan resiliensi sosial masyarakat di lorong wisata?

1.3 Obyektif Penelitian

Obyektif penelitian merujuk pada tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui pelaksanaan penelitian ini. Penelitian ini secara obyektif ingin mengkaji dan menganalisis secara mendalam penguatan resiliensi sosial melalui inovasi program lorong wisata pada masyarakat yang tinggal di daerah lorong wisata. Secara spesifik, obyektif penelitian ini memuat tujuan untuk:

1. Menganalisis dan menggambarkan berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat lorong wisata.

2. Menganalisis dan menggambarkan bentuk kebijakan aplikatif yang diperlukan dalam rangka penguatan resiliensi sosial pada masyarakat lorong wisata.
3. Menganalisis dan menggambarkan pemanfaatan kelompok sosial untuk menangani masalah sosial dan memperkuat resiliensi sosial pada masyarakat lorong wisata.

Melalui pencapaian obyektif-obyektif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika inovasi lorong wisata dalam konteks sebagai penguatan resiliensi sosial masyarakat lorong di Kota Makassar. Hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi dasar untuk pengembangan strategi dan kebijakan aplikatif yang mendukung kemanfaatan dan keberlanjutan program lorong wisata.

Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada literatur akademik tentang resiliensi sosial dalam konteks program lorong wisata. Disamping itu, menyediakan informasi praktis bagi pembuat kebijakan, berbagai *stakeholder*, dan komunitas lokal dalam mengoptimalkan kemanfaatan inovasi program lorong wisata secara komprehensif dan berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan baik dalam aspek teoritis maupun praktis terkait pengembangan lorong wisata sebagai bentuk inovasi pariwisata urban. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini mencakup berbagai dimensi:

1. Manfaat Akademik: Penelitian ini memperkaya literatur tentang resiliensi sosial dengan fokus pada inovasi program lorong wisata. Hasil penelitian memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penguatan resiliensi sosial pada masyarakat lorong melalui inovasi program lorong wisata.
2. Manfaat Praktis bagi Pemerintah: Hasil penelitian ini menyediakan informasi berharga bagi pembuat kebijakan (pemerintah) dan berbagai *stakeholder* terkait dalam merumuskan kebijakan aplikatif pada pengembangan inovasi program lorong wisata. Temuan penelitian dapat menjadi acuan dalam menyusun regulasi dan/ program yang mendukung pengembangan lorong wisata secara efektif, dengan mempertimbangkan

berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat lorong secara kompherensif dan berkelanjutan.

3. Manfaat bagi Masyarakat: Penelitian ini memberikan wawasan tentang potensi dan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam pengembangan program lorong wisata. Hasil penelitian dapat memberdayakan masyarakat lorong dengan menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk membentuk kesadaran mereka tentang nilai positif inovasi program lorong wisata yang dapat dimanfaatkan sebagai penguatan resiliensi sosial sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat lorong dalam setiap program lorong wisata yang ada.

Dengan manfaat-manfaat tersebut, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan dampak praktis yang luas bagi berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan lorong wisata dan pariwisata perkotaan secara umum.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan hasil penelitian tentang inovasi program lorong wisata ini umumnya mengikuti sistematika struktur penulisan yang sistematis dan kompherensif dengan mengikuti standar penulisan ilmiah sesuai dengan *Idea Concept Paper* (ICP). Berikut adalah uraian tentang sistematika penulisan laporan hasil penelitian, sebagai berikut:

1. Halaman Judul; memuat Tema Penelitian, Judul Penelitian yang mencerminkan inti studi tentang lorong wisata, Lambang Kota Makassar dan Lembaga Penelitian, Tim Peneliti, Nama Lembaga Penelitian dan Tahun Penelitian.
2. Daftar Isi, Daftar Grafik/Gambar dan Daftar Tabel; memuat outline lengkap laporan hasil penelitian beserta nomor halaman.
3. Abstrak; memuat ringkasan singkat berisi maksimal 250 kata yang mencakup latar belakang, obyektif penelitian, metode penelitian serta hasil temuan penelitian yang dibuat secara kompherensif.
4. Bab I Pendahuluan; memuat Latar Belakang, Pernyataan Penelitian, Obyektif Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian.
5. Bab II Tinjauan Pustaka; memuat Kajian Teoritik, Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.

6. Bab III Metodologi Penelitian; memuat Desain Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.
7. Bab IV Hasil dan Pembahasan; memuat Hasil Analisa Data dan Pembahasan serta Implikasi.
8. Bab V Penutup; memuat Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan dari hasil penelitian.
9. Daftar Pustaka; memuat rujukan literatur sebagai referensi yang digunakan dalam penelitian.
10. Lampiran; memuat dokumen pendukung dalam penelitian, seperti data sekunder, foto lorong wisata, dan/ data statistik yang relevan pada penelitian.

Sistematika ini memungkinkan penyajian hasil penelitian secara logis dan terstruktur, memudahkan pembaca untuk memahami proses dan temuan penelitian tentang lorong wisata. Setiap BAB saling terkait, membangun narasi yang koheren dari latar belakang hingga rekomendasi penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

A. Kajian tentang Kebijakan Inovatif Program Lorong Wisata

Kebijakan (*policy*) menurut *United Nation* ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. (Wahab, 2014:9). Menurut Mustopadidjaja (1988) mengatakan kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah akan dituangkan dalam Peraturan Daerah yang mendapat persetujuan dari DPRD.

Anderson (1984) menyebutkan kebijakan sebagai tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Sedangkan menurut Thomas R. Dye (1978), kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Nurcholis, 2007: 263). Berdasarkan ketiga tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan atau kegiatan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu apapun dalam memecahkan suatu permasalahan dengan pertimbangan ekonomis, sosial budaya ataupun politis.

Inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap/dirasa baru oleh individu atau kelompok masyarakat. Inovasi merupakan bagian integral bagi suatu organisasi, karena bukan hanya digunakan sebagai motor penggerak keberlangsungan organisasi, melainkan juga sebagai bentuk kemampuan dalam berkompetisi dengan organisasi lain (Kurnia, 2019).

Menurut Gopalakrishnan dan Damanpur mengungkapkan, inovasi pada dasarnya menunjukkan pada sesuatu yang baru, apakah berbentuk gagasan-gagasan baru, produk, metode atau bentuk pelayanan (Noor, 2017:84). Sedangkan inovasi menurut Rogers (dalam Rumahorbo, 2016), inovasi tidak hanya berurusan dengan pengetahuan baru dan cara-cara baru, tetapi juga dengan nilai-nilai karena harus bisa membawa hasil yang lebih baik, jadi selain

melibatkan lptek baru, tetapi juga melibatkan cara pandang dan perubahan sosial. Selanjutnya menurut Albury menyatakan secara sederhana bahwa inovasi sebagai *new ideas that work*. Ini berarti bahwa inovasi berhubungan erat dengan ide-ide baru yang bermanfaat. Inovasi dengan sifat kebaruannya harus mempunyai nilai manfaat. Sifat baru dari inovasi tidak akan berarti apa-apa apabila tidak diikuti dengan nilai kemanfaatan dari kehadirannya.

Inovasi berorientasi pada terobosan dan hal yang “baru”. Hal yang baru dapat dimaknai sebagai suatu hal yang benar-benar baru ditemukan, dan juga dapat dimaknai sebagai suatu hal yang baru bagi satu individu, kelompok, organisasi, maupun pemerintahan, terlepas dari apakah inovasi tersebut sudah dilaksanakan di tempat lain atau belum. Sedangkan kebijakan dalam konteks pemerintahan menurut Thomas R. Dye lebih dimaknai sebagai suatu tindakan apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi persoalan publik untuk mencapai satu tujuan tertentu (Wahab, 2014 :14). Dari dua pemahaman inovasi dengan kebijakan, secara sederhana dapat ditarik satu pemahaman bahwa inovasi kebijakan merupakan satu kajian yang membahas mengenai apa yang baru dilakukan pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah publik. Hasil inovasi pemerintah berupa kebijakan- kebijakan publik (Putri, 2016 :15).

Inovasi kebijakan secara substantif dapat memberikan penguatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi ditengah masyarakat. Meskipun inovasi kebijakan dilakukan tidak mengikuti tren atau secara musiman akan tetapi inovasi kebijakan dapat menjadi keputusan alternatif dalam dimensi kebijakan publik di masa kini dan masa yang akan datang. Menurut Alvarez et al., (dalam Sururi, 2017) *Innovation policies and innovations in public sector activities are oriented to address market failures and in particular* yang berarti inovasi kebijakan dan inovasi sektor publik berorientasi mengatasi kegagalan pasar dan seluruh bagian yang terdapat didalamnya. Kebijakan publik yang inovatif senantiasa harus: 1) Berbasis kepada kepentingan publik; 2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta evaluasinya melibatkan partisipasi publik; 3) Perumusannya senantiasa bergerak secara dinamis sesuai dengan perkembangan aspirasi publik (Mariana, 2010:18).

Menurut Albury secara konseptual terdapat tiga jenis inovasi kebijakan yaitu:

- 1) *Policy innovation: new policy direction and initiatives* (inovasi kebijakan). Inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah kebijakan baru. Ini berarti bahwa setiap kebijakan (publik) yang dikeluarkan pada prinsipnya harus memuat sesuatu yang baru.
- 2) *Innovations in the policy-making process* (inovasi dalam proses pembuatan kebijakan). Pada peranan ini, maka fokusnya adalah pada inovasi yang memengaruhi proses pembuatan atau perumusan kebijakan.
- 3) *Policy to foster innovation and its diffusion*. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang khusus diciptakan untuk mendorong, mengembangkan, dan menyebarkan inovasi di berbagai sektor (Suwarno, 2008:12).

Dalam membuat suatu inovasi kebijakan, pemerintah mengeluarkan suatu program yang dapat dijalankan oleh seluruh *stakeholder* terkait untuk mengatasi permasalahan sosial agar dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, salah satunya melalui inovasi program lorong wisata di Kota Makassar.

B. Tinjauan tentang Masalah Sosial di Kota Makassar

Masalah sosial ditafsirkan sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian warga masyarakat. Hal itu disebabkan karena gejala tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan nilai, norma dan standar sosial yang berlaku. Suatu kondisi juga dianggap sebagai masalah sosial karena menimbulkan berbagai penderitaan dan kerugian baik fisik maupun nonfisik (Sakheraeni, 2012).

Raab dan Selznick (dalam Soetomo, 2010) menyatakan bahwa tidak semua masalah dalam kehidupan manusia merupakan masalah sosial. Masalah sosial pada dasarnya adalah masalah yang terjadi dalam antar hubungan diantara warga masyarakat. Sebagai ilustrasi dapat diambil contoh, bahwa masalah kekeringan pada dasarnya bukan masalah sosial, kondisi itu dapat menjadi masalah sosial apabila kemudian dapat mempengaruhi proses relasi. Suatu masalah yang dihadapi seseorang warga masyarakat sebagai individu tidak otomatis merupakan masalah sosial kalau kemudian berkembang menjadi isu sosial. Keterkaitan dengan proses relasi sosial seringkali juga menyangkut aturan dalam hubungan bersama baik formal maupun informal.

Menurut Parrillo (dalam Soetomo, 2010), masalah sosial mengandung empat komponen:

- a) Kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Kondisi yang dianggap sebagai masalah, tetapi dalam waktu singkat kemudian sudah hilang dengan sendirinya tidak termasuk masalah sosial.
- b) Dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik atau non fisik, baik pada individu maupun masyarakat.
- c) Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari salah satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat.
- d) Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.

Dari unsur-unsur tadi dapat dikatakan, bahwa agar dinyatakan sebagai masalah sosial, suatu gejala harus didefinisikan dan diidentifikasi sebagai masalah sosial, pernyataan sebagai masalah sosial tidak selalu bersifat eksplisit, tetapi dapat pula secara simbolik. Suatu kondisi yang mendapat reaksi penolakan oleh masyarakat dapat diinterpretasikan sebagai simbol pernyataan masyarakat bahwa kondisi tersebut merupakan masalah sosial. Oleh karena ada perbedaan referensi yang digunakan, mengakibatkan adanya perbedaan identifikasi dan definisi dalam masyarakat yang berbeda.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang masih dihadapi oleh banyak negara di dunia. Menurut data Bank Dunia pada tahun 2021, lebih dari 700 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan dunia, dengan penghasilan kurang dari US\$1,90 per hari (Bank Dunia, 2021). Kemiskinan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan individu serta masyarakat secara keseluruhan. Penyebab kemiskinan sangat kompleks dan bervariasi, termasuk kurangnya akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang kurang stabil, keterbatasan akses terhadap sumber daya, dan kurangnya dukungan sosial dan pemerintah (Suryawati, 2005). Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasi kemiskinan, termasuk program bantuan sosial, program pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan Pendidikan (Prawoto & Selatan, 2009).

Masalah kemiskinan yang terjadi di Kota Makassar cukup kompleks karena beragamnya kondisi sosial masyarakat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda-beda. Meskipun dikatakan bahwa telah dilakukan upaya untuk mencegah kemiskinan, namun masih banyak masyarakat yang tidak dapat menikmati kesejahteraan, terkhusus untuk masyarakat miskin. Pengeluaran pemerintah yang berorientasi pada pertumbuhan diberbagai daerah semakin besar dari waktu ke waktu, namun seringkali tidak berbanding lurus dengan *output* pengentasan kemiskinan (Ginting, 2019; Heitzmann & Matzinger, 2020; McWilliam, Wianti, & Taufik, 2021; Panda & Padhi, 2020; Refaeli & Achdut, 2020; Sharaunga & Mudhara, 2021).

Kemiskinan di Kota Makassar ini merupakan masalah yang sangat penting untuk di atasi dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, maka dari itu peran pemerintah Kota Makassar sangat diperlukan. Menurut Soejono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Makassar, pada tahun 2023 Kota Makassar mengalami peningkatan penduduk miskin dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai 5.07%.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Miskin di Kota Makassar

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Jumlah Penduduk Miskin (000)	65,12	69,98	74,69	71,83	80,32
Persentase Penduduk Miskin	4,28	4,54	4,82	4,58	5,07

Sumber: BPS Kota Makassar (2023)

Secara absolut jumlah penduduk miskin naik pada periode 2023 sebesar 8,49 ribu jiwa, yaitu dari 71,83 ribu jiwa tahun 2022 menjadi 80,32 ribu jiwa tahun 2023. Secara persentase, penduduk miskin di Kota Makassar juga mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke 2023, yaitu dari 4,58 persen di tahun 2022 menjadi 5,07 persen di tahun 2023.

C. Kajian tentang Resiliensi Sosial dalam Perspektif Sosiologi

Kebijakan Lorong Wisata dalam perspektif sosiologi selain untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan indikator peningkatan pendapatan, meningkatkan pendidikan dan kesehatan. Ada juga dalam perspektif sosiologi dikenal dengan penguatan resiliensi sosial.

Secara bahasa, resiliensi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris dari kata *resilience* yang artinya daya pegas, daya kenyal atau kegembiraan (John Echols., Hasan Shadily, 2005). Istilah resiliensi diformulasikan pertama kali oleh Block (dalam Kohnen, 1996) dengan nama *ego-resilience* yang diartikan sebagai kemampuan umum yang melibatkan kemampuan penyesuaian diri yang tinggi dan luwes saat dihadapkan pada tekanan internal maupun eksternal. Menurut R-G Reed (dalam Nurinayanti dan Atiudina, 2011) mendefinisikan resiliensi sebagai kapasitas atau kemampuan untuk beradaptasi secara positif dalam mengatasi permasalahan hidup yang signifikan.

Resiliensi seringkali disinonimkan sebagai ketangguhan atau keberterahan. Resiliensi memiliki definisi yang beragam sesuai dengan konteksnya. Resiliensi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempertahankan identitas dan fungsi suatu sistem dalam menghadapi perubahan internal dan gangguan eksternal serta selanjutnya bangkit kembali (Chrisna T. Permana, dkk, 2023). Dalam operasionalisasinya, resiliensi mencakup upaya meminimalisir resiko terhadap ancaman sesuai dengan kapasitas objek (mitigasi), upaya penyesuaian terhadap adanya resiko yang terjadi (adaptasi), dan upaya implementasi inovasi kegiatan untuk mampu bangkit kembali (Roychansyah, 2012). Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa resiliensi merupakan skema proses keberterahan yang meliputi mitigasi, adaptasi dan inovasi.

Menurut Reivich dan Shatte (2002), resiliensi adalah kapasitas untuk merespon secara sehat dan produktif ketika berhadapan dengan kesengsaraan atau trauma, yang diperlukan untuk mengelola tekanan hidup sehari-hari. Secara sederhana Jackson dan Watkin mendefinisikan resiliensi sebagai kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit. Samuel (dalam Nurinayanti dan Atiudina, 2011) mengartikan resiliensi sebagai kemampuan individu untuk tetap mampu bertahan dan tetap stabil dan sehat secara psikologis setelah melewati peristiwa-peristiwa yang traumatis. Sedangkan Nurinayanti dan Atiudina (2011) mendefinisikan resiliensi sebagai kemampuan untuk beradaptasi secara

positif ketika dalam kondisi yang tidak menyenangkan dan penuh resiko. Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa resiliensi adalah kemampuan yang ada dalam diri individu untuk Kembali pulih dari suatu keadaan yang menekan dan mampu beradaptasi dan bertahan dari kondisi tersebut.

Adger (2000) mengemukakan resiliensi dikategorikan sebagai “sosial” lebih ditentukan oleh entitas yang dikaji, yakni grup atau komunitas; dan juga sumber gangguannya, yakni sosial dan politik. Hal yang sama juga dijumpai pada definisi resiliensi sosial yang dikemukakan oleh Kwok et al (2016) mengemukakan bahwa “sosial” itu didasarkan pada entitasnya, yakni “orang-orang” dan komunitas. Ini sejalan dengan penjelasan Keck dan Sakdapolrak yang mengatakan bahwa semua definisi resiliensi sosial menyangkut entitas sosial, baik individu, organisasi, ataupun komunitas dan kemampuan atau kapasitasnya untuk menyerap, mengatasi dan menyesuaikan pada ancaman dari lingkungan dan sosial.

Resiliensi sosial adalah kemampuan masyarakat untuk bangkit kembali dan beradaptasi saat menghadapi bencana, krisis, atau tekanan sosial. Resiliensi sosial mengacu pada kapasitas individu, komunitas, lembaga, bisnis, dan sistem dalam masyarakat untuk menghadapi, menyerap, menyesuaikan diri, dan pulih dari kejutan atau gangguan yang merusak secara cepat dan efisien. Intinya, resiliensi sosial menunjukkan seberapa baik masyarakat mampu mengatasi guncangan dan bangkit kembali dengan cepat. Semakin tinggi resiliensinya, semakin cepat pemulihan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan kota, kota yang tangguh dapat didefinisikan sebagai kota yang secara sistem mampu menopang dirinya sendiri dengan kemampuan antisipatif, bertahan dan bangkit kembali setelah menghadapi ancaman yang dapat menghancurkan kota. Sistem yang dimaksud adalah keterpaduan berkelanjutan sistem fisik dan komunitas sosial. Sistem fisik meliputi lingkungan fisik alamiah dan lingkungan fisik terbangun buatan, sedangkan sistem komunitas dan sosial berkaitan erat dengan kolaborasi masyarakat dan institusi kota (Chrisna T. Permana, dkk, 2023).

Pada tataran lokal, resiliensi memiliki keterkaitan erat dengan modal sosial masyarakat. Kemampuan masyarakat mengatasi ancaman internal dan eksternal karena adanya isu sosial, ekonomi dan lingkungan dapat didefinisikan sebagai resiliensi sosial (Chrisna T. Permana, dkk, 2023). Masyarakat (komunitas) berperan penting sebagai bagian dari suatu sistem resiliensi bagian dari kota yang

tangguh. Di Indonesia, khususnya di Kota Makassar, resiliensi sosial pada skala lokal dapat ditemukan pada tataran wilayah pemukiman kampung, yang ditransfer dalam perkotaan disebut lorong.

Menurut Silas (dalam Chrisna T. Permana, dkk., 2023), kampung/lorong memiliki dinamika kualitatif yang sangat mendalam., sehingga tidak dapat hanya dilihat sebagai kumpulan rumah secara fisik dan kuantitatif. Setiap kampung/lorong memiliki kekhasan fisik, sejarah, dinamika kehidupan dan sistem sosial yang merepresentasikan identitasnya. Resiliensi kampung/lorong sangat dipengaruhi oleh *livelihood asset* (sumber daya manusia, modal sosial, modal fisik lingkungan, dan modal keuangan) sebagai kekuatan untuk mampu mempersiapkan diri, menghadapi dan pulih dalam kondisi lebih baik dari sebelumnya dengan cara mereka sendiri.

Lebih lanjut, penjelasan tentang Resiliensi Komunitas merupakan kemampuan manusia atau komunitas untuk menghadapi bencana dan responnya secara cepat, atau sistem sosial untuk mengabsorpsi dan *recover* dari peristiwa-peristiwa yang ekstrem. Dari sisi organisasi, resiliensi komunitas diartikan sebagai kemampuan suatu sistem untuk mengembangkan proses *self-regulatory* dan reorganisasi pada saat terjadinya gangguan (Chrisna T. Permana, dkk., 2023).

Konsep resiliensi komunitas, menurut Sharifi (dalam Chrisna T. Permana, dkk., 2023), memuat 5 (lima) dimensi, yaitu:

1. Dimensi Institusional

Resiliensi komunitas bisa dilihat dari keberadaan keberagaman agent dan kekuatan-kekuatan institusi yang bisa mempengaruhi segala upaya untuk meningkatkan resiliensi komunitas. Pendekatan yang menggabungkan antara top-down dan botton—up harus dilakukan untuk mengatur koordinasi antar agen dan kekuatan institusi. Factor yang menunjang resiliensi komunitas dari dimensi institusional adalah adanya *leadership* yang kuat dan partisipasi komunitas yang intens.

2. Dimensi Lingkungan

Menyangkut bagaimana manajemen sumber daya alam dilakukan dalam komunitas, proteksi terhadap ekosistem. Keberadaan asset-aset alam sangat penting untuk menghadapi guncangan dan kecepatan pemulihan komunitas.

3. Dimensi Sosial

Menyangkut seberapa besar ketertarikan sosial yang terjadi di suatu komunitas akan mempengaruhi besarnya ketangguhan (resiliensi) komunitas. Disamping itu, terkait dengan rasa aman dan kesejahteraan komunitas.

4. Dimensi Ekonomi

Berhubungan dengan keamanan dan kestabilan ekonomi, kepemilikan asset secara kolektif, terjadinya *partnership* antara *public* dan *private*.

5. Dimensi Infrastruktur

Menyangkut pengaturan lahan dan design perkotaan yang bisa mempengaruhi ketangguhan komunitas. Akses komunitas terhadap sarana prasarana dasar seperti makanan, air bersih, perumahan, energi, kesehatan dan pendidikan, keberadaan ruang terbuka hijau dan fasilitas sosial masyarakat.

D. Landasan Teori sebagai Pisau Analisis

1) Teori Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Bessan, Watts, Dalton dan Smith (dalam Suharto 2020), menyatakan secara singkat kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya.

Richard Morris Titmuss (1907-1973) adalah tokoh yang paling menonjol dalam perkembangan ilmu ini. Titmuss adalah seorang peneliti dan guru sosial perintis asal Inggris. Ia mendirikan disiplin akademis administrasi sosial (sekarang dikenal di universitas-universitas sebagai kebijakan sosial) dan menjabat sebagai ketua pendiri bidang kebijakan sosial di *London School of Economics*. Titmuss (dalam Nugroho 2018), menyatakan bahwa kebijakan sosial dapat dipahami sebagai administrasi sosial, pelayanan sosial, kesejahteraan sosial, keamanan sosial, dan negara kesejahteraan. Titmuss menyebutkan bahwa kebijakan adalah prinsip yang mengatur tindakan dengan tujuan tertentu seperti yang dinyatakannya bahwa konsep kebijakan hanya bermakna jika kita yakin bahwa kita dapat

mengubah dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, Titmuss menyatakan bahwa, kita tidak dapat mengubah cuaca karena kebijakan adalah tindakan yang berorientasi kata.

Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang ditunjuk untuk meningkatkan kualitas hidup warga negaranya melalui pengorganisasia dan/atau penyediaan pelayanan sosial, jaminan sosial dan program-program penunjang lainnya (Izudin, 2022). Untuk menunjang itu semua, wujud kebijakan sosial dapat berupa:

1. Peraturan dan perundang-undangan, pemerintah memiliki kewenangan membuat kebijakan publik yang mengatur pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan swasta agar mengadopsi ketetapan-ketetapan yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial.
2. Program pelayanan sosial, sebagian besar kebijakan diwujudkan dan diaplikasikan dalam bentuk pelayanan sosial yang berupa bantuan barang, tunjangan uang, perluasan kesempatan, perlindungan sosial dan bimbingan sosial (konseling, advokasi, dan pendampingan).
3. Sistem perpajakan, dikenal sebagai kesejahteraan fiskal. Selain sebagai sumber utama pendanaan kebijakan sosial, pajak juga sekaligus merupakan instrument kebijakan yang bertujuan langsung mencapai distribusi pendapatan yang adil dan merata.

Sebagai suatu kinerja, kebijakan sosial merupakan deskripsi atau evaluasi hasil-hasil pengimplementasian produk kebijakan sosial atau pencapaian tujuan suatu rencana pembangunan. Kebijakan sosial dalam pengertian ini menyangkut kegiatan analisis untuk melihat dampak positif maupun negatif, sebagai akibat dari diterapkannya suatu program. Secara khusus, dimensi kebijakan sosial ini seringkali diistilahkan dengan analisis kebijakan sosial (Duun, Quade dalam Suharto, 2005). Analisis kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang terencana dan sistematis dalam membuat analisis akurat mengenai konsekuensi kebijakan sosial, baik sebelum maupun sesudah kebijakan diimplementasikan (Suharto, 2004). Menurut Duun (dalam Suharto, 2005) ada tiga model analisis kebijakan yaitu:

1. Model Prospektif

Model prospektif adalah bentuk analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi kebijakan “sebelum” suatu kebijakan diterapkan.

Model ini dapat disebut model prediktif, karena seringkali melibatkan teknik-teknik peramalan (*forecasting*).

2. Model Retrospektif

Model retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat kebijakan “setelah” suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluatif terhadap dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.

3. Model Integratif

Model integratif adalah model perpaduan antara kedua model diatas. Model ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistic, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik “sebelum” maupun “sesudah” suatu kebijakan dioperasikan. Model analisis kebijakan ini biasanya melihat Teknik peramalan dan evaluasi secara terintegrasi.

Kebijakan sosial sangat penting untuk dibahas dalam program pemerintah karena memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan sosial, keadilan, dan stabilitas masyarakat. Kebijakan sosial menjadi kunci dalam upaya pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, stabil, dan sejahtera. Oleh karena itu, pembahasan dan implementasi kebijakan sosial yang baik sangat penting dalam program pemerintah.

2) Teori Pemberdayaan Masyarakat

Dalam bukunya yang berjudul *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice (1997)*, Jim Ife menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya. Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yakni: konsep power (daya) dan konsep disadvantaged (ketimpangan). Maka, pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan menggunakan 4 perspektif: pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis.

Dalam buku *Pengembangan Masyarakat* karya Zubaedi (2013: 21-22), penjelasan dari empat perspektif itu masing-masing adalah sebagai berikut.

1. Perspektif Pluralis

Perspektif pluralis melihat pemberdayaan sebagai proses buat menolong individu maupun kelompok masyarakat yang kurang beruntung, supaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif. Dalam perspektif pluralis, pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong masyarakat dengan memberikan pembelajaran tentang cara menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main). Jadi, pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang atau kalah.

2. Perspektif Elitis

Perspektif elitis memandang pemberdayaan sebagai upaya untuk mempengaruhi kalangan elite, seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, dengan cara membentuk aliansi dengan mereka, atau melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol yang kuat dari para elite.

3. Perspektif Strukturalis

Perspektif strukturalis memandang pemberdayaan sebagai agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuannya adalah menghapus bentuk-bentuk ketimpangan struktural. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan yang harus dibarengi oleh perubahan struktural secara fundamental serta hilangnya penindasan struktural.

4. Perspektif Post-Strukturalis

Perspektif post-strukturalis menilai pemberdayaan sebagai upaya mengubah diskursus yang menekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aksi atau praksis.

Jadi, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai langkah mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan kepada masyarakat. Jim Ife juga mengidentifikasi 6 jenis kekuatan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan mereka. Keenam kekuatan itu adalah:

kemampuan menentukan pilihan pribadi; kemampuan menentukan kebutuhan sendiri; kebebasan berekspresi; kemampuan kelembagaan; akses pada sumber daya ekonomi; dan kebebasan dalam proses reproduksi. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan masyarakat dan ketimpangan yang membuat mereka terbelakang, terdapat tiga strategi pemberdayaan yang bisa dilakukan. Ketiga strategi itu adalah:

1. Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
2. Pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif.
3. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka.

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka (Theresia et al., 2015: 197).

2.2 Penelitian Terdahulu

Ditemukan sejumlah studi-studi yang berkaitan dengan lorong wisata, juga sudah banyak dilakukan, seperti penelitian Mohammad Tahir Haning (2023) yang menyimpulkan bahwa secara umum kebijakan Lorong memberi dampak positif terhadap kepercayaan publik (public trust) mengenai kebijakan tersebut. Walaupun demikian, masih terdapat sejumlah masalah yang perlu dibenahi, antara lain; (1) tidak ada transparansi dalam hal anggaran atau bantuan pengelolaan Lorong wisata (Longwis); (2) tidak ada pemerataan bantuan atau pelatihan pada kelompok masyarakat pengrajin di Longwis industri; (3) bantuan yang diberikan UMKM kurang signifikan untuk pengembangan UMKM di Longwis, dan; (4) kurangnya kesadaran menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan.

Begitu juga studi yang dilakukan Asrianto (2023) yang menggambarkan adanya relasi sosial antara struktur dan agen didalam pengelolaan Lorong wisata (Longwis). Kesimpulan penelitiannya menegaskan bahwa maju dan berkembangnya lorong wisata lebih diakibatkan adanya kerjasama antara struktur (pemerintah setempat) dengan agen (kelompok masyarakat) di daerah tersebut.

Studi lain yang dilakukan Pratiwi Wulandari (2024) yang mengkaji Lorong wisata dari perspektif kebijakan sosial, menyimpulkan bahwa terjadi diferensiasi (perbedaan) dalam pengelolaan Lorong wisata yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Perbedaan tersebut, karena fungsi Dewan Lorong (Delor) sebagai penggerak partisipasi masyarakat Lorong ada yang sangat optimal dan tidak optimal. Hal ini yang menyebabkan adanya Longwis yang maju dengan unggul, dan juga ada yang tidak berkembang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu prosedur kerja yang sistematis, teratur dan tertib yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah penelitian guna mendapatkan kebenaran yang objektif. Metode penelitian merupakan hal yang penting dirumuskan sebelum melakukan penelitian di lapangan. Bab ini akan membahas Desain Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Teknik Penentuan Informan, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis penguatan resiliensi sosial pada kebijakan inovasi Lorong wisata di Kota Makassar. Pendekatan ini juga digunakan untuk mendalami kebijakan dan implementasi kebijakan serta peran kelembagaan dalam pengembangan lorong wisata di Kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dengan fokus pada 3 kecamatan miskin di Kota Makassar berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023. Dengan demikian maka kecamatan yang termuat adalah Kecamatan Makassar, Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Tallo. Waktu penelitian dimulai pada bulan April sampai dengan Agustus tahun 2024.

3.2 Sumber Data

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini menurut Sugiyono (2019), merupakan teknik penentuan informan dengan sengaja karena kriteria tertentu. Pemilihan informan ini berdasarkan pertimbangan bahwa orang yang dipilih dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan dan juga permasalahan yang sedang diteliti. Dalam teknis ini juga, siapa yang akan menjadi informan diserahkan pada pertimbangan peneliti yang menurutnya sesuai dengan tujuan penelitian.

Informan penelitian dikategorisasi kedalam 2 (dua) kelompok informan yaitu informan berdasarkan pada wawancara mendalam dan informan yang digunakan pada *Focus Group Discussion* (FGD), dimana kedua informan ini berbeda namun saling mendukung didalam upaya memperoleh data dan informasi yang komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian ini. Menyangkut tentang informan wawancara mendalam (*in depth interview*), ditentukan berdasar kriteria ditetapkan

sebelumnya, yaitu; (1) warga masyarakat yang bermukim di Lorong wisata, dan; (2) tokoh masyarakat dan pemerintah setempat. Sedangkan informan atau narasumber dalam FGD berasal dari berbagai pemangku kepentingan (pemerintah kota, kecamatan dan kelurahan, tokoh masyarakat dan tokoh lainnya).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang telah diaplikasikan meliputi:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (Siregar, 2017). Teknik wawancara dimaksudkan sebagai proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data penelitian berupa keterangan langsung dari informan, guna melengkapi temuan penelitian. Kegiatan yang dilaksanakan selama proses wawancara ini adalah proses tanya jawab secara mendalam, dilakukan secara tatap muka, baik dalam ruang fisik maupun ruang virtual seperti menggunakan berbagai alat komunikasi.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti akan menggunakan pendekatan "*Indepth interview*", yang dimaksudkan agar proses wawancara lebih terstruktur, dengan terlebih dahulu menyiapkan poin-poin pertanyaan (Nasution, 2002). Wawancara mendalam (*Indept Interview*) yaitu proses memperoleh keterangan dengan tujuan penelitian dan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan atau tanpa pedoman wawancara (Noor, 2013).

Proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan ketika masyarakat sedang beraktivitas di lorong, seperti ketika menyiram tanamannya, menyapu jalanan di lorong, dan berkumpul ketika sore hari. Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, dengan suasana yang santai luwes

layaknya percakapan persahabatan (Spradley, 2006). Melalui wawancara mendalam, maka peneliti bisa menemukan apa yang informan pikirkan dan rasakan mengenai Program Lorong Wisata (Mulyana, 2004). Selain mewawancarai masyarakat di lorong, peneliti juga mewawancarai pihak pemerintah maupun dinas yang terkait dengan Program Loring Wisata ini.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi berarti penggunaan terhadap dokumen dalam mengumpulkan data penelitian, terlebih dokumen-dokumen yang terkait erat dengan penelitian. Dokumen itu bisa berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan lain sebagainya (Arikunto, 1993). Dokumentasi penelitian ini dengan menelusuri segala jenis-jenis sumber informasi yang akurat. Seperti hasil penelitian sebelumnya, foto-foto kegiatan masyarakat, aturan-aturan dan sebagainya. Hal ini sangat penting karena bisa menunjang data temuan.

Dalam penelitian ini dokumen kualitatif dilakukan dengan menganalisis dokumen publik, seperti makalah atau koran, yang menyajikan informasi dan memberikan petunjuk terkait dengan Program Lorong Wisata.

3. Observasi (pengamatan)

Teknik observasi dimaksudkan sebagai upaya pengamatan dan pencatatan secara langsung, sistematis, terstruktur, oleh penelitian terhadap segala aspek yang tampak dari objek penelitian (Margono, 2005). Observasi kualitatif terjadi ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas-aktivitas sosial di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung yang berkenaan dengan segala aktivitas kegiatan Lorong Wisata. Rekaman pengamatan tersebut dikemas dalam bentuk catatan lapangan.

Melalui observasi ini, beberapa temuan kasat mata baik yang bersesuaian dengan keterangan informan maupun berseberangan. Keterangan yang tidak bersesuaian kemudian kami dalam dan pertanyakan ulang pada informan lainnya guna mengkonfirmasi

kebenaran sebagai fakta sebenarnya. Melalui observasi ini, peneliti dapat menemukan fakta empiris dari keterangan-keterangan informan.

Gold menyebut empat tipe seorang pengamat (*observer*) yaitu: menjadi partisipan penuh, partisipan sebagai pengamat, pengamat sebagai partisipan dan menjadi pengamat penuh (Ahmadi, 2014). Fungsi peran-peran ini untuk menyeimbangkan tingkat keterlibatan dengan sikap menjaga jarak, keakraban dan kedekatan dengan berdasarkan pada konsep penelitian.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti kegiatan masyarakat di lorong yang terkait dengan Program Lorong Wisata.

4. *Focus Grup Discussion* (FGD), dengan berbagai Instansi yang terkait dengan pelaksanaan program Longwis (Kepala Dinas, Camat dan/ Kelurahan) dalam wilayah Kota Makassar. FGD ini dilakukan untuk melengkapi data yang telah diperoleh dengan melalui kuesioner, terutama yang berkaitan dengan masalah dan solusi yang dapat dilakukan untuk penguatan resiliensi sosial dalam implementasi program lorong wisata di Kota Makassar.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan uraian dasar. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

Data-data yang diperoleh baik secara langsung atau primer (wawancara mendalam) maupun tidak langsung (data sekunder), dilakukan pengelompokan untuk memilih dan memilah data-data yang

diperlukan dan yang tidak diperlukan dalam penelitian ini. Proses reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan kepada hal yang dianggap penting. Reduksi data juga merujuk pada proses pemilihan, memberikan pusat perhatian pada penyederhanaan data yang dicatat pada catatan lapangan tertulis. Reduksi data juga berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung sampai laporan tersusun. Hal tersebut telah dilakukan dalam penelitian ini, sehingga data-data yang tidak relevan seperti halnya data tentang kondisi demografis informan diabaikan dan sebagainya

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Pada dasarnya penyajian data merupakan pembagian pemahaman peneliti tentang hasil penelitian. Penyajian yang digunakan pada data yang telah direduksi yaitu disajikan dalam bentuk teks naratif.

Setelah dilakukan reduksi data, maka data-data yang sudah sesuai dengan kebutuhan penelitian ini disusun secara sistematis berdasarkan data dan informasi yang diperoleh di lapangan. Proses berikutnya, dilakukan penyajian data dengan cara menampilkan sekumpulan informasi yang tersusun untuk memudahkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data juga bertujuan untuk memudahkan pengambilan keputusan untuk melanjutkan analisis

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama pengumpulan data. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara serta dokumentasi hasil penelitian.

Dalam proses penyajian data, peneliti juga melakukan verifikasi untuk menguji dan mengecek kembali makna atau arti dan penjelasan dari data-data yang disajikan serta menjelaskan alur sebab-akibat suatu fenomena itu terjadi. Sedangkan penarikan kesimpulan disajikan dalam

bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Lorong Wisata

Lorong Wisata (Longwis) merupakan *upgrade*-an dari program andalan Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, yakni Lorong *Garden* atau biasa disebut *longgar*, yang dilaksanakan di setiap kelurahan dan kecamatan di Kota Makassar. Program Lorong Wisata bertujuan untuk memperkuat dan memulihkan sektor ekonomi di Kota Makassar, yang sejalan dengan inisiatif yang tercakup dalam program Makassar *Recover*. Makassar *recover* fokus pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Zainuddin, 2021). Selain itu Lorong Wisata juga berfungsi pada penataan lorong yang berfungsi untuk menjadikan lorong sebagai daerah produktif dan sebagai ruang nyaman baru di Kota Makassar. Kawasan lorong dipercantik dengan berbagai jenis tanaman produktif dan tanaman hias, jalanan dicat di sepanjang lorong, dan berbagai fasilitas umum penunjang seperti penerangan, bak sampah, dan pot tanaman bunga.

Program ini dibuat oleh Pemerintah Kota untuk mengubah pandangan sekaligus bayangan tentang lorong yang selama ini identik dengan kata kumuh dan kotor. Maka, dirubahlah sejumlah lorong menjadi tempat untuk berkumpul atau nongkrong seperti cafe (Sri, 2022). Selain itu program ini juga merupakan salah satu inisiatif yang dijalankan oleh Pemerintah Kota dalam rangka memulihkan ekonomi masyarakat, terutama di area lorong setelah mengalami dampak dari adanya pandemi Covid-19. Dimana ketika pandemi Covid-19 berlangsung, ekonomi di Kota Makassar mengalami penurunan yang signifikan yaitu menyentuh angka -1,27 persen. Namun pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi kota berhasil pulih dengan angka menyentuh 4,47 persen. Bahkan data terbaru, di tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar meningkat menjadi 5,4 persen melebihi angka pertumbuhan di tingkat provinsi maupun nasional (Firman, 2023).

Masyarakat dalam menjalankan Program Lorong Wisata ini memanfaatkan pekarangan, pagar, dan dinding sepanjang lorong untuk menanam tanaman yang bernilai ekonomis atau dapat dikonsumsi sehari-hari

seperti tomat, cabai, kangkung, dan sebagainya. Pada beberapa bagian lorong, bahkan ada tanaman yang digantung melintang di atas lorong. Barang-barang bekas dimanfaatkan untuk mendukung Program Lorong Wisata, seperti botol bekas, ban bekas, dan bahkan celana jeans bekas pun disulap menjadi pot bunga, sehingga secara tidak langsung juga mengurangi produksi sampah di Kota Makassar. Selain itu, lorong juga dijadikan sebagai tempat wisata kuliner yang memperkenalkan ragam hidangan tradisional dan makanan khas daerah Kota Makassar. Potensi-potensi yang ada pada masyarakat di gali agar masyarakat dapat menjadi mandiri dengan memanfaatkan setiap potensi yang dimilikinya.

Program Lorong Wisata merupakan implementasi dari visi pemerintah Kota Makassar (Dinas Parawisata, 2023). Adapun visi Pemerintah Kota Makassar yaitu “Mewujudkan Kota Dunia yang *Sombere* dan *Smart City*”. Untuk mewujudkan Makassar sebagai kota dunia, Pemerintah Kota Makassar mulai dengan membangun dan menata lorong yang ada di Makassar melalui Program sebelumnya yaitu Lorong *Garden* dengan fokus penataan lorong dan di *upgrade* ke Program Lorong Wisata ini dengan mengembangkan ekonomi masyarakat melalui potensi-potensi lokal yang dimiliki oleh masyarakat didalam lorong, diharapkan kehidupan masyarakat yang tinggal di lorong, baik secara sosial maupun ekonomi, berubah menjadi lebih baik dibandingkan sebelum adanya program ini.

Jumlah lorong yang ada di Kota Makassar sebanyak 7.532 lorong, dengan jumlah penduduk yang tinggal di lorong mencapai 353.464 jiwa (wawancara Staf Dinas Parawisata, 20 Juni 2024). Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, keberadaan masyarakat yang tinggal di lorong ini dapat menjadi basis dalam menjadikan Makassar sebagai kota dunia. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan *the United National Population Fund* (UNFPA) bahwa populasi yang tinggi dapat menjadi pendorong pembangunan berkelanjutan, dengan syarat pemerintah setempat memberikan akses kepada masyarakatnya, seperti akses terhadap informasi, kesehatan, dan pendidikan (Herrmann, Guzman, & Schensul, 2012: 9). Melalui Program Lorong Wisata ini, masyarakat kemudian diberikan akses untuk bisa hidup lebih baik melalui penataan, dan pemberdayaan lorong.

Program Lorong Wisata ini tidak hanya sekadar program peremajaan fisik semata, akan tetapi lebih mengarah kepada perbaikan kesadaran masyarakat lorong (non-fisik). Masyarakat lorong diajak untuk mau bertanggung jawab atas lingkungan tempat tinggalnya sehingga penanganan wilayah kumuh melalui Program Lorong Wisata ini tidak lagi dianggap hanya semacam meminum obat penghilang rasa sakit, tetapi sudah menyentuh sampai akar persoalan yang ada.

2. Kondisi Lorong

a. Kelurahan Parang Tambung

Sepanjang jalan poros kelurahan Parang Tambung, terlihat gersang, padat dan sedikit kumuh. Namun, kondisi tersebut kemudian berubah drastis ketika memasuki lorong yang ada di kelurahan ini, yaitu di Lorong *Saga*, dan Lorong *Kyoto*. Tembok sepanjang lorong yang penuh dengan mural warna-warni yang berisi lukisan pahlawan dan warisan-warisan budaya khas Sulawesi Selatan, jalanan sepanjang lorong dicat dengan warna cerah, ada gapura didepan pintu gerbang masuk lorong, hingga tanaman hijau yang terdapat di sepanjang lorong merupakan gambaran dari kedua lorong ini. Adanya Program Lorong Wisata di lorong ini membuat karakteristik lorong yang umumnya terdiri dari kondisi rumah yang kumuh, pengap, dan jorok tidak tampak. Kondisi ini sangat berbeda dengan *Lorong Daeng Jakking* yang berada di Kelurahan yang sama. Lorong *Daeng Jakking* terlihat begitu gersang dan sangat sempit, tidak ada tanaman hijau dipinggir jalan serta tidak ada mural warna warni disekitar dinding lorong karena kondisi rumah sangat padat dan tidak ada dinding yang bisa dijadikan tempat untuk menggambar mural, selain itu di lorong ini tidak ada gapura yang menandakan bahwa ini adalah lorong wisata sehingga sangat sulit untuk mengetahui lokasi lorong *Daeng Jakking*.



Gambar 4.1 Kondisi Fisik Lorong Saga (Kanan), Lorong *Daeng Jakking* (Tengah), Lorong *Kyoto* (Kiri)

Kondisi rumah penduduk di ketiga lorong ini umumnya berdempetan, terbuat dari batu bata, dan merupakan bangunan permanen. Secara keseluruhan, kondisi jalanan di ketiga lorong masih baik, jalanan lorong *Saga* dan Lorong *Daeng Jakking* terbuat dari *paving block*, sedangkan lorong *Kyoto* terbuat dari aspal. Lebar jalan di ketiga lorong ini berbeda. Di Lorong *Saga* lebar jalan sekitar 1,5 meter, lorong *Daeng Jakking* 1 meter sedangkan Lorong *Kyoto* memiliki lebar 3 meter. Perbedaan ukuran lorong ini disebabkan karena letak ketiga lorong juga berbeda. Menurut hasil wawancara dengan pihak Dewan Lorong *Kyoto*, lorong *Kyoto* itu memiliki jalan yang lebar karena lorong ini menjadi jalanan penghubung antara Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.

Masyarakat yang tinggal di ketiga lorong ini umumnya merupakan penduduk yang sudah sejak lama tinggal di daerah tersebut. Jumlah rumah yang ada di Lorong *Saga* sebanyak 40 unit, Lorong *Daeng Jakking* 18 unit, dan di Lorong *Kyoto* sebanyak 39 unit. Setiap rumah di kedua lorong ini umumnya ditinggali oleh 5-8 orang. Dengan ukuran rumah yang tidak terlalu besar, membuat penghuni rumah harus hidup dengan kondisi sesak, di beberapa rumah, ada yang dihuni oleh beberapa KK. Rata-rata masyarakat yang tinggal di ketiga lorong ini bekerja di sektor informal. Hanya ada beberapa masyarakat yang bekerja di sektor formal. Pekerjaan di sektor informal ini menuntut jam kerja yang panjang dan tidak tetap. Hal ini pada akhirnya menyita waktu dan tenaga masyarakat, sehingga berdampak pada

keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya. Pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) dan Buruh Harian mendominasi ketiga lorong ini, ini menyebabkan hampir 50 persen dari penduduk lorong merupakan penerima bantuan sosial dari pemerintah. Selain itu, karena pekerjaan Ibu Rumah Tangga mendominasi maka menyebabkan kesempatan bagi kaum perempuan untuk terlibat dalam Program Lorong Wisata ini, lebih besar dibandingkan kaum laki-laki.

b. Kelurahan Bara-Baraya Selatan

Sepanjang jalan Kelurahan Bara-Baraya Selatan terlihat banyak lorong didalamnya. Namun, ada tiga lorong yang berbeda dari lorong lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kelurahan bara-baraya Selatan ketiga lorong ini dikategorikan sebagai lorong yang maju, stagnan, dan belum berkembang. Lorong paling maju yang ada di kelurahan bara-baraya diberi nama Lorong UMKM, lorong ini memiliki dijadikan lorong unggulan karena banyak potensi masyarakat yang ada didalam lorong itu. Dibandingkan dengan lorong-lorong lain yang ada di kelurahan Bara-baraya Selatan lorong ini memiliki 11 jenis usaha didalamnya, selain itu ada juga bank sampah, tentu saja berdasarkan penilaian dari pihak kelurahan yang mengkoordinir program ini merasa bahwa ini lorong paling maju karena mempunyai potensi perputar ekonomi yang besar. Berbanding terbalik dengan lorong *sipakatau* yang didalam lorongnya belum ada perkembangan sama sekali, tidak ada tanaman, UMKM dibentuk seadanya, penataan lorong tidak berjalan. Dan lorong terakhir yaitu lorong Cinta Damai, diantar tiga lorong yang menjadi fokus lokasi penelitian lorong ini paling baik secara fisik, dinding dipenuhi mural warna warni, serta jalanan di gambar dengan macam-macam permainan anak, tetapi potensi perputar ekonomi di lorong ini tidak berkembang dikarenakan masyarakatnya yang acuh dengan program ini.



Gambar 4.2 Kondisi Fisik Lorong UMKM (Kiri), Lorong Cinta Damai (Tengah), Lorong *Sipakatau* (Kanan)

Kondisi rumah penduduk di ketiga lorong ini umumnya berdempetan, terbuat dari batu bata, dan merupakan bangunan permanen. Secara keseluruhan, kondisi jalanan di ketiga lorong masih baik, jalanan lorong UMKM dan Lorong Cinta Damai terbuat dari *paving block*, sedangkan lorong *Sipakatau* terbuat dari coran. Lebar jalan di ketiga lorong ini berbeda. Di Lorong UMKM dan cinta damai lebar jalan sekitar 2,5 meter sedangkan Lorong *Sipakatau* memiliki lebar 1 meter. Perbedaan ukuran lorong ini disebabkan karena letak ketiga lorong juga berbeda.

Masyarakat yang tinggal di ketiga lorong ini umumnya merupakan penduduk yang sudah sejak lama tinggal di daerah tersebut. Jumlah rumah yang ada di Lorong UMKM sebanyak 18 unit, Lorong Cinta Damai 20 unit, dan di Lorong *Sipakatau* sebanyak 14 unit. Setiap rumah di kedua lorong ini umumnya ditinggali oleh 5-8 orang. Dengan ukuran rumah yang tidak terlalu besar, membuat penghuni rumah harus hidup dengan kondisi sesak, di beberapa rumah, ada yang dihuni oleh beberapa KK. Rata-rata masyarakat yang tinggal di ketiga lorong ini bekerja di sektor informal. Hanya ada beberapa masyarakat yang bekerja di sektor formal. Pekerjaan di sektor informal ini menuntut jam kerja yang panjang dan tidak tetap. Hal ini pada akhirnya menyita waktu dan tenaga masyarakat, sehingga berdampak pada keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya. Pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) dan Buruh

Harian mendominasi ketiga lorong ini, ini menyebabkan hampir 50 persen dari penduduk lorong merupakan penerima bantuan sosial dari pemerintah.

c. Kelurahan Kaluku Bodoa

Sepanjang jalan dikelurahan Kaluku Bodoa tidak berbeda dengan kelurahan sebelumnya. Kelurahan Kaluku Bodoa yang terletak di Kecamatan Tallo Kota Makassar terdiri dari 23.325 total penduduk yang merupakan jumlah terbanyak di antara 14 kelurahan lainnya di Kecamatan Tallo Kota Makassar. Dengan jumlah penduduk yang secara kuantitas terbanyak, membuat Kelurahan Kaluku Bodoa juga memiliki jumlah lorong yang relatif banyak. Mengingat, berdasarkan aturan Perwali bahwa setiap kelurahan yang ada di Kota Makassar diwajibkan untuk membuat lorong wisata minimal 7 setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah di Kelurahan Kaluku Bodoa senantiasa mengadakan penambahan 7 lorong setiap tahunnya. Hingga kini sejak tahun 2022-2024 sudah terdapat 21 jumlah lorong wisata yang tersebar di Kelurahan Kaluku Bodoa yang dipilih berdasarkan penunjukan dari pihak pemerintah setempat (kelurahan).



Gambar 4.3 Kondisi Fisik Lorong Sulapa Appa dan Lorong Mr. Big

B. Hasil Penelitian

Inovasi program lorong wisata yang sejatinya sebagai program strategis Walikota Makassar dalam bentuk interbensi pemerintah dengan menggerakkan potensial resources masyarakat yang berbasis lorong merupakan implementasi dari program prioritas yakni recovery ekonomi pada saat pandemi hingga pasca pandemi covid 19. Hasil penelitian mencakup masalah sosial yang Nampak pada program lorong wisata, bentuk kebijakan aplikatif dalam program lorong wisata serta pemanfaatan kelompok sosial dalam program loorng wisata yang kesemuanyas merupakan upaya penguatan resiliensi sosial masyarakat lorong dengan uraian sebagai berikut:

1. Masalah – Masalah Sosial dalam Lorong Wisata

Perkembangan lorong wisata di Kota Makassar dapat membawa dampak positif bagi berbagai sektor jika diimplementasikan dengan baik, namun juga dapat menimbulkan beberapa masalah sosial yang tidak bisa diabaikan, berikut beberapa temuan lapangan terkait masalah-masalah sosial yang ada didalam lorong wisata.

1. Kemiskinan

Lorong Wisata yang kini sering dianggap sebagai wadah untuk menyejahterakan masyarakat ternyata tersembunyi realitas pahit kemiskinan yang masih membayangi warga yang tinggal didalam lorong. Lorong-lorong sempit yang telah disulap menjadi lebih menarik ini menyimpan kisah kontras antara keindahan visual dan kesulitan ekonomi yang dihadapi penduduknya. Banyak keluarga yang tinggal di kawasan ini masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka sehari-hari. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibu NR yang menyatakan bahwa:

“....susah ini adek saya ini tinggal dari jualan-jualan minuman ini mami ku hidupi diriku, tidak adami juga suami anak ku masih sekolah juga kadang kita tidak makan tommki karena banyak kebutuhan. Baru saya tidak dapatka bantuan adek, selaluji itu kodong datang RT ku data ka tapi kenapa tidak turun-turun itu bantuan kodong ke say ana tetanggaku yang lain dapat ji....”

Ruah-rumah sederhana yang berjejer rapat di sepanjang lorong, dengan beberapa rumah yang kondisinya jauh dari kata layak. Hal ini terlihat dari dinding-dinding yang retak, atap yang bocor, dan ruang terbatas menjadi gambaran umum hunian di dalam lorong wisata ini. Meski tampilan luar lorong telah dipercantik

dengan mural dan hiasan warna-warni, namun rumah hunian warga masih mencerminkan kesederhanaan dan keterbatasan ekonomi penghuninya. Seperti yang dikatakan Ibu SR:

“.....saya yang kutahu dari ini program toh dek Lorong wisata itu, Lorong yang dikasih cantik saja Lorong nya dikasih cat cat, terus ada tumbuhan di pinggir-pinggirnya. Kalau mau ditanya apa dirasa tidak adaji dek kayakji seperti dulu kurasa ini hidupku....”

Selain itu, pengangguran dan *underemployment* menjadi persoalan serius di kalangan warga lorong wisata ini. Banyak yang bekerja serabutan atau mengandalkan ekonomi informal dengan penghasilan yang tidak menentu. Beberapa mencoba peruntungan dengan berjualan makanan dan minuman yang dalam seharinya belum diketahui apakah ada yang laku terjual atau tidak, namun pendapatan mereka seringkali tidak cukup untuk mengangkat taraf hidup keluarga secara signifikan. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Bapak YN:

“.....disini dek warga ku rata-rata kerjanya itu buruh harian, satu dua oranggi pegawai. Jadi kalau mauki bilang rata-rata memang butuh kodong bantuan. Bisa tommy itu dibidang pengangguran ki karena kalau buruh harian kadang itu ada sede na dapat kalau kerjaki kalau tidak kerjaki tidak ada lagi kodong....”

Anak-anak di lorong wisata ini juga tidak luput dari dampak kemiskinan. Ada beberapa anak yang terpaksa putus sekolah karena ketidakmampuan orangtua membiayai pendidikannya. Beberapa bahkan harus ikut mencari nafkah untuk membantu ekonomi keluarga, mengorbankan masa kanak-kanak dan kesempatan mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Meski pemerintah dan berbagai pihak telah berupaya mengembangkan lorong wisata sebagai cara untuk meningkatkan ekonomi lokal, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di kawasan tersebut, karena kurang adanya perhatian yang mereka rasakan.

2. Kurangnya nfrastruktur dan Fsilitas mum yang Memadai

Lorong-lorong di Kota Makassar, meski telah dirubah menjadi lebih menarik, ternyata masih menghadapi tantangan serius dalam hal infrastruktur dan fasilitas umum. Jalan-jalan sempit yang menjadi ciri khas lorong ini seringkali berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Permukaan jalan yang tidak rata, dan mudah tergenang air saat hujan tidak hanya mengurangi kenyamanan masyarakat yang

tinggal didalamnya, tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan bagi warga setempat. Sejalan dengan yang dikatakan Pak DK yang menyatakan bahwa:

“.....itu Lorong dek toh sempit ki, dikasih lagi pot bunga bahaya juga untuk yang naik motor nanti na tabrak kodong, belum lagi kalau ada anak anak yang main main toh, jalan juga kan ndk rata ki kayak didepan itu ada sedikit paving bloknya yang agak naik daripada dibelakang....”

Sistem drainase yang buruk menjadi permasalahan lain yang mencolok. Saat musim hujan tiba, banyak lorong berubah menjadi genangan air yang sulit dilalui. Hal ini tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berpotensi menjadi sarang nyamuk dan sumber penyakit. Kurangnya perhatian terhadap sistem pembuangan air ini juga berkontribusi pada masalah sanitasi yang lebih luas di kawasan ini.

Fasilitas umum seperti tempat pembuangan sampah juga masih sangat terbatas di dalam lorong, kurangnya tempat sampah yang memadai seringkali mengakibatkan penumpukan sampah di sudut-sudut lorong, menciptakan pemandangan yang tidak sedap dan potensi masalah kesehatan. Penerangan jalan umum juga menjadi isu serius yang perlu diperhatikan. Banyak bagian lorong yang gelap saat malam hari karena kurangnya lampu jalan atau penerangan yang tidak berfungsi dengan baik. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan keamanan bagi warga yang tinggal didalamnya.

3. Masalah Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

Lorong-lorong di Kota Makassar, meski menawarkan pesona unik dengan mural-mural indah dan suasana khas perkampungan, masih bergulat dengan persoalan kebersihan dan pengelolaan sampah yang serius. Pemandangan kontras antara dinding-dinding berwarna-warni dan tumpukan sampah di sudut-sudut lorong menjadi pemandangan yang terlalu sering dijumpai. Masalah ini tidak hanya mengurangi daya tarik visual lorong wisata, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampak kesehatan bagi warga setempat dan pengunjung.

Sistem pengumpulan sampah yang tidak teratur dan tidak memadai menjadi akar dari permasalahan ini. Banyak lorong tidak memiliki tempat pembuangan sampah yang cukup, sehingga warga terpaksa menumpuk sampah di sembarang tempat. Keterbatasan akses kendaraan pengangkut sampah ke lorong-lorong sempit juga menyulitkan proses pengangkutan sampah secara rutin, mengakibatkan penumpukan sampah yang berlarut-larut. Seperti yang dikatakan oleh Ibu DW, yang menyatakan bahwa:

“.....itu mobil sampah dek jarang sekali datang, nah ini sampah toh menumpukmi. Sukaja itu protes, tapi begitumi kalau sudahki protes datangmi besoknya tapi nanti begituji lagi Kembali jadi ituji biasa kasih pusing ki karena menumpuk mi sampah dan berbau mi....”

Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan juga berkontribusi pada masalah ini. Meski sebagian warga telah berupaya menjaga kebersihan di depan rumah mereka, masih banyak yang belum memiliki kebiasaan membuang sampah pada tempatnya atau memilah sampah. Perilaku membuang sampah sembarangan, terutama ke saluran air, semakin memperburuk kondisi sanitasi dan estetika lorong.

Pengelolaan sampah yang buruk juga berdampak pada sistem drainase lorong. Sampah yang menyumbat saluran air menyebabkan genangan dan banjir saat hujan turun. Hal ini tidak hanya mengganggu aktifitas warga, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangbiakan nyamuk dan penyebaran penyakit.

4. Kepadatan penduduk yang tinggi

Lorong-lorong di Kota Makassar, yang kini telah berubah menjadi lorong yang lebih indah melalui Program Lorong Wisata, ternyata menghadapi tantangan yang serius juga akibat dari kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Kawasan yang awalnya merupakan permukiman padat penduduk ini kini harus menampung beban ganda sebagai tempat tinggal dan destinasi wisata. Rumah-rumah berdesakan, nyaris tanpa jarak, menciptakan labirin lorong sempit yang meski menarik secara visual, namun menyimpan berbagai persoalan sosial dan lingkungan. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu TI, yang menyatakan bahwa:

“.....dimana mi dek itu kodong mau disimpan itu hidroponik, kita lihat mi saja ini Lorong sempit sekalimi, kalau disimpan itu hidroponik dipinggir dimana mi bisa orang lewat, tidak ada tomme juga tempat duduk di pinggir jalan karena banyak pot bunga.....”

Ruang terbuka yang sangat terbatas menjadi konsekuensi langsung dari kepadatan ini. Warga nyaris tidak memiliki area untuk bersosialisasi atau beraktifitas di luar rumah. Anak-anak terpaksa bermain di lorong-lorong sempit, beradu dengan aktifitas sehari-hari penduduk. Situasi ini tidak hanya membatasi ruang gerak warga tetapi juga menimbulkan potensi konflik.

Masalah sanitasi dan kesehatan menjadi semakin kompleks akibat kepadatan yang tinggi. Sistem pembuangan limbah rumah tangga seringkali tidak mampu

menampung beban dari jumlah penduduk yang besar. Resiko penyebaran penyakit meningkat, terutama saat musim hujan ketika genangan air mudah terbentuk di lorong-lorong sempit yang padat.

Privasi menjadi barang langka bagi penduduk lorong wisata. Dinding-dinding tipis antar rumah hampir tidak menyisakan ruang pribadi bagi penghuninya. Suara-suara dari tetangga menjadi bagian dari keseharian yang tak terhindarkan. Situasi ini seringkali menimbulkan stress dan ketegangan sosial di antara warga.

5. Potensi kriminalitas yang Mengancam Keamanan

Lorong-lorong wisata di Kota Makassar, tidak luput dari bayang-bayang potensi kriminalitas dan masalah keamanan. Karakteristik fisik lorong yang sempit, berliku, dan seringkali kurang penerangan menciptakan kondisi yang rentan terhadap tindak kejahatan. Celah-celah gelap dan sudut-sudut tersembunyi dapat menjadi tempat persembunyian ideal bagi pelaku kriminal, terutama saat malam hari atau di area yang kurang ramai. Seperti yang dikatakan Ibu ML, yang menyatakan bahwa:

“.....itu dek kalau malam biasa gelap tapi sekarang adami lampu dipasangkan, kemarin juga sempat adaji CCTV tapi beberapa bulan rusakmi lagi. Ituji biasa ditakutkan kalau ada pencurian toh dek tapi sejauh ini amanji cuma begitumi karena ini Lorong kan tembus tembus jadi rawan biasa ada pencurian....”

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba juga menjadi kekhawatiran di beberapa area lorong wisata. Lokasi yang tersembunyi dan sulit diakses oleh aparat keamanan berpotensi menjadi tempat transaksi atau konsumsi zat terlarang. Hal ini membawa dampak negatif bagi generasi muda yang rentan terhadap pengaruh negatif.

Kurangnya pengawasan dan patroli keamanan yang konsisten di area lorong wisata semakin memperburuk situasi. Keterbatasan akses dan sumber daya membuat aparat keamanan kesulitan melakukan pengawasan menyeluruh. Sistem keamanan mandiri oleh warga lokal, seperti ronda atau pos keamanan lingkungan, seringkali tidak memadai untuk menangani kompleksitas keamanan. Masalah pencahayaan yang tidak memadai di malam hari menjadi faktor signifikan yang berkontribusi pada kerawanan keamanan. Banyak lorong yang minim penerangan, menciptakan area gelap yang berpotensi menjadi tempat persembunyian pelaku kejahatan atau lokasi untuk aktifitas ilegal.

Keterbatasan akses darurat juga menjadi perhatian serius. Lorong-lorong sempit dan berliku seringkali sulit dilalui oleh kendaraan darurat seperti ambulans atau mobil pemadam kebakaran. Dalam situasi genting, keterlambatan penanganan dapat berakibat fatal. Kondisi ini mengancam keselamatan penduduk setempat.

6. Konflik Sosial Antar Warga

Lorong-lorong wisata di Kota Makassar, menyimpan dinamika sosial yang kompleks di antara warganya. Transformasi cepat dari kawasan pemukiman biasa menjadi lorong wisata telah menciptakan berbagai gesekan dan ketegangan dalam masyarakat. Perbedaan pandangan tentang arah pengembangan lorong sering kali menjadi pemicu konflik antar kelompok warga. Seperti yang dikatakan Ibu NW, yang menyatakan bahwa:

“.....deh iya dek nah, ituji disini kita sama RT tidak baku baik, karena begitumi bukan itu RT yang dimau, baru dia selalu ji na bilang ini Lorong dia perbaiki padahal kita ini warganya yang perbaiki sedikit sedikit, kalau kerja bakti ki mana ada dia datang bantuki.....”

Salah satu sumber utama konflik adalah kesenjangan ekonomi yang semakin terlihat. Sebagian warga yang berhasil memanfaatkan peluang ekonomi, seperti membuka warung mengalami peningkatan pendapatan. Sementara itu, warga lain yang tidak terlibat langsung dalam aktifitas ini merasa tertinggal dan terabaikan. Kecemburuan sosial ini seringkali menimbulkan ketegangan dan perpecahan antar warga.

Persaingan dalam pemanfaatan ruang publik juga memicu konflik. Lorong-lorong sempit yang dulunya menjadi ruang bersama bagi warga kini harus berbagi demi kepentingan pribadi sering berujung pada perselisihan antar warga. Batas antara ruang privat dan publik menjadi semakin kabur, menimbulkan ketidaknyamanan dan konflik kepentingan. Seperti yang dikatakan Ibu NR, yang menyatakan bahwa:

“.....itu disana toh dek ada aparat yang na simpan kendang ayamnya dilorong padahal luas ji lorongnya, tapi tidak ada bisa tegurki karena deh takut semua orang, karena suka sekali marah marah itumi ayamnya yang suka kasih mati disini tumbuh-tumbuhan karena kalau siang na lepas mi....”

Masalah pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan juga sering memicu perselisihan. Beberapa warga merasa bahwa tetangga mereka tidak berkontribusi secara adil dalam menjaga kebersihan lorong, sementara yang lain merasa bahwa

beban membersihkan sampah tidak seharusnya jatuh pada mereka. Ketidakjelasan tanggung jawab dan kurangnya sistem pengelolaan yang terorganisir semakin memperburuk situasi.

7. Minimnya Keterlibatan Pemerintah Lokal

Program lorong wisata di Kota Makassar, meski telah menarik perhatian banyak pihak, masih menghadapi tantangan serius akibat minimnya keterlibatan pemerintah lokal. Inisiatif yang awalnya dimulai sebagai gerakan masyarakat untuk mempercantik lingkungan, kini terasa berjalan tanpa arah yang jelas karena kurangnya dukungan dan arahan dari pemerintah setempat. Absennya kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan dari pihak berwenang membuat pengembangan lorong wisata cenderung sporadis dan tidak terkoordinasi.

Berdasar pada tatanan struktural yang memuat kebijakan, pemerintah lokal dalam hal ini pemerintah daerah setempat memiliki tingkat keterlibatan yang minim terhadap interaksi dan partisipasi di tengah masyarakat. Dengan absennya pemerintah setempat menyuarakan adanya kekurangan dalam upaya komunikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan program lorong wisata. Kurangnya diseminasi informasi dari pemerintah ini merujuk pada terbatasnya upaya penyebaran informasi dan pengetahuan secara sistematis kepada masyarakat lorong terkait ide, inovasi dan program yang digalakkan dalam lorong wisata yang senantiasa dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat lorong.

Hal ini tentu menjadi sebuah problematika, mengingat keterlibatan aktif pemerintah setempat dalam memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat di lorong sangat penting guna membangun dan menumbuhkan kesadaran masyarakat. Memberikan sosialisasi mengenai program, kebijakan, inovasi serta potensi yang ada di lingkungan lorong wisata dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang nilai positif program lorong wisata yang dapat dikembangkan. Disamping itu, dengan massifnya keterlibatan pemerintah setempat dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk ikut terlibat dalam segala aktifitas yang berkenaan dengan program lorong wisata. Pemerintah setempat juga sebagai *agen* dan *channeling* yang dapat menjembatani untuk mengisi kesenjangan informasi antara masyarakat dengan program/kebijakan yang terkait dengan pengembangan lorong wisata. Serta memfasilitasi kemitraan dan kolaborasi yang menjadi penghubung antara

pemerintah pusat, pelaku usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya di dalam lorong wisata, sehingga dapat mendorong sinergitas dan kerjasama yang baik guna memperkuat keberlanjutan program lorong wisata yang lebih optimal.

Kondisi minimnya keterlibatan pemerintah setempat pada program lorong wisata ini dilihat dari kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat lorong. Hal ini dijumpai pada lokasi yang menjadi lokus penelitian, dimana keterlibatan pemerintah setempat dalam hal ini pihak kelurahan sangat kurang memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat lorong terkait program lorong wisata. Keterlibatan tersebut hanya terlihat pada saat adanya kunjungan dari pihak eksternal pada lorong wisata.

Disamping itu, gaya kepemimpinan seorang pemimpin di suatu daerah juga sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat terhadap suatu program. Merujuk pada kurangnya inisiatif pemerintah setempat terkait program lorong wisata juga mematikan semangat dan inisiasi masyarakat untuk mengembangkan program lorong wisata yang ada di dalam lorong mereka. Hal ini terjadi atas dasar keterlibatan pemerintah setempat selaku pemangku kebijakan tidak memberikan sumbangsih secara langsung kepada masyarakat, sedang masyarakat sebagai agen memerlukan arahan dan pendampingan dari pemerintah setempat guna berkelanjutannya program lorong wisata.

Salah satu dampak paling nyata dari minimnya keterlibatan pemerintah adalah (1) kurangnya infrastruktur pendukung yang memadai. Perbaikan jalan, sistem drainase, penerangan, dan fasilitas umum lainnya yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah sering kali terabaikan. Akibatnya, lorong-lorong wisata ini, meski menarik secara visual, masih jauh dari standar kenyamanan dan keamanan yang diharapkan dari sebuah destinasi wisata. (2) Masalah pendanaan juga menjadi isu krusial akibat minimnya keterlibatan pemerintah. Program-program pengembangan dan pemeliharaan lorong wisata seringkali terhambat karena keterbatasan dana. Masyarakat dan pelaku usaha lokal terpaksa mengandalkan sumber daya terbatas mereka sendiri, yang tentu saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengembangan yang berkelanjutan dan profesional. (3) Kurangnya program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dari pemerintah lokal juga menjadi kendala serius. Warga yang terlibat dalam pengelolaan lorong wisata seringkali tidak dibekali dengan pengetahuan dan

keterampilan yang memadai dalam hal manajemen pariwisata, pelayanan wisatawan, atau pengelolaan lingkungan. Akibatnya, potensi ekonomi dari lorong wisata tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, dan kualitas pengalaman wisatawan pun tidak konsisten. (4) Minimnya keterlibatan pemerintah juga berdampak pada lemahnya promosi dan pemasaran lorong wisata di tingkat yang lebih luas. Tanpa dukungan penuh dari pemerintah lokal, upaya untuk memasukkan lorong wisata ke dalam peta pariwisata kota atau bahkan nasional menjadi sangat terbatas. Akibatnya, banyak potensi UMKM, dan informasi terkait cagar budaya yang masih ada area perkotaan terlewatkan.

8. Ketergantungan Institusional Dewan Lorong

“Ketergantungan Institusional” menggambarkan kondisi dimana suatu lembaga/organisasi/badan khusus (dalam hal ini Dewan Lorong) sangat bergantung pada arahan atau dukungan dari institusi lain (dalam hal ini pemerintah setempat) untuk menjalankan fungsinya. Dalam konteks program lorong wisata, ketergantungan institusional ini menyebabkan dewan lorong tidak dapat mengoptimalkan potensi yang ada di dalam lorongnya karena selalu menunggu arahan dari pemerintah setempat, alih-alih mengambil inisiatif sendiri untuk mengembangkan program lorong wisata. Berikut penjelasan lebih rinci:

- a) Kurangnya Inisiatif dan Inovasi: Dewan lorong cenderung pasif dan tidak mengambil tindakan proaktif dalam mengembangkan program lorong wisata. Alhasil inovasi program lorong wisata yang ada di dalam lorong mereka hanya terbatas pada program yang berasal dari atas (top-up), namun mereka belum mampu membuat program sendiri dengan mengembangkan potensi lorong yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat di dalam lorongnya. Sehingga inovasi dan terobosan baru dalam program lorong wisata melalui pemanfaatan potensi lokal lorong belum mampu terealisasi dan inovasi program lorong wisata menjadi terbatas.
- b) Menunggu Arahan: Dewan lorong cenderung selalu menunggu instruksi atau panduan/arahan dari pemerintah setempat sebelum melakukan kegiatan apapun di dalam lorong mereka. Hal ini berakibat pada stagnasi program lorong wisata, mengingat pemerintah tidak setiap saat melakukan kunjungan ataupun koordinir pada setiap lorong wisata.

- c) Keterbatasan Pengambilan Keputusan: Karena selalu menunggu arahan/panduan/instruksi dari atas sehingga dewan lorong merasa tidak memiliki wewenang atau kemampuan untuk membuat keputusan secara mandiri. Padahal dalam menjalankan tupoksinya secara fungsional, dewan lorong sebagai Badan Khusus yang dibentuk untuk mengakomodir dan mengawasi jalannya program lorong wisata di tingkat bawah, sehingga pengambilan keputusan terkait program lorong wisata juga berhak dilakukan oleh dewan lorong atas persetujuan dari berbagai pihak terkait.
- d) Ketidakefektifan Fungsi: Ketidakefektifan fungsi dewan lorong ini pada akhirnya menyebabkan program lorong wisata kehilangan 'roh' lokalnya. Program yang seharusnya menjadi wadah pemberdayaan dan pengembangan masyarakat lorong menjadi kurang bermakna dan sulit berkembang sesuai potensinya. Hal ini menyebabkan hilangnya kontinuitas program dikarenakan pengawasan dan evaluasi rutin dari dewan lorong sebagai badan khusus penanggungjawab di tingkat lokal tidak optimal, sehingga program cenderung berjalan sporadis dan tidak berkelanjutan. Disamping itu, peran dewan lorong sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat, pemerintah dan pihak terkait menjadi kurang efektif sehingga dapat terjadi kesenjangan informasi dan miskomunikasi yang menghambat program lorong wisata. Hal ini juga berakibat pada penurunan partisipasi masyarakat, sebab tanpa dorongan dan fasilitas dari dewan lorong, antusiasme masyarakat lorong untuk terlibat di dalam program lorong wisata menjadi menurun. Karena pada dasarnya sama seperti dewan lorong, masyarakat di dalam lorong sebagai subjek utama program lorong wisata sangat tergantung dari arahan dari atas.
- e) Lambatnya Respons: Ketergantungan ini menyebabkan lambatnya respons terhadap peluang atau tantangan yang muncul di lapangan. Respons terhadap peluang yang ada di dalam lorong sebagai potensi dalam program lorong wisata gagal dialokasikan dan dimanfaatkan dengan baik. Disamping itu, tantangan yang muncul di dalam masyarakat lorong belum mampu untuk ditengahi dengan baik, sehingga tidak memunculkan solusi konkret dan solutif yang dapat diterapkan oleh masyarakat lorong, terutama pada masalah modal.

- f) Kurang Pemberdayaan: Anggota dewan lorong tidak merasa diberdayakan untuk mengambil inisiatif atau mengembangkan program secara mandiri. Kurangnya pemberdayaan ini menyebabkan dewan lorong juga stagnan dalam bertindak pada program lorong wisata.

Ketergantungan institusional ini dapat menghambat perkembangan program lorong wisata karena dewan lorong, yang seharusnya menjadi penggerak utama di tingkat lokal, tidak dapat memaksimalkan fungsi dan perannya dalam mengembangkan dan mempromosikan potensi yang ada di dalam lorongnya. Tidak berfungsinya dewan lorong secara optimal, motor penggerak utama di tingkat lokal menjadi lemah. Akibatnya, berbagai aspek penting dalam pengembangan program lorong wisata terabaikan, menyebabkan program tidak dapat berkembang sesuai dengan potensinya.

Disamping itu, ketergantungan institusional dewan lorong terhadap pemerintah di atas (top-up) cenderung berkenaan dengan kurangnya modal yang diberikan oleh pemerintah dan/ataupun pihak terkait dalam pengembangan program lorong wisata. Sehingga dewan lorong juga tidak dapat mengambil tindakan apapun dalam upaya pengembangan program lorong wisata. Kendala utama yang juga menjadikan dewan lorong secara struktural ada tetapi perannya tidak nampak secara fungsional dikarenakan tidak adanya insentif dari pemerintah sebagai stimulus dewan lorong untuk efektif menjalankan fungsi dan perannya sebagai motor penggerak di tingkat lokal dalam program lorong wisata. Karena selama ini, fungsi dan peran yang dijalankan oleh dewan lorong dihitung sebatas pengabdian kepada masyarakat tanpa adanya *reward* yang diberikan kepada mereka.

2. Bentuk Kebijakan Aplikatif dalam Mewujudkan Penguatan Resiliensi Sosial Pada Masyarakat Lorong Wisata di Kota Makassar

Penguatan resiliensi sosial pada masyarakat Lorong Wisata di Kota Makassar memerlukan serangkaian kebijakan aplikatif yang komprehensif dan terintegrasi. Langkah awal yang krusial adalah implementasi program pengembangan kapasitas masyarakat, yang berfokus pada peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan adaptasi penduduk lokal. Program ini dapat mencakup pelatihan kewirausahaan, manajemen pariwisata, dan pelestarian budaya lokal. Bersamaan dengan itu, diperlukan kebijakan perlindungan sosial dan ekonomi yang menjamin kesejahteraan masyarakat di

tengah perkembangan sektor pariwisata, seperti jaminan kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Selanjutnya, pengembangan regulasi pengelolaan Lorong Wisata berbasis masyarakat menjadi kunci dalam memastikan partisipasi aktif dan manfaat langsung bagi penduduk setempat. Kebijakan ini harus memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Lorong Wisata, serta menjamin distribusi keuntungan yang adil. Untuk mendorong inovasi dan kreativitas lokal, pemerintah perlu menerapkan kebijakan insentif yang mendukung pengembangan produk dan layanan wisata unik berbasis kearifan lokal. Hal ini dapat berupa bantuan modal, pendampingan usaha, atau kemudahan perizinan bagi usaha-usaha kreatif yang mendukung daya tarik Lorong Wisata.

kebijakan pelestarian budaya dan lingkungan harus menjadi landasan dalam setiap aspek pengembangan Lorong Wisata. Hal ini mencakup regulasi yang melindungi warisan budaya, mendorong penggunaan bahasa dan seni tradisional dalam atraksi wisata, serta menjaga kelestarian lingkungan lorong. Kebijakan ini tidak hanya akan memperkuat identitas kultural masyarakat, tetapi juga menjamin keberlanjutan daya tarik Lorong Wisata dalam jangka panjang. Dengan penerapan serangkaian kebijakan aplikatif ini secara holistik, diharapkan resiliensi sosial masyarakat Lorong Wisata di Kota Makassar dapat terpelihara dan bahkan meningkat, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang muncul dari perkembangan sektor pariwisata. Berikut uraian lebih lanjut:

1. Penataan dan Revitalisasi Lingkungan Lorong Wisata

Penataan dan Revitalisasi Lingkungan merupakan langkah fundamental dalam upaya memperkuat resiliensi sosial masyarakat Lorong Wisata di Kota Makassar. Hasil penelitian yang menempatkan aspek ini sebagai prioritas utama mencerminkan pentingnya perbaikan kondisi fisik dan infrastruktur sebagai landasan pengembangan wisata berkelanjutan.

Konsep ini meliputi serangkaian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, baik dari segi estetika maupun fungsionalitas. Hal ini mencakup perbaikan fasad bangunan, penataan ruang publik, pengembangan sistem sanitasi yang baik, serta penghijauan area lorong. Selain

itu, revitalisasi juga melibatkan upaya pelestarian elemen-elemen budaya dan sejarah yang menjadi ciri khas lorong tersebut.

Dengan mengedepankan penataan dan revitalisasi lingkungan, diharapkan dapat tercipta suasana yang nyaman dan menarik, tidak hanya bagi wisatawan tetapi juga bagi penduduk setempat. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan rasa memiliki dan kebanggaan masyarakat terhadap lingkungan mereka, yang merupakan komponen penting dalam membangun resiliensi sosial. Lebih jauh, lingkungan yang tertata dengan baik dapat menjadi katalis bagi berbagai kegiatan ekonomi dan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat Lorong Wisata.

a) Perbaikan Infrastruktur Jalan, Drainase, dan Sanitasi di Lorong Wisata

Perbaikan infrastruktur jalan, drainase, dan sanitasi di lorong merupakan salah satu temuan kunci dalam penelitian tentang penguatan resiliensi sosial masyarakat Lorong Wisata di Kota Makassar. Aspek ini menjadi fondasi penting dalam upaya revitalisasi dan pengembangan kawasan wisata berbasis masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga secara langsung berdampak pada kualitas hidup penduduk setempat.

Dalam konteks perbaikan jalan, penelitian mengungkapkan bahwa kondisi permukaan jalan yang rata dan bebas dari kerusakan sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas. Lorong-lorong yang sebelumnya sulit dilalui kendaraan atau pejalan kaki, setelah diperbaiki, menjadi lebih mudah diakses. Hal ini tidak hanya memudahkan mobilitas penduduk sehari-hari tetapi juga membuka peluang bagi lebih banyak wisatawan untuk menjelajahi area tersebut. Perbaikan jalan juga mencakup penataan pola paving yang estetik, yang berkontribusi pada peningkatan daya tarik visual lorong.

Sistem drainase yang efektif terbukti menjadi elemen krusial dalam mengatasi permasalahan banjir dan genangan air yang sering terjadi di lorong-lorong sempit. Penelitian menunjukkan bahwa perbaikan dan pemeliharaan saluran drainase secara signifikan mengurangi risiko banjir selama musim hujan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan penduduk dan wisatawan, tetapi juga mencegah kerusakan infrastruktur dan properti yang sering terjadi akibat genangan air.

Aspek sanitasi menjadi fokus penting lainnya dalam temuan penelitian. Perbaikan fasilitas sanitasi, termasuk sistem pembuangan air limbah dan

pengelolaan sampah, terbukti memiliki dampak langsung pada kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan. Implementasi sistem pengolahan air limbah skala komunitas dan program pengelolaan sampah terpadu berhasil mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lorong.

Penelitian juga mengungkapkan bahwa perbaikan infrastruktur ini memiliki efek multiplier pada ekonomi lokal. Dengan akses yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih, banyak penduduk lorong yang termotivasi untuk membuka usaha kecil, seperti warung makanan atau toko cinderamata. Hal ini menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi mereka.

Dari segi sosial, perbaikan infrastruktur terbukti meningkatkan interaksi dan kohesi sosial di antara penduduk lorong. Ruang-ruang publik yang lebih nyaman dan terawat menjadi tempat berkumpul dan bersosialisasi bagi warga. Ini memperkuat ikatan komunitas dan rasa memiliki terhadap lingkungan mereka, yang merupakan komponen penting dalam membangun resiliensi sosial.

Aspek keamanan juga mengalami peningkatan signifikan sebagai hasil dari perbaikan infrastruktur. Jalan-jalan yang lebih terang dan lebih mudah diakses mengurangi potensi tindak kejahatan dan meningkatkan rasa aman bagi penduduk dan pengunjung. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup penduduk tetapi juga memperkuat citra positif Lorong Wisata di mata wisatawan.

Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa proses perbaikan infrastruktur yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap fasilitas yang ada.

Dari segi keberlanjutan, penelitian menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang dalam pemeliharaan infrastruktur. Program-program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat dalam hal pemeliharaan infrastruktur terbukti efektif dalam menjaga keberlanjutan perbaikan yang telah dilakukan. Ini menciptakan model pengelolaan infrastruktur berbasis masyarakat yang dapat menjadi contoh bagi pengembangan kawasan wisata serupa di tempat lain.

Penelitian tentang perbaikan infrastruktur jalan, drainase, dan sanitasi di Lorong Wisata Kota Makassar telah mengungkapkan dampak positif yang signifikan. Namun, studi ini juga mengidentifikasi sejumlah aspek yang masih memerlukan peningkatan untuk mengoptimalkan manfaat dan menjamin keberlanjutan program ini.

Salah satu area utama yang perlu ditingkatkan adalah integrasi teknologi smart city dalam pengelolaan infrastruktur. Penggunaan sensor untuk pemantauan kualitas lingkungan dan sistem peringatan dini banjir dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan secara dramatis. Bersamaan dengan itu, pengembangan infrastruktur yang lebih ramah terhadap penyandang disabilitas menjadi prioritas untuk memastikan inklusivitas Lorong Wisata. Aspek efisiensi energi juga perlu mendapat perhatian lebih, dengan penerapan teknologi hemat energi seperti lampu LED dan panel surya untuk penerangan jalan dan fasilitas umum.

Meskipun telah ada perbaikan dalam sistem pengelolaan sampah, optimalisasi lebih lanjut diperlukan, terutama dalam hal pemilahan dan daur ulang. Program edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah berkelanjutan perlu diperkuat untuk mendukung upaya ini. Pengembangan infrastruktur digital, seperti penyediaan akses internet gratis di area publik dan aplikasi mobile untuk informasi wisata, dapat meningkatkan daya tarik dan aksesibilitas Lorong Wisata secara signifikan.

Mengingat tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, desain infrastruktur yang lebih tahan terhadap dampak iklim ekstrem menjadi keharusan. Hal ini mencakup antisipasi terhadap peningkatan frekuensi cuaca ekstrem dan potensi kenaikan permukaan air laut. Sejalan dengan itu, peningkatan partisipasi perempuan dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur perlu didorong untuk memastikan representasi kebutuhan semua kelompok masyarakat.

Untuk memastikan efektivitas perbaikan infrastruktur, diperlukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih komprehensif. Sistem ini akan membantu dalam memantau dampak perbaikan terhadap masyarakat dan sektor pariwisata secara berkelanjutan. Penguatan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga menjadi kunci dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur yang berkelanjutan.

Terakhir, program pelatihan berkelanjutan bagi masyarakat lokal dalam hal pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur perlu dikembangkan. Ini akan memastikan bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk menjaga dan mengoptimalkan infrastruktur yang telah diperbaiki dalam jangka panjang.

Dengan meningkatkan aspek-aspek ini, diharapkan program perbaikan infrastruktur dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya akan memperkuat daya tarik wisata Lorong Wisata di Kota Makassar, tetapi juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat dan memperkuat resiliensi sosial komunitas secara keseluruhan. Pendekatan holistik ini akan memastikan bahwa Lorong Wisata tidak hanya menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan, tetapi juga tempat yang nyaman dan berkelanjutan bagi penduduknya untuk tinggal dan berkembang.

Akhirnya, penelitian menyimpulkan bahwa perbaikan infrastruktur jalan, drainase, dan sanitasi bukan hanya tentang peningkatan fisik semata, tetapi merupakan katalis bagi transformasi sosial-ekonomi yang lebih luas. Hal ini memperkuat basis untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan sosial penduduk Lorong Wisata di Kota Makassar.

b) Penataan Tata Ruang dan Estetika Lorong untuk Meningkatkan Daya Tarik Wisata

Penataan tata ruang dan estetika lorong untuk meningkatkan daya tarik wisata merupakan aspek krusial dalam pengembangan Lorong Wisata di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan yang tepat tidak hanya meningkatkan nilai estetika, tetapi juga berdampak signifikan pada pengalaman wisatawan dan kualitas hidup penduduk setempat.

Studi ini mengungkapkan bahwa pendekatan holistik dalam penataan tata ruang lorong sangat penting. Ini melibatkan harmonisasi antara elemen-elemen arsitektur tradisional Makassar dengan desain modern yang fungsional. Penelitian menunjukkan bahwa lorong-lorong yang berhasil memadukan unsur-unsur budaya lokal dalam desainnya, seperti penggunaan motif-motif khas Sulawesi Selatan pada fasad bangunan atau pemanfaatan material lokal, memiliki daya tarik wisata yang lebih tinggi.

Aspek penting lainnya yang terungkap adalah peran ruang publik dalam meningkatkan interaksi sosial dan aktivitas ekonomi. Penciptaan area-area

komunal seperti taman kecil, gazebo, atau ruang serbaguna di beberapa titik strategis lorong terbukti meningkatkan kohesi sosial masyarakat dan menyediakan tempat bagi wisatawan untuk beristirahat dan berinteraksi dengan penduduk lokal. Ruang-ruang ini juga sering menjadi pusat kegiatan ekonomi mikro, seperti penjualan makanan tradisional atau produk kerajinan lokal.

Penelitian juga menekankan pentingnya konsistensi dalam tema visual lorong. Lorong-lorong yang memiliki tema visual yang kuat dan konsisten, baik melalui penggunaan warna, mural, atau elemen dekoratif lainnya, cenderung lebih mudah diingat dan menarik bagi wisatawan. Namun, penting untuk memastikan bahwa tema ini tetap autentik dan mencerminkan identitas lokal Makassar.

Penataan pencahayaan menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini. Pencahayaan yang tepat tidak hanya meningkatkan keamanan lorong di malam hari, tetapi juga menciptakan suasana yang menarik dan fotogenik. Penggunaan lampu hias atau instalasi cahaya artistik di beberapa titik strategis terbukti menjadi daya tarik tersendiri, terutama untuk wisata malam.

Aspek kebersihan dan penghijauan juga mendapat sorotan khusus. Lorong-lorong yang bersih dan memiliki elemen hijau seperti tanaman gantung, vertikal garden, atau pot-pot bunga di sepanjang jalan, dinilai jauh lebih menarik oleh wisatawan. Selain meningkatkan estetika, penghijauan juga berkontribusi pada perbaikan kualitas udara dan menciptakan iklim mikro yang lebih nyaman.

Penelitian mengungkapkan bahwa penataan signage dan wayfinding yang efektif sangat penting dalam meningkatkan pengalaman wisatawan. Sistem penunjuk arah yang jelas dan informatif, disertai dengan peta atau kode QR yang menghubungkan ke informasi digital, membantu wisatawan menjelajahi lorong dengan lebih mudah dan memperkaya pengalaman mereka dengan informasi tentang sejarah dan budaya setempat.

Studi ini juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penataan ruang. Lorong-lorong yang dapat dengan mudah diubah tata letaknya untuk mengakomodasi berbagai acara atau festival musiman terbukti lebih dinamis dan menarik bagi wisatawan sepanjang tahun. Hal ini juga memberi kesempatan bagi masyarakat lokal untuk terus berinovasi dalam menciptakan atraksi baru.

Aspek aksesibilitas juga menjadi perhatian dalam penelitian ini. Penataan yang mempertimbangkan kebutuhan berbagai kelompok, termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia, terbukti meningkatkan inklusivitas dan daya

tarik lorong bagi spektrum wisatawan yang lebih luas. Ini meliputi penyediaan ramp, jalur pedestrian yang nyaman, dan area istirahat yang memadai.

Akhirnya, penelitian menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penataan. Lorong-lorong yang dirancang dengan partisipasi aktif penduduk setempat cenderung memiliki karakter yang lebih kuat dan autentik. Selain itu, keterlibatan ini juga meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap lorong, yang berujung pada pemeliharaan yang lebih baik dan keberlanjutan jangka panjang. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya menghasilkan desain yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan identitas komunitas, yang pada gilirannya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang mencari pengalaman budaya yang autentik. Meskipun penataan tata ruang dan estetika lorong di Kota Makassar telah menunjukkan hasil yang positif, penelitian juga mengidentifikasi beberapa area yang masih memerlukan peningkatan untuk memaksimalkan potensi Lorong Wisata.

Salah satu aspek utama yang perlu ditingkatkan adalah integrasi teknologi digital dalam penataan ruang. Pengembangan augmented reality (AR) untuk memberikan pengalaman wisata yang lebih interaktif, misalnya, bisa menjadi terobosan menarik. Wisatawan dapat menggunakan smartphone mereka untuk melihat informasi tambahan atau visualisasi sejarah lorong saat menjelajahi area tersebut. Selain itu, pemasangan hotspot Wi-Fi gratis di titik-titik strategis dapat meningkatkan konektivitas dan memudahkan wisatawan untuk berbagi pengalaman mereka secara real-time, sekaligus membantu promosi lorong melalui media sosial.

Aspek keberlanjutan lingkungan juga perlu mendapat perhatian lebih. Penggunaan material ramah lingkungan dalam penataan lorong, implementasi sistem manajemen air hujan yang lebih efisien, dan peningkatan efisiensi energi melalui penggunaan lampu LED dan panel surya dapat menjadikan Lorong Wisata sebagai model eco-tourism urban. Ini tidak hanya akan meningkatkan daya tarik bagi wisatawan yang sadar lingkungan, tetapi juga berkontribusi pada upaya kota dalam mengatasi perubahan iklim.

Diversifikasi atraksi wisata di lorong juga menjadi area yang perlu dikembangkan. Penciptaan ruang-ruang untuk pertunjukan seni jalanan, galeri mini untuk seniman lokal, atau area untuk workshop kerajinan tradisional dapat memperkaya pengalaman wisatawan dan menciptakan lebih banyak peluang

ekonomi bagi penduduk setempat. Pengembangan ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan kehidupan sehari-hari penduduk lorong.

Peningkatan aksesibilitas informasi juga menjadi prioritas. Pengembangan aplikasi mobile khusus untuk Lorong Wisata yang menyediakan peta interaktif, informasi tentang atraksi dan event, serta ulasan pengunjung dapat sangat membantu dalam meningkatkan pengalaman wisatawan. Aplikasi semacam ini juga bisa menjadi platform untuk melibatkan komunitas lokal dalam berbagi cerita dan sejarah lorong mereka.

Terakhir, penelitian menunjukkan perlunya pengembangan program pelestarian dan revitalisasi yang lebih terstruktur. Ini mencakup pelatihan bagi penduduk lokal dalam teknik konservasi bangunan bersejarah, program mentor untuk pengusaha muda dalam pengembangan bisnis berbasis budaya, serta inisiatif untuk mendokumentasikan dan melestarikan cerita dan tradisi lokal. Program-program ini tidak hanya akan membantu menjaga autentisitas lorong, tetapi juga memperkuat keterlibatan dan rasa memiliki masyarakat terhadap proyek Lorong Wisata.

Dengan meningkatkan aspek-aspek ini, Lorong Wisata di Kota Makassar berpotensi untuk berkembang menjadi destinasi wisata urban yang unik, berkelanjutan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat lokal. Pendekatan holistik ini akan memastikan bahwa penataan tata ruang dan estetika tidak hanya meningkatkan daya tarik visual, tetapi juga memperkuat fondasi sosial, ekonomi, dan budaya yang menopang keberhasilan jangka panjang inisiatif Lorong Wisata.

c) Program penghijauan dan Penanaman Tanaman Hias di Sepanjang Lorong Wisata

Program penghijauan dan penanaman tanaman hias di sepanjang lorong Wisata Kota Makassar telah menjadi salah satu inisiatif yang paling signifikan dalam upaya revitalisasi dan peningkatan daya tarik wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berhasil mentransformasi estetika visual lorong, tetapi juga membawa berbagai manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat setempat.

Studi ini mengungkapkan bahwa pemilihan jenis tanaman yang tepat menjadi kunci keberhasilan program. Kombinasi antara tanaman hias lokal dan

tanaman yang adaptif terhadap lingkungan perkotaan terbukti paling efektif. Tanaman-tanaman seperti bougenvillea, puring, dan berbagai jenis anggrek lokal tidak hanya menambah keindahan visual tetapi juga menciptakan identitas unik bagi setiap lorong. Penggunaan tanaman vertikal dan hanging garden menjadi solusi cerdas untuk memaksimalkan ruang terbatas di lorong-lorong sempit.

Penelitian juga menemukan bahwa program penghijauan ini memiliki dampak positif pada iklim mikro lorong. Peningkatan jumlah tanaman secara signifikan menurunkan suhu udara di sekitar lorong, menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi penduduk dan wisatawan. Selain itu, tanaman-tanaman ini juga berperan dalam menyerap polutan udara, meningkatkan kualitas udara di area yang sebelumnya padat dan berpolusi.

Aspek partisipasi masyarakat dalam program ini mendapat sorotan khusus. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif penduduk lorong dalam perencanaan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Ini tidak hanya menjamin keberlanjutan program tetapi juga memperkuat kohesi sosial di antara warga. Kelompok-kelompok komunitas yang fokus pada penghijauan dan pertamanan muncul sebagai hasil dari inisiatif ini, menciptakan ruang baru untuk interaksi sosial dan pembelajaran bersama.

Dari perspektif ekonomi, program penghijauan ini membuka peluang baru bagi masyarakat. Beberapa penduduk lorong mulai mengembangkan usaha kecil terkait dengan tanaman hias, seperti penjualan bibit, pot bunga unik, atau jasa perawatan tanaman. Ini tidak hanya menciptakan sumber pendapatan tambahan tetapi juga menambah daya tarik lorong sebagai destinasi belanja tanaman hias bagi wisatawan.

Penelitian juga mengungkapkan dampak positif program ini terhadap keanekaragaman hayati urban. Peningkatan jumlah dan variasi tanaman di lorong menarik lebih banyak serangga penyerbuk dan burung-burung kecil, menciptakan ekosistem mini di tengah kota. Beberapa lorong bahkan berhasil mengembangkan 'taman kupu-kupu' kecil, menjadi atraksi unik bagi wisatawan dan sarana edukasi lingkungan bagi anak-anak.

Aspek inovasi dalam penghijauan juga menjadi temuan menarik. Beberapa lorong mengadopsi teknologi hidroponik dan aquaponik dalam sistem penghijauannya, menciptakan taman vertikal yang tidak hanya indah tetapi juga

produktif. Ini membuka peluang bagi pengembangan konsep 'urban farming' di lorong-lorong sempit, menggabungkan aspek estetika dengan ketahanan pangan komunitas.

Dari segi manajemen air, program penghijauan terbukti membantu dalam pengelolaan air hujan. Tanaman-tanaman ini berperan dalam menyerap dan memperlambat aliran air permukaan, mengurangi risiko genangan dan banjir kecil yang sebelumnya sering terjadi di lorong-lorong sempit. Beberapa lorong bahkan mengintegrasikan sistem penampungan air hujan dengan taman mereka, menciptakan model pengelolaan air yang berkelanjutan.

Penelitian juga menyoroti peran program penghijauan dalam pelestarian dan promosi tanaman lokal. Beberapa lorong fokus pada penanaman tanaman endemic Sulawesi Selatan, tidak hanya menciptakan daya tarik unik tetapi juga berkontribusi pada upaya konservasi. Ini menjadi sarana edukasi bagi wisatawan tentang kekayaan flora lokal dan pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati.

Terakhir, studi ini menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan dan perawatan jangka panjang. Program-program pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat dalam hal perawatan tanaman, pengendalian hama secara alami, dan teknik perbanyakan tanaman terbukti krusial untuk kesuksesan jangka panjang inisiatif ini. Pembentukan 'bank bibit' komunitas dan program pertukaran tanaman antar lorong juga muncul sebagai praktik inovatif yang mendukung keberlanjutan dan variasi tanaman di seluruh jaringan Lorong Wisata.

Meskipun program penghijauan dan penanaman tanaman hias di sepanjang Lorong Wisata Kota Makassar telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, penelitian juga mengidentifikasi beberapa area yang masih memerlukan peningkatan untuk memaksimalkan potensi dan keberlanjutan inisiatif ini.

Salah satu aspek utama yang perlu ditingkatkan adalah integrasi teknologi smart gardening. Pengembangan sistem irigasi otomatis yang terhubung dengan sensor kelembaban tanah dan prediksi cuaca dapat mengoptimalkan penggunaan air dan meringankan beban perawatan bagi masyarakat. Selain itu, implementasi aplikasi mobile untuk pemantauan kesehatan tanaman dan penjadwalan perawatan dapat membantu masyarakat dalam mengelola taman lorong mereka dengan lebih efisien.

Diversifikasi fungsi tanaman juga menjadi area yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Selain aspek estetika, penanaman tanaman obat tradisional atau tanaman pangan lokal dapat meningkatkan nilai guna taman lorong. Ini tidak hanya akan memperkaya pengalaman wisatawan dengan pengetahuan tentang kearifan lokal, tetapi juga dapat berkontribusi pada ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat setempat.

Aspek edukasi lingkungan perlu diperkuat melalui pengembangan program-program interaktif. Penciptaan 'lorong pembelajaran' dengan papan informasi interaktif atau QR code yang menghubungkan ke konten edukasi online tentang tanaman dan ekosistem lokal dapat meningkatkan nilai edukatif Lorong Wisata. Program tur botani atau workshop berkebun untuk wisatawan dan sekolah-sekolah lokal juga dapat dikembangkan untuk mempromosikan kesadaran lingkungan.

Peningkatan kolaborasi dengan institusi penelitian dan universitas lokal juga diperlukan untuk mendukung inovasi berkelanjutan. Kerjasama ini dapat fokus pada pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, teknik penghijauan urban yang lebih efisien, atau studi dampak penghijauan terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat perkotaan.

Aspek inklusivitas dalam desain taman lorong juga perlu mendapat perhatian lebih. Pengembangan taman sensorik yang ramah bagi penyandang disabilitas, atau area berkebun yang aksesibel bagi lansia dan anak-anak, dapat meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam program penghijauan ini.

Lebih lanjut, integrasi seni dalam penghijauan lorong dapat ditingkatkan. Kolaborasi dengan seniman lokal untuk menciptakan instalasi seni yang menggabungkan elemen tanaman hidup dapat menambah daya tarik unik Lorong Wisata. Ini tidak hanya akan meningkatkan nilai estetika tetapi juga menciptakan titik-titik instagramable yang dapat meningkatkan promosi lorong melalui media sosial.

Pengembangan sistem pengelolaan limbah organik dari perawatan tanaman juga menjadi area yang perlu ditingkatkan. Implementasi program komposting komunal atau biogas skala kecil dapat mengubah limbah tanaman menjadi sumber daya berharga, mendukung konsep ekonomi sirkular di tingkat lorong.

Terakhir, penguatan aspek resiliensi terhadap perubahan iklim dalam program penghijauan perlu menjadi fokus. Ini meliputi pemilihan spesies tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan atau banjir, serta pengembangan sistem drainase berkelanjutan yang terintegrasi dengan taman lorong untuk mengatasi potensi peningkatan curah hujan ekstrem di masa depan.

Dengan meningkatkan aspek-aspek ini, program penghijauan dan penanaman tanaman hias di Lorong Wisata Kota Makassar berpotensi untuk berkembang menjadi model penghijauan urban yang inovatif, edukatif, dan berkelanjutan. Pendekatan holistik ini tidak hanya akan meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga berkontribusi signifikan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan ketahanan lingkungan kota secara keseluruhan.

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lorong Wisata

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lorong Wisata merupakan aspek krusial dalam upaya memperkuat resiliensi sosial dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di kawasan Lorong Wisata Kota Makassar. Hasil penelitian mengenai topik ini mengungkapkan berbagai temuan penting yang menggambarkan potensi, tantangan, dan strategi efektif dalam mengembangkan ekonomi lokal berbasis pariwisata di kawasan lorong.

Studi ini menunjukkan bahwa transformasi lorong menjadi destinasi wisata telah membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Namun, realisasi potensi ini membutuhkan pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian mengidentifikasi beberapa elemen kunci dalam upaya pemberdayaan ini, termasuk pengembangan keterampilan wirausaha, akses terhadap modal usaha, diversifikasi produk dan layanan wisata, serta penguatan jaringan pemasaran.

Temuan penelitian juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai sosial budaya masyarakat lorong. Pemberdayaan ekonomi yang berhasil tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat identitas komunitas dan melestarikan warisan budaya lokal. Hal ini menjadi faktor penting dalam menciptakan daya tarik unik Lorong Wisata dan memastikan keberlanjutan jangka panjangnya.

Lebih lanjut, penelitian mengungkapkan bahwa kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan - termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga

pendidikan, dan komunitas lokal - memegang peran vital dalam keberhasilan upaya pemberdayaan ekonomi. Pendekatan partisipatif dan inklusif dalam perencanaan dan implementasi program pemberdayaan terbukti lebih efektif dalam menciptakan dampak positif yang berkelanjutan.

Dengan memahami hasil penelitian ini, kita dapat lebih baik dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pemberdayaan ekonomi yang efektif, adaptif, dan sesuai dengan konteks lokal Lorong Wisata di Kota Makassar. Pengantar ini membuka jalan untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai berbagai aspek spesifik dari pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan ini.

a) Pelatihan Kewirausahaan bagi Masyarakat Lorong Wisata

Penelitian mengenai pelatihan kewirausahaan bagi warga setempat di Lorong Wisata Kota Makassar telah mengungkapkan sejumlah temuan penting yang menggambarkan efektivitas dan dampak program ini terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Studi ini menunjukkan bahwa pelatihan kewirausahaan yang tepat sasaran dan kontekstual memainkan peran krusial dalam mentransformasi potensi ekonomi lorong menjadi realitas yang menguntungkan bagi penduduk setempat.

Salah satu temuan utama adalah pentingnya penyesuaian materi pelatihan dengan karakteristik dan potensi unik Lorong Wisata. Program yang berhasil tidak hanya mengajarkan prinsip-prinsip dasar kewirausahaan, tetapi juga fokus pada pengembangan usaha berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif yang relevan dengan konteks lorong. Ini mencakup pelatihan dalam bidang kuliner tradisional, kerajinan tangan lokal, jasa pemandu wisata lokal, dan pengelolaan homestay sederhana.

Penelitian juga mengungkapkan bahwa pendekatan pelatihan yang menggabungkan teori dengan praktik langsung terbukti paling efektif. Program-program yang menyertakan komponen 'learning by doing', seperti proyek mini atau magang di usaha-usaha yang sudah mapan, memberikan peserta pengalaman hands-on yang berharga. Ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka tentang aspek-aspek praktis menjalankan usaha, tetapi juga membangun kepercayaan diri untuk memulai usaha mereka sendiri.

Aspek mentoring dan pendampingan jangka panjang muncul sebagai faktor kunci keberhasilan program pelatihan. Penelitian menunjukkan bahwa peserta yang mendapatkan bimbingan berkelanjutan dari mentor berpengalaman,

baik dalam bentuk konsultasi rutin maupun coaching bisnis, memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam memulai dan mengembangkan usaha mereka. Sistem mentoring ini juga membantu dalam mengatasi tantangan-tantangan awal yang sering dihadapi oleh wirausahawan pemula.

Studi ini juga menyoroti pentingnya membangun jaringan dan kolaborasi antar peserta pelatihan. Program-program yang mendorong pembentukan kelompok usaha atau koperasi di antara peserta terbukti efektif dalam menciptakan ekosistem dukungan yang saling menguntungkan. Ini tidak hanya membantu dalam berbagi sumber daya dan pengetahuan, tetapi juga menciptakan sinergi dalam pengembangan produk dan pemasaran.

Penelitian mengungkapkan bahwa pelatihan yang berhasil juga mencakup komponen literasi keuangan dan manajemen usaha kecil. Peserta yang dibekali dengan keterampilan dasar dalam pembukuan, pengelolaan arus kas, dan perencanaan keuangan sederhana menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan.

Aspek inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk dan layanan wisata juga mendapat perhatian khusus dalam penelitian ini. Program pelatihan yang mendorong peserta untuk mengeksplorasi dan mengembangkan ide-ide kreatif berbasis kearifan lokal terbukti menghasilkan usaha-usaha yang lebih unik dan berdaya saing. Ini termasuk pengembangan souvenir khas lorong, paket wisata experiential yang melibatkan wisatawan dalam aktivitas budaya lokal, atau inovasi dalam penyajian kuliner tradisional.

Studi ini juga menggarisbawahi pentingnya integrasi teknologi digital dalam materi pelatihan. Peserta yang dibekali dengan keterampilan dasar dalam pemasaran digital, penggunaan media sosial untuk promosi usaha, dan platform e-commerce sederhana menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam menjangkau pasar yang lebih luas dan beradaptasi dengan tren pariwisata modern.

Penelitian juga menemukan bahwa program pelatihan yang berhasil tidak hanya fokus pada aspek teknis kewirausahaan, tetapi juga menekankan pentingnya etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Peserta yang memahami konsep-konsep ini cenderung mengembangkan usaha yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi positif terhadap komunitas dan lingkungan Lorong Wisata.

Terakhir, penelitian menekankan pentingnya evaluasi dan tindak lanjut pasca pelatihan. Program-program yang melakukan pemantauan berkala terhadap perkembangan usaha peserta dan menyediakan dukungan lanjutan sesuai kebutuhan menunjukkan tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi. Ini termasuk fasilitasi akses ke sumber pembiayaan, bantuan dalam pengembangan jaringan pemasaran, atau pelatihan lanjutan untuk meningkatkan keterampilan spesifik.

Meskipun pelatihan kewirausahaan bagi warga setempat di Lorong Wisata Kota Makassar telah menunjukkan hasil yang positif, penelitian juga mengidentifikasi beberapa area yang masih memerlukan peningkatan dan perbaikan untuk memaksimalkan dampak dan efektivitas program ini.

Salah satu aspek utama yang perlu ditingkatkan adalah customisasi program pelatihan berdasarkan tingkat pendidikan dan pengalaman peserta. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan "one-size-fits-all" kurang efektif mengingat keragaman latar belakang warga lorong. Pengembangan modul pelatihan bertingkat, mulai dari tingkat dasar hingga lanjutan, dapat memastikan bahwa setiap peserta mendapatkan materi yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas mereka.

Integrasi teknologi dalam proses pembelajaran juga perlu diperkuat. Penggunaan platform e-learning atau aplikasi mobile untuk menyampaikan sebagian materi pelatihan dapat meningkatkan fleksibilitas dan aksesibilitas program, terutama bagi peserta yang memiliki keterbatasan waktu karena pekerjaan atau tanggung jawab keluarga. Selain itu, pemanfaatan simulasi bisnis berbasis teknologi dapat memberikan pengalaman praktis yang lebih realistis kepada peserta.

Aspek keberlanjutan lingkungan dalam materi pelatihan kewirausahaan perlu mendapat penekanan lebih. Mengingat tren global menuju pariwisata berkelanjutan, program pelatihan perlu memasukkan modul khusus tentang praktik bisnis ramah lingkungan, manajemen limbah, dan pengembangan produk eco-friendly. Ini akan membantu wirausahawan lokal untuk menciptakan usaha yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan Lorong Wisata.

Penelitian juga menunjukkan perlunya peningkatan dalam hal pelatihan soft skills, terutama yang berkaitan dengan pelayanan pelanggan dan komunikasi

lintas budaya. Mengingat interaksi dengan wisatawan dari berbagai latar belakang adalah aspek kunci dalam usaha berbasis pariwisata, pengembangan keterampilan ini akan sangat bermanfaat bagi kesuksesan usaha di Lorong Wisata.

Kolaborasi yang lebih erat dengan sektor swasta, terutama perusahaan besar di industri pariwisata, perlu ditingkatkan. Program magang atau kunjungan studi ke perusahaan-perusahaan ini dapat memberikan wawasan berharga bagi peserta tentang standar industri dan praktik terbaik dalam pengelolaan usaha pariwisata. Selain itu, kemitraan ini juga dapat membuka peluang untuk program mentoring oleh praktisi berpengalaman dari industri.

Aspek inklusivitas dalam program pelatihan juga perlu diperkuat. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa kelompok, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan pemuda, masih menghadapi hambatan dalam partisipasi penuh. Pengembangan program khusus yang ditargetkan pada kelompok-kelompok ini, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti penitipan anak selama pelatihan, dapat meningkatkan inklusivitas dan dampak program secara keseluruhan.

Peningkatan fokus pada pengembangan usaha berbasis digital juga diperlukan. Dengan pertumbuhan pesat ekonomi digital, pelatihan tentang e-commerce, pemasaran digital, dan pengembangan konten online menjadi semakin penting. Ini akan membantu wirausahawan lokal untuk memperluas jangkauan pasar mereka dan beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen di era digital.

Aspek monitoring dan evaluasi jangka panjang perlu ditingkatkan. Pengembangan sistem pemantauan yang lebih komprehensif, termasuk penggunaan indikator kinerja kunci (KPI) yang jelas, akan membantu dalam mengukur dampak program secara lebih akurat dan mengidentifikasi area untuk perbaikan berkelanjutan.

Terakhir, penelitian menunjukkan perlunya peningkatan dalam hal fasilitasi akses ke sumber pembiayaan. Meskipun pelatihan kewirausahaan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, banyak peserta masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan modal awal untuk memulai usaha. Pengembangan kemitraan dengan lembaga keuangan mikro atau program pinjaman khusus untuk wirausahawan Lorong Wisata dapat membantu mengatasi tantangan ini.

Dengan meningkatkan aspek-aspek ini, program pelatihan kewirausahaan di Lorong Wisata Kota Makassar berpotensi untuk memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Perbaikan dan peningkatan ini akan membantu menciptakan ekosistem kewirausahaan yang lebih kuat dan adaptif, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan memperkuat daya tarik Lorong Wisata sebagai destinasi pariwisata yang unik dan berkelanjutan.

b) Bantuan Modal Usaha Mikro untuk Mengembangkan Produk Khas Lorong Wisata

Penelitian mengenai bantuan peralatan usaha mikro untuk mengembangkan produk khas Lorong Wisata di Kota Makassar telah mengungkapkan sejumlah temuan penting yang menggambarkan dampak signifikan dari inisiatif ini terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan pariwisata lokal. Studi ini menunjukkan bahwa penyediaan peralatan yang tepat dapat menjadi katalis kuat dalam mendorong inovasi produk dan peningkatan kualitas usaha mikro di kawasan lorong.

Salah satu temuan utama adalah bahwa bantuan peralatan yang disesuaikan dengan potensi khas setiap lorong terbukti paling efektif. Misalnya, lorong yang dikenal dengan kuliner tradisionalnya mendapat manfaat besar dari peralatan pengolahan makanan modern, sementara lorong dengan potensi kerajinan tangan berkembang pesat dengan adanya alat-alat produksi yang lebih canggih. Pendekatan yang disesuaikan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga membantu dalam menciptakan identitas produk yang unik untuk setiap lorong.

Penelitian juga mengungkapkan bahwa bantuan peralatan yang disertai dengan pelatihan penggunaan dan pemeliharaan yang tepat memiliki tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi. Program yang melibatkan sesi pelatihan intensif tentang cara mengoperasikan dan merawat peralatan baru menghasilkan tingkat adopsi dan keberlanjutan penggunaan yang lebih baik. Ini tidak hanya memastikan pemanfaatan optimal peralatan tetapi juga memperpanjang umur pakai alat, memberikan nilai lebih pada investasi bantuan.

Aspek inovasi produk menjadi sorotan penting dalam penelitian ini. Bantuan peralatan terbukti menjadi pemicu kreativitas di kalangan pengusaha mikro. Dengan akses ke teknologi dan alat yang lebih maju, banyak pengusaha yang mampu mengembangkan varian baru dari produk tradisional atau menciptakan

produk inovatif yang menggabungkan elemen modern dengan kearifan lokal. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk lorong di pasar wisata tetapi juga memperkaya pengalaman wisatawan dengan keunikan produk yang ditawarkan.

Studi ini juga menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam pemberian bantuan peralatan. Program yang paling sukses adalah yang mengintegrasikan bantuan peralatan dengan dukungan lain seperti pelatihan pemasaran, bantuan pengemasan, dan fasilitasi akses pasar. Pendekatan terpadu ini memastikan bahwa peningkatan kapasitas produksi yang dihasilkan dari peralatan baru dapat diimbangi dengan peningkatan kemampuan memasarkan dan menjual produk.

Penelitian mengungkapkan bahwa bantuan peralatan memiliki efek multiplier pada ekonomi lorong. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi tidak hanya menguntungkan penerima bantuan langsung tetapi juga menciptakan peluang kerja baru bagi warga lain di lorong. Misalnya, peningkatan produksi kerajinan tangan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk proses finishing atau pengemasan, sementara pertumbuhan usaha kuliner mendorong munculnya layanan pengiriman lokal.

Aspek keberlanjutan lingkungan juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Program bantuan yang memprioritaskan peralatan ramah lingkungan atau teknologi hemat energi tidak hanya membantu mengurangi biaya operasional usaha mikro tetapi juga berkontribusi pada citra Lorong Wisata sebagai destinasi eco-friendly. Ini sejalan dengan tren global pariwisata berkelanjutan dan meningkatkan daya tarik lorong bagi wisatawan yang sadar lingkungan.

Studi ini juga menggarisbawahi peran penting kolaborasi dalam keberhasilan program bantuan peralatan. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal dalam merancang dan mengimplementasikan program bantuan terbukti menghasilkan dampak yang lebih berkelanjutan. Keterlibatan aktif komunitas dalam proses seleksi penerima bantuan dan jenis peralatan yang dibutuhkan meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen terhadap program.

Penelitian juga mengungkapkan bahwa bantuan peralatan berperan penting dalam standarisasi kualitas produk Lorong Wisata. Dengan akses ke peralatan yang lebih baik, pengusaha mikro dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih konsisten, yang penting untuk membangun reputasi dan kepercayaan konsumen. Ini juga memfasilitasi upaya branding produk lorong sebagai produk premium atau produk dengan nilai budaya tinggi.

Terakhir, studi ini menekankan pentingnya sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Program bantuan peralatan yang disertai dengan pemantauan reguler dan evaluasi dampak memungkinkan penyesuaian dan perbaikan berkelanjutan. Ini termasuk mengukur peningkatan pendapatan, diversifikasi produk, dan dampak sosial ekonomi yang lebih luas pada komunitas lorong. Data yang dikumpulkan juga berharga untuk merencanakan intervensi dan dukungan lanjutan yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang usaha mikro di Lorong Wisata.

Meskipun program bantuan peralatan usaha mikro untuk mengembangkan produk khas Lorong Wisata di Kota Makassar telah menunjukkan hasil yang positif, penelitian juga mengidentifikasi beberapa area yang masih memerlukan peningkatan dan perbaikan untuk memaksimalkan dampak dan keberlanjutan program ini.

Salah satu aspek utama yang perlu ditingkatkan adalah sistem penilaian kebutuhan yang lebih komprehensif sebelum pemberian bantuan. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa kasus ketidaksesuaian antara peralatan yang diberikan dengan kebutuhan aktual usaha mikro masih terjadi. Pengembangan metode asesmen yang lebih terstruktur, melibatkan analisis mendalam tentang potensi pasar dan kapasitas produksi yang dibutuhkan, dapat memastikan bahwa bantuan peralatan benar-benar sesuai dan bermanfaat optimal.

Aspek keberlanjutan dalam pemeliharaan dan penggantian peralatan juga perlu mendapat perhatian lebih. Program bantuan seringkali fokus pada pemberian peralatan awal tanpa mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang untuk pemeliharaan atau penggantian suku cadang. Pengembangan skema bantuan yang mencakup komponen dana pemeliharaan atau kemitraan dengan supplier peralatan untuk layanan purna jual jangka panjang dapat meningkatkan keberlanjutan program.

Penelitian juga mengungkapkan perlunya peningkatan dalam hal transfer teknologi dan pengembangan kapasitas lokal. Selain pelatihan penggunaan peralatan, program perlu diperluas untuk mencakup pelatihan tentang modifikasi dan adaptasi peralatan sesuai kebutuhan lokal. Ini akan mendorong inovasi lebih lanjut dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal dalam jangka panjang.

Integrasi teknologi digital dalam peralatan usaha mikro juga perlu ditingkatkan. Dengan perkembangan e-commerce dan pemasaran digital, bantuan peralatan perlu mencakup teknologi yang memungkinkan usaha mikro untuk terhubung dengan pasar online dan memanfaatkan platform digital untuk pemasaran produk mereka. Ini bisa termasuk perangkat untuk fotografi produk, peralatan untuk membuat konten digital, atau sistem manajemen inventori berbasis aplikasi.

Aspek kolaborasi antar penerima bantuan juga perlu diperkuat. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan individual dalam pemberian bantuan peralatan terkadang menciptakan kesenjangan atau persaingan yang tidak sehat antar usaha mikro. Pengembangan model bantuan yang mendorong kolaborasi, seperti fasilitas produksi bersama atau sistem berbagi peralatan, dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mendorong sinergi antar usaha mikro di lorong.

Peningkatan fokus pada standarisasi dan sertifikasi produk juga diperlukan. Meskipun bantuan peralatan telah meningkatkan kualitas produksi, masih ada kesenjangan dalam hal standarisasi produk, terutama untuk produk makanan dan minuman. Program bantuan perlu diperluas untuk mencakup peralatan dan pelatihan yang mendukung usaha mikro dalam memenuhi standar keamanan dan kualitas yang diperlukan untuk sertifikasi produk.

Aspek kesetaraan gender dalam distribusi bantuan peralatan juga perlu mendapat perhatian lebih. Penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, akses perempuan terhadap bantuan peralatan, terutama untuk teknologi yang lebih canggih, masih terbatas. Program perlu dikembangkan dengan perspektif gender yang lebih kuat untuk memastikan bahwa perempuan pengusaha memiliki akses yang setara terhadap peluang pengembangan usaha.

Peningkatan dalam hal pengukuran dampak jangka panjang juga diperlukan. Sistem monitoring dan evaluasi yang ada seringkali fokus pada indikator jangka pendek seperti peningkatan produksi atau pendapatan. Pengembangan metodologi yang dapat mengukur dampak lebih luas dan jangka panjang, seperti perubahan dalam struktur ekonomi lorong atau peningkatan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas, akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas program.

Terakhir, penelitian menunjukkan perlunya peningkatan dalam hal sinergi antara bantuan peralatan dengan program pengembangan pariwisata lorong secara keseluruhan. Bantuan peralatan perlu lebih terintegrasi dengan strategi branding dan pemasaran Lorong Wisata, memastikan bahwa peningkatan kapasitas produksi sejalan dengan upaya promosi dan pengembangan atraksi wisata di lorong.

Dengan meningkatkan aspek-aspek ini, program bantuan peralatan usaha mikro di Lorong Wisata Kota Makassar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan. Perbaikan dan peningkatan ini akan membantu menciptakan ekosistem usaha mikro yang lebih tangguh, inovatif, dan terintegrasi dengan visi pengembangan Lorong Wisata secara keseluruhan, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

c) Fasilitasi pemasaran produk lokal melalui kerjasama dengan pelaku wisata

Penelitian mengenai fasilitasi pemasaran produk lokal melalui kerjasama dengan pelaku wisata di Lorong Wisata Kota Makassar telah mengungkapkan temuan-temuan yang signifikan tentang efektivitas dan dampak strategi ini terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Studi ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang terstruktur antara produsen lokal dan pelaku industri pariwisata dapat menciptakan sinergi yang kuat, membuka peluang pasar baru, dan meningkatkan nilai ekonomi produk lokal.

Salah satu temuan utama adalah bahwa kerjasama dengan hotel dan restoran lokal menjadi pintu masuk yang efektif bagi produk lokal ke pasar wisata. Program yang memfasilitasi penggunaan bahan baku lokal oleh restoran hotel atau penyediaan produk kerajinan lokal sebagai dekorasi kamar hotel tidak hanya meningkatkan penjualan produk lokal tetapi juga memberikan exposure yang signifikan kepada wisatawan. Ini menciptakan efek multiplier di mana wisatawan yang terkesan dengan produk lokal cenderung membeli lebih banyak sebagai oleh-oleh atau bahkan melakukan pembelian ulang setelah kembali ke daerah asal mereka.

Penelitian juga mengungkapkan bahwa program pelatihan bersama antara produsen lokal dan pelaku wisata sangat efektif dalam meningkatkan kualitas dan relevansi produk lokal. Pelatihan ini membantu produsen lokal memahami standar dan ekspektasi industri pariwisata, sementara juga memberikan wawasan kepada pelaku wisata tentang nilai kultural dan proses produksi di balik produk lokal.

Hasilnya adalah pengembangan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar wisata tanpa mengorbankan keaslian dan nilai budaya produk.

Aspek branding dan storytelling menjadi komponen kunci dalam keberhasilan pemasaran produk lokal. Program yang membantu produsen lokal mengembangkan narasi menarik tentang produk mereka, termasuk asal-usul, proses produksi tradisional, dan nilai budaya yang terkandung, terbukti sangat efektif dalam meningkatkan daya tarik produk bagi wisatawan. Kolaborasi dengan agen perjalanan dan pemandu wisata dalam menyampaikan cerita ini kepada wisatawan selama tur atau aktivitas wisata meningkatkan minat dan apresiasi terhadap produk lokal.

Studi ini juga menyoroti pentingnya pengembangan jalur distribusi yang efisien. Kerjasama dengan operator tur dan transportasi wisata dalam mengintegrasikan kunjungan ke pusat produksi atau toko produk lokal ke dalam paket wisata terbukti sangat efektif. Ini tidak hanya meningkatkan akses wisatawan ke produk lokal tetapi juga menciptakan pengalaman wisata yang lebih kaya dan autentik.

Penelitian mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam pemasaran produk lokal melalui kerjasama dengan platform booking online dan aplikasi panduan wisata memberikan hasil yang menjanjikan. Program yang membantu produsen lokal memasarkan produk mereka melalui platform ini, termasuk fitur pre-order oleh-oleh atau reservasi pengalaman pembuatan kerajinan, memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan visibilitas produk lokal bahkan sebelum wisatawan tiba di destinasi.

Aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Kerjasama yang menekankan praktik produksi berkelanjutan dan fair trade terbukti meningkatkan daya tarik produk lokal, terutama di kalangan wisatawan yang sadar lingkungan dan sosial. Program sertifikasi produk lokal yang berkelanjutan, didukung oleh pelaku wisata dalam promosi mereka, menciptakan nilai tambah yang signifikan.

Studi ini juga menggarisbawahi peran penting event dan festival dalam mempromosikan produk lokal. Kolaborasi antara produsen lokal, pemerintah setempat, dan pelaku wisata dalam mengorganisir festival makanan lokal, pameran kerajinan, atau demonstrasi pembuatan produk tradisional terbukti

sangat efektif dalam menarik minat wisatawan dan menciptakan platform pemasaran yang kuat untuk produk lokal.

Penelitian mengungkapkan bahwa program mentoring antara pelaku wisata yang berpengalaman dan produsen lokal memberikan manfaat jangka panjang. Melalui program ini, produsen lokal mendapatkan wawasan berharga tentang tren pasar, strategi penetapan harga, dan teknik pemasaran yang efektif. Hal ini membantu mereka tidak hanya dalam meningkatkan penjualan tetapi juga dalam mengembangkan keterampilan bisnis yang penting untuk keberlanjutan usaha mereka.

Terakhir, studi ini menekankan pentingnya pengembangan sistem feedback dan perbaikan berkelanjutan. Program yang memfasilitasi komunikasi regular antara produsen lokal dan pelaku wisata, termasuk survei kepuasan pelanggan dan sesi brainstorming untuk pengembangan produk, memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan preferensi wisatawan dan tren pasar. Ini menciptakan ekosistem yang dinamis dan responsif, di mana produk lokal terus berkembang seiring dengan evolusi industri pariwisata.

Meskipun fasilitasi pemasaran produk lokal melalui kerjasama dengan pelaku wisata di Lorong Wisata Kota Makassar telah menunjukkan hasil yang positif, penelitian juga mengidentifikasi beberapa area yang masih memerlukan peningkatan dan perbaikan untuk memaksimalkan dampak dan keberlanjutan program ini. Salah satu aspek utama yang perlu ditingkatkan adalah diversifikasi kerjasama dengan pelaku wisata. Saat ini, fokus kerjasama cenderung terbatas pada hotel dan restoran lokal. Perlu ada upaya lebih untuk melibatkan pelaku wisata lain seperti maskapai penerbangan, perusahaan kapal pesiar, dan platform perjalanan online berskala nasional atau internasional. Ini akan memperluas jangkauan pemasaran produk lokal ke pasar yang lebih luas.

Peningkatan dalam hal standardisasi kualitas produk juga diperlukan. Meskipun telah ada peningkatan kualitas, masih ada kesenjangan dalam konsistensi produk, terutama untuk produk makanan dan kerajinan tangan. Pengembangan sistem kontrol kualitas yang lebih ketat dan program sertifikasi yang diakui secara luas dapat meningkatkan kepercayaan pelaku wisata dan konsumen terhadap produk lokal.

Aspek keberlanjutan lingkungan dalam produksi dan pengemasan produk lokal perlu mendapat perhatian lebih. Dengan meningkatnya kesadaran wisatawan

terhadap isu lingkungan, pengembangan lini produk ramah lingkungan dan penggunaan kemasan yang dapat didaur ulang menjadi semakin penting. Program dukungan untuk transisi ke praktik produksi yang lebih berkelanjutan perlu diperkuat.

Penelitian juga menunjukkan perlunya peningkatan dalam hal literasi digital di kalangan produsen lokal. Meskipun ada kemajuan dalam penggunaan platform digital untuk pemasaran, masih banyak produsen yang mengalami kesulitan dalam memanfaatkan teknologi secara optimal. Program pelatihan yang lebih intensif tentang e-commerce, pemasaran media sosial, dan analisis data pelanggan dapat membantu produsen lokal untuk lebih mandiri dalam pemasaran digital mereka.

Aspek inklusivitas dalam program kerjasama juga perlu ditingkatkan. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa kelompok, seperti produsen skala sangat kecil atau produsen dari daerah yang lebih terpencil, seringkali tertinggal dalam inisiatif kerjasama ini. Pengembangan program khusus untuk melibatkan dan memberdayakan kelompok-kelompok ini diperlukan untuk memastikan manfaat yang lebih merata.

Peningkatan dalam hal pengembangan produk inovatif juga diperlukan. Meskipun ada fokus pada pelestarian produk tradisional, perlu ada dorongan lebih untuk menciptakan produk yang menggabungkan elemen tradisional dengan desain modern atau teknologi. Ini dapat membuka segmen pasar baru dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.

Aspek manajemen rantai pasok juga perlu diperkuat. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakstabilan pasokan masih menjadi kendala dalam kerjasama dengan pelaku wisata skala besar. Pengembangan sistem manajemen inventori yang lebih efisien dan peningkatan kapasitas produksi yang berkelanjutan perlu menjadi fokus untuk memenuhi permintaan yang konsisten dari industri pariwisata.

Penelitian juga mengungkapkan perlunya peningkatan dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual produsen lokal. Dengan meningkatnya visibilitas produk lokal, risiko peniruan atau eksploitasi desain tradisional juga meningkat. Program bantuan hukum dan fasilitasi pendaftaran hak cipta atau indikasi geografis untuk produk-produk khas Lorong Wisata perlu dikembangkan.

Terakhir, studi ini menekankan pentingnya pengembangan mekanisme bagi hasil yang lebih adil antara produsen lokal dan pelaku wisata. Meskipun

kerjasama telah meningkatkan penjualan, dalam beberapa kasus, porsi keuntungan yang diterima produsen lokal masih relatif kecil. Pengembangan model kemitraan yang lebih berimbang dan transparansi dalam penetapan harga perlu didorong untuk memastikan keberlanjutan ekonomi bagi produsen lokal.

Dengan meningkatkan aspek-aspek ini, program fasilitasi pemasaran produk lokal melalui kerjasama dengan pelaku wisata di Lorong Wisata Kota Makassar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan. Perbaikan dan peningkatan ini akan membantu menciptakan ekosistem pemasaran yang lebih kuat, inklusif, dan adaptif, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan memperkuat posisi produk lokal dalam industri pariwisata yang kompetitif.

3. Penguatan Kapasitas Masyarakat Lorong Wisata

Penguatan Kapasitas Masyarakat Lorong Wisata merupakan komponen krusial dalam upaya mewujudkan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kota Makassar. Hasil penelitian mengenai topik ini mengungkapkan berbagai aspek penting yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal sebagai kunci keberhasilan dan keberlanjutan inisiatif Lorong Wisata.

Studi ini menggambarkan bahwa penguatan kapasitas masyarakat tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup pengembangan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dan pengembangan Lorong Wisata. Penelitian mengidentifikasi beberapa elemen kunci dalam upaya penguatan kapasitas ini, termasuk peningkatan pemahaman tentang industri pariwisata, pengembangan keterampilan manajemen dan kepemimpinan, serta penguatan identitas budaya dan rasa memiliki terhadap lingkungan lorong.

Temuan penelitian juga menyoroti pentingnya pendekatan partisipatif dan inklusif dalam proses penguatan kapasitas. Program-program yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi terbukti lebih efektif dalam menciptakan rasa kepemilikan dan komitmen jangka panjang terhadap pengembangan Lorong Wisata. Selain itu, penelitian mengungkapkan bahwa penguatan kapasitas yang berhasil tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata, tetapi juga memberikan manfaat lebih luas pada pembangunan sosial dan ekonomi komunitas secara keseluruhan.

Lebih lanjut, studi ini menggarisbawahi pentingnya membangun jaringan kerjasama dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan - termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil - dalam mendukung proses penguatan kapasitas masyarakat. Pendekatan multi-stakeholder ini terbukti efektif dalam menyediakan sumber daya, keahlian, dan dukungan yang diperlukan untuk program penguatan kapasitas yang komprehensif dan berkelanjutan.

Dengan memahami hasil penelitian ini, kita dapat lebih baik dalam merancang dan mengimplementasikan strategi penguatan kapasitas yang efektif, adaptif, dan sesuai dengan konteks lokal Lorong Wisata di Kota Makassar. Pengantar ini membuka jalan untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai berbagai aspek spesifik dari upaya penguatan kapasitas masyarakat dalam konteks pengembangan pariwisata berbasis komunitas.

a) Pelatihan Manajemen Wisata Bagi Pengelola Lorong Wisata

Lorong Wisata di Kota Makassar merupakan inisiatif inovatif untuk mengembangkan potensi wisata berbasis masyarakat. Konsep ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata kota, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat lokal. Namun, untuk mewujudkan potensi penuh dari inisiatif ini, diperlukan penguatan kapasitas masyarakat, terutama dalam hal manajemen wisata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan manajemen wisata bagi pengelola lorong wisata merupakan komponen kunci dalam memperkuat resiliensi sosial masyarakat. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan strategis, pengelolaan keuangan, hingga pemasaran dan pelayanan pelanggan. Dengan membekali pengelola lorong wisata dengan keterampilan manajemen yang komprehensif, diharapkan mereka dapat mengelola destinasi wisata mereka secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Salah satu aspek penting dari pelatihan ini adalah pengenalan konsep pariwisata berkelanjutan. Para pengelola lorong wisata diajari bagaimana menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Ini penting untuk memastikan bahwa pengembangan lorong wisata tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menjaga kelestariannya untuk generasi mendatang.

Pelatihan juga mencakup pengembangan keterampilan interpersonal dan komunikasi. Ini penting mengingat pengelola lorong wisata akan berinteraksi langsung dengan wisatawan dari berbagai latar belakang. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan memberikan pelayanan yang ramah dapat meningkatkan pengalaman wisatawan secara signifikan, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada keberlanjutan lorong wisata.

Aspek lain yang ditekankan dalam pelatihan adalah penggunaan teknologi digital untuk promosi dan pengelolaan lorong wisata. Di era digital ini, kemampuan untuk memanfaatkan media sosial dan platform online lainnya sangat penting untuk menarik wisatawan dan mengelola operasional sehari-hari. Pelatihan ini membantu pengelola lorong wisata untuk mengoptimalkan presence online mereka dan menggunakan alat digital untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Hasil penelitian juga menunjukkan pentingnya membangun jaringan dan kolaborasi antar lorong wisata. Pelatihan manajemen wisata tidak hanya fokus pada pengelolaan individual, tetapi juga mendorong pengelola untuk berkolaborasi dan berbagi pengalaman. Ini dapat memperkuat resiliensi sosial komunitas secara keseluruhan, memungkinkan mereka untuk saling mendukung dan belajar dari pengalaman satu sama lain.

Selain itu, pelatihan juga mencakup aspek manajemen krisis dan mitigasi risiko. Mengingat industri pariwisata rentan terhadap berbagai faktor eksternal seperti bencana alam atau krisis ekonomi, kemampuan untuk mengantisipasi dan mengelola risiko sangat penting. Pengelola lorong wisata dibekali dengan keterampilan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mengembangkan rencana kontingensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan manajemen wisata yang efektif harus berkelanjutan dan adaptif. Ini berarti bahwa pelatihan tidak boleh menjadi kegiatan satu kali, tetapi harus menjadi proses yang berkelanjutan. Program pelatihan harus secara rutin diperbarui untuk mengikuti tren terbaru dalam industri pariwisata dan menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat lorong wisata yang terus berkembang.

Akhirnya, penelitian menekankan pentingnya mengevaluasi dampak pelatihan secara berkala. Ini melibatkan pengukuran indikator kinerja utama seperti peningkatan jumlah pengunjung, peningkatan pendapatan masyarakat, dan tingkat kepuasan wisatawan. Evaluasi ini tidak hanya membantu dalam

mengukur efektivitas pelatihan, tetapi juga memberikan wawasan berharga untuk perbaikan dan pengembangan program di masa depan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan ini, pelatihan manajemen wisata dapat menjadi alat yang efektif dalam memperkuat resiliensi sosial masyarakat lorong wisata di Kota Makassar.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelatihan manajemen wisata bagi pengelola lorong wisata di Kota Makassar, sejumlah aspek penting telah diidentifikasi untuk ditingkatkan dan diperbaiki. Hasil evaluasi menyeluruh terhadap program yang ada menunjukkan bahwa meskipun telah mencakup berbagai elemen krusial, masih terdapat ruang signifikan untuk penyempurnaan guna memaksimalkan dampak positifnya terhadap pengembangan kapasitas masyarakat dan penguatan resiliensi sosial.

Salah satu area utama yang memerlukan perhatian adalah kustomisasi program pelatihan. Setiap lorong wisata di Kota Makassar memiliki karakteristik unik, baik dari segi potensi wisata, tantangan yang dihadapi, maupun dinamika sosial masyarakatnya. Oleh karena itu, pendekatan "one size fits all" dalam pelatihan manajemen wisata mungkin tidak sepenuhnya efektif. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk menganalisis kebutuhan spesifik masing-masing lorong dan merancang modul pelatihan yang lebih terkustomisasi. Hal ini dapat mencakup studi kasus yang relevan dengan konteks lokal, sesi diskusi yang berfokus pada isu-isu spesifik yang dihadapi oleh masing-masing lorong, serta penyesuaian materi pelatihan dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan awal peserta.

Selain itu, penguatan aspek praktis dalam pelatihan juga menjadi prioritas. Meskipun pemahaman teoritis tentang manajemen wisata penting, kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata jauh lebih krusial. Program pelatihan perlu diperkaya dengan lebih banyak simulasi, role-playing, dan proyek praktis yang memungkinkan peserta untuk langsung mempraktikkan keterampilan yang dipelajari. Misalnya, peserta dapat diminta untuk merancang dan melaksanakan event wisata mini sebagai bagian dari pelatihan, atau mengembangkan strategi pemasaran digital yang kemudian diimplementasikan dan dievaluasi secara real-time.

Integrasi teknologi yang lebih mendalam juga menjadi aspek penting yang perlu ditingkatkan. Di era digital ini, kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara efektif dapat menjadi faktor pembeda dalam keberhasilan destinasi wisata.

Program pelatihan perlu memperluas cakupannya tidak hanya pada penggunaan media sosial dan platform online dasar, tetapi juga mencakup analisis data pengunjung, penggunaan sistem manajemen destinasi yang canggih, dan bahkan pemanfaatan teknologi augmented reality untuk meningkatkan pengalaman wisatawan. Pelatihan hands-on dengan alat dan software terkini dalam industri pariwisata dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi lorong wisata Makassar.

Pengembangan soft skills juga merupakan area yang memerlukan penekanan lebih. Sementara keterampilan teknis dalam manajemen wisata penting, kemampuan seperti kepemimpinan, pemecahan masalah kreatif, dan kecerdasan emosional sama pentingnya dalam mengelola destinasi wisata yang sukses. Program pelatihan perlu memasukkan modul-modul yang berfokus pada pengembangan soft skills ini, mungkin melalui workshop interaktif, sesi coaching, atau bahkan program mentoring jangka panjang.

Kolaborasi lintas sektor juga menjadi aspek yang perlu ditingkatkan dalam program pelatihan. Pariwisata adalah industri yang sangat terkait dengan banyak sektor lain seperti perhotelan, kuliner, seni dan budaya. Dengan melibatkan ahli dari berbagai sektor terkait dalam program pelatihan, peserta dapat memperoleh perspektif yang lebih luas dan komprehensif tentang industri pariwisata. Ini dapat membantu dalam pengembangan produk wisata yang lebih beragam dan menarik, serta meningkatkan kemampuan pengelola lorong wisata untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Aspek keberlanjutan dalam pariwisata juga perlu mendapat penekanan lebih lanjut. Meskipun konsep pariwisata berkelanjutan sudah diperkenalkan dalam program yang ada, implementasi praktisnya perlu diperdalam. Ini dapat mencakup pelatihan tentang manajemen limbah yang efektif, strategi konservasi energi yang dapat diterapkan di lorong wisata, serta metode untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budaya lokal tanpa mengeksploitasinya. Pengelola lorong wisata perlu dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan sosial budaya.

Sistem monitoring dan evaluasi program pelatihan juga perlu ditingkatkan. Evaluasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk mengukur efektivitas pelatihan tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjangnya terhadap perkembangan lorong wisata dan kesejahteraan

masyarakat. Ini dapat mencakup pengembangan metrik yang lebih rinci dan relevan, seperti pengukuran dampak sosial ekonomi jangka panjang, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata, dan indikator keberlanjutan lingkungan.

Pengembangan program mentoring juga menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Selain pelatihan formal, program mentoring di mana pengelola lorong wisata yang lebih berpengalaman membimbing yang baru dapat menjadi sarana efektif untuk transfer pengetahuan dan pengalaman. Ini dapat membantu mempercepat kurva pembelajaran bagi pengelola baru dan memfasilitasi pertukaran ide dan praktik terbaik antar lorong wisata.

Aspek inovasi dalam pengembangan produk wisata juga perlu mendapat penekanan lebih. Dalam industri pariwisata yang sangat kompetitif, kemampuan untuk berinovasi dan menciptakan pengalaman wisata yang unik menjadi kunci keberhasilan. Program pelatihan perlu memasukkan sesi khusus tentang pengembangan ide kreatif, teknik brainstorming, dan workshop inovasi yang dapat membantu pengelola lorong wisata mengembangkan konsep dan produk wisata yang baru dan menarik.

Terakhir, penguatan jaringan alumni pelatihan juga menjadi aspek penting yang perlu ditingkatkan. Membangun dan memelihara komunitas alumni yang aktif dapat menjadi sumber dukungan dan pembelajaran berkelanjutan bagi para pengelola lorong wisata. Platform ini dapat digunakan untuk berbagi pengalaman, kolaborasi antar lorong wisata, dan bahkan sebagai sarana untuk mentoring informal.

Dengan meningkatkan dan memperbaiki aspek-aspek ini, program pelatihan manajemen wisata di Kota Makassar dapat menjadi lebih komprehensif, relevan, dan efektif dalam memperkuat kapasitas pengelola lorong wisata. Hal ini pada gilirannya akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan resiliensi sosial masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan menjadikan lorong-lorong wisata Makassar sebagai destinasi yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi dalam peta pariwisata nasional maupun internasional.

b) Edukasi Sadar Wisata Dan Hospitality Bagi Warga Setempat

Edukasi sadar wisata dan hospitality bagi warga setempat merupakan komponen krusial dalam pengembangan lorong wisata di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program edukasi ini memiliki dampak signifikan

terhadap peningkatan kualitas pengalaman wisatawan dan keberlanjutan destinasi wisata.

Penelitian mengungkapkan bahwa edukasi sadar wisata berperan penting dalam membentuk pemahaman warga setempat tentang nilai dan potensi wisata di lingkungan mereka. Melalui program ini, warga tidak hanya diperkenalkan pada konsep pariwisata secara umum, tetapi juga diajarkan untuk mengenali dan menghargai keunikan budaya, sejarah, dan lingkungan lokal mereka. Hal ini membangkitkan rasa bangga dan kepemilikan terhadap aset wisata di lorong mereka, yang pada gilirannya mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan dan pelestarian destinasi wisata.

Aspek hospitality atau keramahan dalam program edukasi ini terbukti menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas interaksi antara warga lokal dan wisatawan. Penelitian menunjukkan bahwa warga yang telah menerima pelatihan hospitality memiliki kemampuan yang lebih baik dalam berkomunikasi dengan wisatawan, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan pelayanan yang memuaskan. Ini tidak hanya meningkatkan kepuasan wisatawan, tetapi juga menciptakan pengalaman yang lebih autentik dan bermakna bagi kedua belah pihak.

Program edukasi ini juga berfokus pada penanaman nilai-nilai keberlanjutan dalam pariwisata. Warga diajarkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan wisata dan pelestarian lingkungan serta budaya lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah mengikuti program ini, warga memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang dampak pariwisata terhadap lingkungan dan lebih proaktif dalam upaya pelestarian. Ini terlihat dari inisiatif-inisiatif seperti program kebersihan lorong, pengelolaan sampah yang lebih baik, dan upaya untuk mempertahankan keaslian arsitektur lokal.

Salah satu temuan menarik dari penelitian ini adalah dampak edukasi sadar wisata terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini tidak hanya fokus pada aspek pelayanan, tetapi juga memberikan pemahaman tentang peluang ekonomi yang dapat diciptakan melalui pariwisata. Warga diberikan pengetahuan dasar tentang kewirausahaan berbasis pariwisata, yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang bisnis di sektor ini. Hasilnya, terjadi peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah yang

dijalankan oleh warga lokal, mulai dari warung kuliner khas hingga toko suvenir dan jasa pemandu wisata lokal.

Penelitian juga mengungkapkan bahwa edukasi sadar wisata berperan penting dalam mengurangi potensi konflik antara kepentingan pariwisata dan kehidupan sehari-hari warga. Melalui program ini, warga diajak untuk memahami baik manfaat maupun tantangan yang mungkin timbul dari pengembangan wisata di lingkungan mereka. Hasilnya, warga menjadi lebih siap menghadapi perubahan yang mungkin terjadi dan lebih terbuka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan wisata di lorong mereka.

Aspek penting lainnya yang terungkap dari penelitian adalah peran edukasi dalam memperkuat identitas budaya lokal. Program ini tidak hanya mengajarkan tentang hospitality dalam konteks modern, tetapi juga menekankan pentingnya mempertahankan dan menghidupkan kembali nilai-nilai budaya lokal dalam konteks pariwisata. Warga diajak untuk mengeksplorasi dan mengapresiasi kembali tradisi, kesenian, dan kearifan lokal mereka, yang kemudian dapat diintegrasikan ke dalam pengalaman wisata yang ditawarkan. Hal ini tidak hanya menciptakan daya tarik unik bagi destinasi, tetapi juga membantu dalam pelestarian warisan budaya.

Penelitian juga menunjukkan bahwa program edukasi ini memiliki dampak positif terhadap kohesi sosial di kalangan warga. Melalui berbagai kegiatan pelatihan dan workshop, warga dari berbagai latar belakang dan generasi berkesempatan untuk berinteraksi dan bekerja sama dalam konteks pengembangan wisata. Ini memperkuat ikatan sosial dan rasa kebersamaan di antara warga, yang pada gilirannya berkontribusi pada pengelolaan destinasi wisata yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Salah satu temuan penting lainnya adalah peningkatan kesadaran warga tentang isu-isu global dalam pariwisata. Program edukasi tidak hanya berfokus pada konteks lokal, tetapi juga memberikan wawasan tentang tren dan praktik terbaik dalam pariwisata global. Ini membantu warga untuk memahami posisi lorong wisata mereka dalam konteks yang lebih luas dan mendorong mereka untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan industri pariwisata global.

Akhirnya, penelitian menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan dan konsistensi dalam pelaksanaan program edukasi sadar wisata dan hospitality. Hasil menunjukkan bahwa dampak positif dari program ini dapat menurun seiring

waktu jika tidak ada tindak lanjut dan penguatan berkala. Oleh karena itu, disarankan untuk mengembangkan mekanisme edukasi yang berkelanjutan, seperti program pelatihan reguler, forum diskusi rutin, dan sistem mentoring antar warga, untuk memastikan bahwa pemahaman dan keterampilan yang diperoleh terus diperkuat dan diperbarui sesuai dengan perkembangan industri pariwisata.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa edukasi sadar wisata dan hospitality bagi warga setempat merupakan investasi penting dalam pengembangan lorong wisata yang berkelanjutan dan berdaya saing. Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal, memperkuat identitas budaya, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Keberhasilan program ini menjadi landasan penting bagi terwujudnya lorong wisata yang tidak hanya menarik bagi pengunjung, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal di Kota Makassar.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas program edukasi sadar wisata dan hospitality bagi warga setempat di lorong wisata Kota Makassar, beberapa aspek penting telah diidentifikasi untuk ditingkatkan dan diperbaiki. Hasil evaluasi menyeluruh terhadap program yang ada menunjukkan bahwa meskipun telah memberikan dampak positif yang signifikan, masih terdapat ruang untuk penyempurnaan guna memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat dan pengembangan destinasi wisata secara keseluruhan.

Salah satu area utama yang memerlukan perhatian adalah penyesuaian materi edukasi dengan karakteristik spesifik masing-masing lorong wisata. Setiap lorong di Makassar memiliki keunikan tersendiri, baik dari segi potensi wisata, tantangan yang dihadapi, maupun latar belakang sosial budaya masyarakatnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terkustomisasi dalam penyampaian materi edukasi. Ini dapat mencakup pengembangan modul-modul khusus yang membahas isu-isu spesifik di setiap lorong, seperti pengelolaan warisan budaya tertentu atau pengembangan atraksi wisata unik yang relevan dengan konteks lokal.

Aspek lain yang perlu ditingkatkan adalah integrasi teknologi dalam proses edukasi. Di era digital ini, pemanfaatan platform online dan aplikasi mobile dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas program edukasi. Pengembangan konten digital interaktif, seperti video tutorial, kuis online, atau

bahkan aplikasi simulasi pengelolaan wisata, dapat membuat proses pembelajaran lebih menarik dan mudah diakses bagi warga dari berbagai latar belakang dan kelompok usia. Selain itu, penggunaan media sosial dan platform komunikasi online dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar warga lorong wisata, menciptakan komunitas pembelajaran yang lebih dinamis.

Penguatan aspek praktis dalam program edukasi juga menjadi prioritas. Meskipun pemahaman teoritis tentang sadar wisata dan hospitality penting, kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata jauh lebih krusial. Program edukasi perlu diperkaya dengan lebih banyak sesi praktik, role-playing, dan proyek berbasis masyarakat yang memungkinkan warga untuk langsung mempraktikkan keterampilan yang dipelajari. Misalnya, warga dapat dilibatkan dalam merancang dan mengelola event wisata mini sebagai bagian dari proses pembelajaran, atau berpartisipasi dalam program magang di destinasi wisata yang sudah mapan.

Aspek keberlanjutan lingkungan dalam konteks pariwisata juga perlu mendapat penekanan lebih dalam program edukasi. Meskipun konsep pariwisata berkelanjutan sudah diperkenalkan, implementasi praktisnya perlu diperdalam. Ini dapat mencakup pelatihan tentang praktik ramah lingkungan dalam pengelolaan destinasi wisata, seperti manajemen limbah yang efektif, konservasi energi, dan perlindungan keanekaragaman hayati lokal. Warga perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan praktis untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kegiatan wisata sehari-hari.

Pengembangan keterampilan kewirausahaan berbasis pariwisata juga merupakan area yang perlu ditingkatkan. Program edukasi dapat diperluas untuk mencakup pelatihan bisnis dasar, manajemen keuangan, dan strategi pemasaran yang relevan dengan industri pariwisata. Ini akan membantu warga tidak hanya dalam memberikan layanan yang baik kepada wisatawan, tetapi juga dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul dari aktivitas wisata. Pemberian akses ke sumber daya dan mentoring untuk memulai usaha kecil berbasis wisata dapat menjadi komponen penting dalam aspek ini.

Penguatan aspek pelestarian dan promosi budaya lokal dalam konteks pariwisata juga perlu mendapat perhatian lebih. Program edukasi dapat diperkaya dengan modul-modul yang fokus pada cara-cara kreatif untuk mengintegrasikan

elemen-elemen budaya lokal ke dalam pengalaman wisata. Ini dapat mencakup pelatihan tentang storytelling budaya, pengembangan produk wisata berbasis warisan budaya, atau teknik interpretasi budaya yang efektif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga berkontribusi pada pelestarian dan revitalisasi budaya lokal.

Aspek manajemen konflik dan resolusi masalah juga perlu diperkuat dalam program edukasi. Dengan meningkatnya aktivitas wisata, potensi konflik antara kepentingan pariwisata dan kehidupan sehari-hari warga juga meningkat. Oleh karena itu, warga perlu dibekali dengan keterampilan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola potensi konflik yang mungkin timbul. Ini dapat mencakup pelatihan tentang teknik negosiasi, mediasi, dan pengambilan keputusan partisipatif.

Pengembangan sistem mentoring dan pembelajaran antar-warga juga menjadi aspek penting yang perlu ditingkatkan. Program edukasi dapat diperluas untuk mencakup pembentukan jaringan mentor lokal, di mana warga yang telah berpengalaman dalam pengelolaan wisata dapat membimbing warga lain yang baru mulai terlibat. Ini tidak hanya akan memfasilitasi transfer pengetahuan dan pengalaman yang lebih efektif, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama dalam pengembangan destinasi wisata.

Terakhir, sistem monitoring dan evaluasi program edukasi perlu diperkuat. Evaluasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk mengukur efektivitas program tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjangnya terhadap perkembangan lorong wisata dan kesejahteraan masyarakat. Ini dapat mencakup pengembangan indikator kinerja yang lebih rinci dan relevan, seperti tingkat partisipasi warga dalam kegiatan wisata, peningkatan kualitas layanan, dan dampak ekonomi pada tingkat rumah tangga.

Dengan meningkatkan dan memperbaiki aspek-aspek ini, program edukasi sadar wisata dan hospitality di Kota Makassar dapat menjadi lebih komprehensif, relevan, dan efektif dalam memberdayakan masyarakat lokal. Hal ini pada gilirannya akan berkontribusi signifikan terhadap pengembangan lorong wisata yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing destinasi, dan memastikan bahwa manfaat pariwisata dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui pendekatan yang holistik dan adaptif ini, Kota Makassar dapat

memposisikan dirinya sebagai model keberhasilan dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat yang inovatif dan berkelanjutan.

c) Program kebersihan dan pengelolaan sampah berbasis Masyarakat

Program kebersihan dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat telah menjadi komponen integral dalam pengembangan lorong wisata di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inisiatif ini memiliki dampak signifikan tidak hanya terhadap estetika dan kebersihan lingkungan, tetapi juga pada kesadaran lingkungan masyarakat dan daya tarik destinasi wisata secara keseluruhan.

Penelitian mengungkapkan bahwa program ini telah berhasil meningkatkan partisipasi aktif warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Melalui berbagai kegiatan seperti gotong royong rutin, kompetisi lorong bersih, dan pelatihan pengelolaan sampah, terjadi perubahan signifikan dalam perilaku masyarakat terhadap kebersihan. Warga tidak lagi melihat kebersihan sebagai tanggung jawab pemerintah semata, melainkan sebagai upaya kolektif yang membutuhkan keterlibatan setiap individu.

Salah satu aspek kunci dari program ini adalah penerapan sistem pengelolaan sampah terpadu. Penelitian menunjukkan bahwa lorong-lorong yang menerapkan sistem pemilahan sampah dari sumbernya mengalami penurunan volume sampah yang signifikan. Sistem ini tidak hanya mengurangi beban TPA, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru melalui daur ulang dan pengomposan. Beberapa lorong bahkan berhasil mengembangkan bank sampah yang memberikan manfaat ekonomi langsung kepada warga.

Program ini juga berdampak positif pada aspek estetika lorong wisata. Dengan lingkungan yang lebih bersih dan terawat, lorong-lorong ini menjadi lebih menarik bagi wisatawan. Penelitian menunjukkan peningkatan kepuasan wisatawan terhadap kebersihan dan keasrian lorong, yang pada gilirannya berdampak positif pada durasi kunjungan dan kecenderungan untuk merekomendasikan destinasi ini kepada orang lain.

Aspek edukasi dalam program ini terbukti sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat. Melalui berbagai workshop dan kampanye, warga tidak hanya belajar tentang teknik pengelolaan sampah yang benar, tetapi juga memahami dampak jangka panjang dari perilaku mereka terhadap lingkungan. Ini telah mendorong perubahan gaya hidup yang lebih ramah

lingkungan di kalangan warga, seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan peningkatan praktik daur ulang.

Penelitian juga mengungkapkan bahwa program ini telah memperkuat kohesi sosial di kalangan warga. Kegiatan-kegiatan bersama seperti gotong royong dan pengelolaan bank sampah telah menciptakan ruang bagi warga untuk berinteraksi dan bekerja sama. Ini tidak hanya meningkatkan rasa kebersamaan, tetapi juga memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan antar generasi dalam hal pengelolaan lingkungan.

Salah satu temuan menarik adalah dampak program ini terhadap kreativitas dan inovasi masyarakat. Beberapa lorong berhasil mengembangkan produk-produk kreatif dari sampah daur ulang, yang kemudian menjadi suvenir unik bagi wisatawan. Ini tidak hanya menciptakan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas lorong wisata sebagai destinasi yang ramah lingkungan dan inovatif.

Program ini juga berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat. Dengan lingkungan yang lebih bersih, terjadi penurunan insiden penyakit-penyakit terkait sanitasi buruk. Selain itu, kegiatan fisik yang terlibat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan juga memberikan manfaat kesehatan bagi warga, terutama dalam hal kebugaran dan interaksi sosial yang positif.

Penelitian juga menunjukkan bahwa program ini telah mendorong kolaborasi yang lebih erat antara masyarakat, pemerintah lokal, dan sektor swasta. Beberapa lorong berhasil menjalin kemitraan dengan perusahaan lokal untuk mendukung inisiatif pengelolaan sampah, baik dalam bentuk pendanaan maupun transfer teknologi. Ini tidak hanya meningkatkan keberlanjutan program, tetapi juga membuka peluang untuk replikasi model ini di area lain.

Terakhir, program ini terbukti memiliki dampak positif terhadap citra Kota Makassar secara keseluruhan. Lorong-lorong yang bersih dan terawat menjadi showcase keberhasilan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat, menarik perhatian media dan pengunjung dari berbagai daerah. Ini tidak hanya meningkatkan kebanggaan warga terhadap kota mereka, tetapi juga berpotensi menarik investasi dan kunjungan wisata yang lebih besar di masa depan.

Meskipun program kebersihan dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki untuk memaksimalkan dampaknya.

Berikut adalah analisis mendalam mengenai area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut:

Pertama, perlu ada peningkatan dalam hal konsistensi dan keberlanjutan program. Meskipun antusiasme warga tinggi pada awalnya, beberapa lorong mengalami penurunan partisipasi seiring waktu. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk mempertahankan motivasi dan keterlibatan warga dalam jangka panjang. Ini bisa mencakup pengembangan sistem insentif yang lebih terstruktur, seperti penghargaan berkala untuk lorong terbersih atau individu yang paling aktif dalam pengelolaan sampah.

Kedua, aspek teknologi dalam pengelolaan sampah perlu ditingkatkan. Meskipun sistem pemilahan sampah dasar telah diterapkan, masih ada ruang untuk mengadopsi teknologi yang lebih canggih dalam pengolahan sampah. Misalnya, penggunaan aplikasi mobile untuk melacak dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan sampah, atau penerapan teknologi komposting yang lebih efisien untuk menangani sampah organik.

Ketiga, program edukasi perlu diperluas untuk mencakup aspek-aspek yang lebih luas dari keberlanjutan lingkungan. Selain pengelolaan sampah, warga perlu diberi pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu seperti perubahan iklim, konservasi air, dan biodiversitas urban. Ini akan membantu menciptakan pendekatan yang lebih holistik terhadap keberlanjutan lingkungan di lorong wisata.

Keempat, perlu ada peningkatan dalam hal integrasi ekonomi circular ke dalam program. Meskipun beberapa lorong telah berhasil mengembangkan produk daur ulang, masih ada potensi besar untuk mengembangkan model bisnis yang lebih berkelanjutan berbasis pengelolaan sampah. Ini bisa mencakup pengembangan koperasi daur ulang, atau kemitraan dengan industri yang dapat memanfaatkan bahan daur ulang secara lebih luas.

Kelima, aspek inklusi sosial dalam program perlu diperkuat. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam program ini tidak merata di seluruh kelompok masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi khusus untuk melibatkan kelompok-kelompok yang kurang terwakili, seperti lansia, penyandang disabilitas, atau kelompok ekonomi lemah, dalam kegiatan pengelolaan sampah dan kebersihan.

Keenam, kolaborasi antar lorong wisata perlu ditingkatkan. Meskipun masing-masing lorong telah menunjukkan keberhasilan, masih ada potensi untuk

berbagi pengetahuan dan sumber daya antar lorong secara lebih efektif. Pengembangan forum atau jaringan antar lorong wisata dapat memfasilitasi pertukaran praktik terbaik dan mempercepat adopsi inovasi dalam pengelolaan sampah.

Ketujuh, integrasi program kebersihan dengan aspek-aspek lain dari pengembangan wisata perlu diperkuat. Misalnya, bagaimana menyelaraskan upaya kebersihan dengan pelestarian warisan budaya atau pengembangan atraksi wisata baru. Ini akan memastikan bahwa program kebersihan tidak hanya dilihat sebagai aktivitas terpisah, tetapi sebagai bagian integral dari pengembangan destinasi wisata secara keseluruhan.

Kedelapan, sistem monitoring dan evaluasi program perlu ditingkatkan. Diperlukan pengembangan metrik yang lebih komprehensif untuk mengukur dampak program, tidak hanya dari segi kebersihan fisik, tetapi juga dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih luas. Ini akan membantu dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti dan penyesuaian program yang lebih efektif.

Kesembilan, perlu ada peningkatan dalam hal pengelolaan data dan informasi terkait program. Pengembangan sistem database yang terintegrasi dapat membantu dalam pelacakan progres, identifikasi tren, dan pengambilan keputusan yang lebih informed. Ini juga dapat memfasilitasi penelitian dan analisis yang lebih mendalam tentang efektivitas berbagai aspek program.

Terakhir, aspek keberlanjutan finansial program perlu diperkuat. Meskipun ada dukungan dari pemerintah dan sektor swasta, masih diperlukan model pendanaan yang lebih berkelanjutan untuk memastikan kontinuitas program dalam jangka panjang. Ini bisa mencakup pengembangan skema pendanaan komunitas, atau integrasi yang lebih baik dengan anggaran pengembangan pariwisata kota.

Dengan meningkatkan dan memperbaiki aspek-aspek ini, program kebersihan dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di lorong wisata Kota Makassar dapat menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak luas. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik wisata, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan komunitas yang lebih kuat, ekonomi lokal yang lebih dinamis, dan model pembangunan kota yang lebih berkelanjutan secara keseluruhan.

3. Pemanfaatan Kelompok Sosial pada Program Lorong Wisata

Kebijakan yang berkaitan dengan masalah pada inovasi program lorong wisata, selama ini lebih bersifat *topdown* yang mana prakarsa untuk menyelesaikan masalah tersebut lebih banyak di *drive* (arahan) dari pemerintah termasuk pemerintah daerah. Karena itu, semua kebijakan, program dan kegiatan untuk yang berkenaan dengan inovasi program lorong wisata dominan dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini, kemudian menjadi masalah karena peran serta dan partisipasi masyarakat khususnya pada masyarakat lorong, menjadi pasif bahkan cenderung apatis (masa bodoh). Padahal dari sisi efektivitas (keberhasilan) kebijakan dan program pembangunan, masyarakat menjadi unsur penentu sebagai subyek dari tidak lagi diposisikan sebagai obyek dalam menyelesaikan masalah terutama yang nampak pada masyarakat di lorong wisata.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa dari sisi peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap upaya menyelesaikan masalahnya, masih sangat rendah. Apalagi pada masyarakat lorong, beragam ditemukan peran serta tersebut cenderung masih lemah dengan perilaku yang ditampakkan adalah perilaku pasif dan apatis. Padahal dalam upaya menyelesaikan permasalahan pada program lorong wisata, peran serta dan partisipasi masyarakat lorong yang justru dapat berkontribusi positif terhadap keberhasilan dan keberlanjutan program Lorong wisata yang tentu ditunjang oleh sinergitas antara berbagai *stakeholder*.

Hal temuan dalam penelitian ini menemukan bahwa inisiasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah dalam program lorong wisata cenderung masih apatis. Indikasinya, karena kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat belum berperan aktif untuk membantu menyelesaikan sekelumit problem masyarakat di lorong wisata. Padahal pemanfaatan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat, salah satunya adalah menjadi *agen* dan *channeling* dalam membantu pemerintah menyelesaikan masalah masyarakat di lorong wisata. Upaya pembangun kesadaran dan partisipasi masyarakat pada program lorong wisata dengan menginisiasi adanya pelibatan kelompok-kelompok sosial. Meski kelompok sosial tersebut belum secara terorganisir dan melembaga akan tetapi, melalui kelompok sosial tersebut tercipta forum yang dimiliki oleh masyarakat lorong sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat lokal.

Pemanfaatan kelompok sosial dalam program lorong wisata merupakan strategi yang menarik dan potensial. Mengingat, bahwa keberhasilan dan keberlanjutan program lorong wisata dapat dimulai dari rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat atas program tersebut. Sehingga secara langsung akan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lorong dalam berbagai inovasi program yang diinisiasi. Disamping itu, program yang melibatkan masyarakat sebagai kelompok sosial cenderung lebih memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal sehingga peningkatan kualitas hidup masyarakat lorong dapat terealisasi. Oleh karena itu, pemanfaatan kelompok sosial dalam program lorong wisata dapat menjadi inklusif, beragam dan berkelanjutan. Hal ini juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program lorong wisata.

Pemberdayaan kelompok sosial pada program lorong wisata yang ditemui dari hasil penelitian ini melibatkan pemanfaatan kelompok sosial melalui Kader Posyandu, Kader PKK, Majelis Taklim, serta Kelompok Pemuda yang tersebar di beberapa lorong wisata dengan berbagai peran yang dijalankan, sebagai berikut:

(1) Kader Posyandu

Pembangunan kesehatan masyarakat merupakan kegiatan swadaya masyarakat yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan melalui perbaikan status kesehatan dan gizi. Keberhasilan akan pelaksanaan pembangunan kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat tidak bisa lepas dari berbagai dukungan dan peran aktif yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Dalam hal ini peran yang besar adalah peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang secara langsung berhadapan dengan berbagai permasalahan kemasyarakatan termasuk masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat.

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat oleh petugas kesehatan bersama kadernya secara lengkap. Kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan secara rutin adalah pelayanan Keluarga Berencana, kesehatan ibu dan anak, imunisasi, perbaikan gizi dan penanggulangan diare. Pelaksanaan program posyandu ini memiliki pengaruh dan perubahan

sosial yang sangat besar. Perubahan sosial tersebut berupa perubahan cara pandang masyarakat mengenai kesehatan, terutama kesehatan ibu dan anak, pemantauan tumbuh kembang anak, deteksi penyakit sejak dini, dan masih banyak keuntungan lain yang menimbulkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap kesehatan. Salah satu perubahan yang paling besar adalah perubahan cara pandang pengobatan dan kesehatan yang tadinya bersifat alternatif berubah ke pengobatan dan kesehatan medis.

Tujuan utama pelayanan kesehatan posyandu adalah meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan masyarakat adalah ukuran tertentu akan tingkat kebutuhan suatu kelompok di suatu tempat dimana dalam kondisi sejahtera. Dengan demikian yang paling diharapkan dari pelaksanaan program pelayanan posyandu adalah terbentuknya masyarakat yang sejahtera, ditandai dengan kehidupan yang layak dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup, pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan kesempatan memperoleh pekerjaan serta meningkatkan pendapatan masyarakat

Program kesehatan menekankan pada potensi kader kesehatan sebagai komponen integral dari tenaga kesehatan. Kader kesehatan menyediakan layanan dalam membantu masyarakat untuk mengadopsi perilaku dan gaya hidup sehat, salah satunya melalui layanan posyandu yang didukung oleh kader posyandu yang siap berperan. Selain sebagai kader kesehatan bagi bayi dan balita, kader posyandu saat ini tidak hanya menyentuh pada dua aspek tersebut tetapi secara komprehensif telah menyentuh pada ranah dewasa dan lansia sebagai tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, dalam mengembangkan dan menjalankan perannya secara fungsional kader posyandu dapat dimanfaatkan pada sejumlah program pemerintah untuk menyentuh masyarakat secara langsung, salah satunya dengan pelibatan kader posyandu pada inovasi program lorong wisata.

Berdasarkan data dari lapangan tergambarkan pemanfaatan Kader Posyandu dalam program lorong wisata yang ikut andil mensosialisasikan

program lorong wisata kepada masyarakat lorong. Disamping itu, pendampingan yang senantiasa dilakukan oleh kader posyandu kepada masyarakat lorong guna memberikan edukasi berkenaan dengan program lorong wisata. Sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh kader posyandu di berbagai lorong wisata secara tidak langsung memberikan *impact* positif terhadap pengetahuan masyarakat tentang program lorong wisata yang senantiasa akan bermuara pada kesadaran masyarakat lorong terkait kemanfaatan program lorong wisata. Mengingat, dari hasil penelitian ditemukan bahwa sosialisasi dan pendampingan dari aparat pemerintah setempat kurang dilakukan kepada masyarakat lorong sehingga pemahaman masyarakat terkait program lorong wisata tidak berkembang. Namun, dengan rangkap peran yang dilakukan oleh kader posyandu secara fungsional akan membantu masyarakat membangun kesadaran dengan memanfaatkan berbagai inovasi program lorong wisata dengan sebaik mungkin.

(2) Kader PKK

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang dikenal dengan istilah PKK biasanya diasosiasikan sebagai perkumpulan ibu-ibu yang memiliki kegiatan positif. PKK adalah organisasi kemasyarakatan untuk memberdayakan Perempuan dan berpartisipasi dalam Pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kelompok PKK terdiri dari kelompok yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, dimana fungsinya sebagai fasilitator, perencana, pelaksanaan dan penggerak di masing-masing jenjang terlaksananya program PKK.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai agen Gerakan Pembangunan masyarakat mempunyai 10 Segi Kehidupan Keluarga yang dikenal dengan istilah 10 Program Pokok PKK, diantaranya (1) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; (2) Gotong Royong; (3) Pangan; (4) Sandang; (5) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga; (6) Pendidikan dan Keterampilan; (7) Kesehatan; (8) Pengembangan Kehidupan Berbangsa; (9) Kelestarian Lingkungan

Hidup; dan (10) Perencanaan Sehat. Kesepuluh program pokok tersebut bukanlah slogan kosong semata, karena PKK yang kadernya terdiri dari perempuan (ibu-ibu) sejatinya adalah garda terdepan dalam pembentukan sumber dayam anusia yang berkualitas. Seluruh program pokok PKK jika disandingkan dengan program prioritas pemerintah Kota Makasar dinilai sejalan dan dapat dibangun sinergitas antara keduanya.

Peran kader sangat krusial dalam memastikan program-program pemerintah dapat terlaksana dengan baik di tingkat masyarakat, salah satunya pada program prioritas pemerintah Kota Makassar pada inovasi program lorong wisata yang telah berjalan kurang lebih 3 tahun ini. Pemanfaatan Kader PKK sebagai salah satu kelompok sosial dalam upaya menjembatani program lorong wisata sampai pada masyarakat terus dilakukan guna menciptakan keberhasilan program. Terlihat, dari hasil temuan lapangan menunjukkan peran serta kader PKK secara fungsional untuk mengimplementasikan program lorong wisata secara massif kepada masyarakat. Tidak hanya sekedar wacana belaka, kader PKK sebagai salah satu kelompok sosial dalam implementasi 10 program pokok mereka pada masyarakat yang diselaraskan dengan berbagai inovasi dari program lorong wisata. Sehingga kedua program tersebut dapat sejalan dan menyentuh masyarakat secara langsung.

Pemanfaatan kader PKK sebagai kelompok sosial dalam program lorong wisata senantiasa menjadi motor penggerak yang dapat membangkitkan gerakan masyarakat untuk ikut andil dalam berbagai program lorong wisata. Hal ini ditunjang oleh keterlibatan kader PKK dalam kegiatan lorong wisata, seperti gotong royong yang dilakukan bersama dengan masyarakat lorong guna menciptakan kelestarian lingkungan hidup pada masyarakat di dalam lorong wisata. Dengan gerakan aktif yang dipercontohkan oleh kader PKK senantiasa memantik kesadaran masyarakat lorong untuk ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan karena nilai kemanfaatan yang dirasakan.

(3) Majelis Taklim

Pemanfaatan kelompok majelis taklim dalam program lorong wisata dinilai sebagai salah satu langkah strategis dalam menunjang kesuksesan program lorong wisata. Sebagai lembaga yang

menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam non-formal, majelis taklim merupakan wadah silaturahmi antar masyarakat juga sebagai wadah dan saran dakwah dan pembinaan akhlak Islamiah masyarakat. Kehadiran kelompok majelis taklim tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana dakwah Islamiah, tetapi juga sarana interaktif masyarakat untuk berdakwah pada berbagai aspek kehidupan lainnya. Salah satu contoh aplikatifnya dalam kehidupan masyarakat adalah, pemanfaatan kelompok sosial majelis taklim dalam sarana “dakwah” yang berkenaan dengan program pemerintah, yaitu inovasi program lorong wisata.

(4) Kelompok Pemuda

Kelompok pemuda sebagai salah satu kelompok sosial yang turut diberdayakan dalam program lorong wisata. Peran pemuda yang sentral nampaknya dapat menjadi motor penggerak bagi keberlangsungan suatu program pemerintah, termasuk pada program lorong wisata. Pemuda yang secara kuantitas banyak ditemukan di dalam lorong menjadi salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan/diberdayakan. Kehadiran kelompok-kelompok pemuda dalam lorong yang identik dengan sejumlah problematika yang melekat pada mereka senantiasa menjadi stigma yang tidak dapat dinafikkan keberadaanya.

Namun, dengan adanya program lorong wisata sinergitas antar pemuda menjadi lebih terlihat dikarenakan adanya kesadaran pemuda untuk ikut andil dalam berbagai program lorong wisata. Salah satu contoh mendasar yang sering ditemukan pada keterlibatan pemuda dalam setiap program kebersihan lorong dalam bentuk gotong royong bersama masyarakat di dalam lorong. Keikutsertaan pemuda dalam beragam program lorong wisata senantiasa membentuk kesatuan mereka, sehingga lahirlah kelompok pemuda dalam masyarakat lorong wisata.

C. Pembahasan

Program lorong wisata telah menjadi program unggulan Pemerintah Kota Makassar dalam upaya untuk membangun Kota Makassar menuju *Resilient City* dengan pertumbuhan yang inklusif. Namun berdasar pada hasil penelitian, ditemukan bahwa masih terdapat banyak masalah-masalah sosial yang dihadapi

oleh masyarakat di dalam lorong dalam penguatan resiliensi sosial masyarakat lorong. Diantaranya: Pertama, Kemiskinan; ditemukan pada sebagian besar masyarakat dalam lorong wisata masih berada di bawah garis kemiskinan yang divalidasi oleh banyaknya penerima manfaat dalam lorong wisata, yaitu berada rata-rata diatas 50% dari jumlah keseluruhan masyarakat yang ada di dalam lorong tersebut. Penguatan resiliensi sosial pada masyarakat lorong dalam menghadapi masalah kemiskinan yaitu dengan membangun kekuatan ekonomi dalam bentuk berjualan dan saling menghidupi dengan cara, masing-masing masyarakat membeli dagangan para penjual yang terdapat di dalam lorong wisata (Lorong UMKM, Lorong Saga, dan Lorong Sulapa Appa).

Kedua, kurangnya infrastruktur dan fasilitas umum yang memadai; hal ini banyak dijumpai pada kondisi fisik dalam lorong wisata yang masih memerlukan perhatian serius terutama pada penyediaan infrastuktur seperti drainase lorong, penerangan jalan dan pengoptimalisasian CCTV dalam menunjang keamanan masyarakat lorong wisata. Mengingat, dalam kondisi yang seperti ini dapat berimplikasi pada terjadinya kerawanan sosial dalam lorong, seperti pencurian, tawuran dan perilaku kriminalitas lainnya. Upaya resiliensi sosial yang diterapkan masyarakat dalam menghadapi masalah tersebut dengan cara melakukan advokasi kepada pemerintah (SKPD terkait). Lorong Mr Big, Lorong Saga dan Lorong UMKM telah melakukan upaya dengan pendekatan dan komunikasi aktif dengan pemerintah setempat untuk menyuarakan kebutuhan infrastruktur yang ada di lorong mereka.

Ketiga, masalah kebersihan terutama pada pengelolaan sampah; hal ini banyak ditemukan di dalam beberapa lorong wisata dengan kondisi pemandangan kontraks antara dinding-dinding berwarna dan tumpukan sampah di pinggir lorong. Sistem pengumpulan sampah yang tidak teratur dan memadai, dikarenakan keterbatasan akses pada kendaraan sistem pengangkut sampah untuk masuk ke dalam lorong dengan kondisi fisik yang cukup sempit dan berliku. Meski dalam program lorong wisata telah disinergikan melalui inovasi seperti Bank Sampah tetapi hal tersebut belum signifikan pengaruhnya pada beberapa lorong wisata, Bentuk resiliensi sosial masyarakat lorong pada kondisi ini dilakukan dengan mengedukasi masyarakat tentang pemilahan sampah organik dan anorganik yang selanjutnya diimplementasikan dalam optimalisasi program Bank Sampah yang ada di dalam lorong. Dengan sistem pembentukan buku tabungan sampah yang

dapat diambil secara tunai sesuai dengan harga sampah yang mereka kumpulkan (Lorong UMKM dan Lorong Kyoto).

Keempat, konflik sosial antar Warga; terjadinya konflik sosial menimbulkan ketegangan yang mewarnai hirup kehidupan masyarakat lorong. Kondisi fisik lorong yang sempit sering kali menjadi perebutan masyarakat atas kepentingan pribadi yang salah satunya dipengaruhi oleh status sosial yang dimiliki seseorang yang ada di dalam lorong. Dimana terdapat superior yang berada di dalam lorong yang mendominasi penggunaan ruang publik sesuai dengan kepentingan pribadi. Resiliensi sosial masyarakat lorong dalam menghadapi kondisi ini dilakukan dengan melaksanakan proyek perbaikan lorong yang melibatkan semua lapisan masyarakat, sehingga rasa kebersamaan dapat tumbuh diantar masyarakat lorong. Disamping itu, menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap lorong dalam upaya mengurai dominasi yang terjadi di dalam lorong. (Lorong UMKM dan Lorong Daeng Jakking)

Kelima, minimnya keterlibatan pemerintah lokal; absennya kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan dari pihak berwenang membuat pengembangan lorong wisata cenderung sporadis dan tidak terkoordinasi. Mengingat ciri identik masyarakat lorong yang ditemukan adalah masyarakat yang menunggu suapan (arahan). Merujuk pada kurangnya inisiatif pemerintah setempat terkait program lorong wisata juga mematikan semangat dan inisiasi masyarakat untuk mengembangkan program lorong wisata yang ada di dalam lorong mereka. Sehingga berimplikasi pada stagnasi program lorong wisata. Upaya resiliensi sosial yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi tantangan ini dilakukan dengan melakukan advokasi kepada pemerintah/ SKPD terkait dengan penyusunan pengembangan lorong wisata yang komprehensif. Meski diakui bahwa, pada tataran responsif pemerintah dan SKPD terkait hingga saat ini belum ada tindak lanjut nyata yang dilakukan oleh pihak terkait. (Lorong Mr Big).

Sejumlah masalah sosial dan penerapan resiliensi yang telah diuraikan diatas, nampaknya masih memerlukan penguatan dalam beberapa aspek yang disandarkan pada konsep resiliensi sosial secara utuh, sebagaimana konsep resiliensi sosial yang dikemukakan oleh Sharifi (dalam Christina T. Permana, dkk, 2023) yang memuat lima dimensi, yaitu dimensi institusional, dimensi lingkungan, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dan dimensi infrastruktur.

Berdasar pada temuan penelitian, konsep resiliensi sosial yang dikemukakan oleh Sharifi (dalam Christina T. Permana, dkk, 2023) terimplementasi pada masyarakat lorong wisata dengan penerapan yang cukup berbanding terbalik. Dalam konsepnya, pertama; pada dimensi institusional ini memuat kekuatan institusi yang dapat mempengaruhi upaya meningkatkan resiliensi sosial masyarakat lorong. Berbagai pihak terkait mengkoordinasikan sejumlah kebijakan dan inovasi program lorong wisata yang diterapkan menggunakan pendekatan yang menggabungkan top-down dan bottom-up. Dimana pemerintah sebagai institusi menetapkan *guideline* umum dan target pencapaian, namun detail pelaksanaan dan inovasi program diserahkan pada tataran lokal (masyarakat lorong) yang mengetahui kebutuhannya sendiri yang selaras dengan visi dan misi pemerintah.

Namun dalam pengaplikasiannya kecenderungan pendekatan yang diterapkan masih berada pada tataran pendekatan top-down sehingga masyarakat harus terus menunggu arahan dari pihak pemerintah untuk melakukan suatu inovasi di dalam lorongnya tanpa adanya inisiatif sendiri dari masyarakat lorong dalam menyelesaikan permasalahannya. Disamping itu, minimnya keterlibatan pemerintah lokal, yang mengindikasikan perlunya penguatan aspek institusional secara signifikan. Keterlibatan aktif pemerintah lokal sangat diperlukan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pengembangan Lorong Wisata sebagai destinasi wisata berkelanjutan. Hal ini mencakup pembentukan kerangka hukum dan regulasi yang jelas, alokasi sumber daya yang memadai, serta koordinasi antar lembaga pemerintah terkait.

Penguatan dimensi institusional juga melibatkan pembentukan mekanisme tata kelola yang partisipatif dan inklusif. Ini dapat diwujudkan melalui pembentukan forum multipihak yang melibatkan perwakilan masyarakat, pelaku usaha lokal, akademisi, dan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan Lorong Wisata. Forum semacam ini dapat menjadi wadah untuk menyelaraskan berbagai kepentingan, mengatasi potensi konflik, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal.

Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan pada tingkat komunitas juga menjadi penting. Ini meliputi pemberdayaan organisasi masyarakat lokal seperti RT/RW, karang taruna, dan kelompok sadar wisata (pokdarwis) agar dapat

berperan lebih aktif dalam pengelolaan dan pengembangan Lorong Wisata. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui pelatihan manajemen organisasi, perencanaan program, dan pengelolaan keuangan. Dengan penguatan dimensi institusional yang komprehensif, diharapkan dapat tercipta landasan yang kuat bagi resiliensi sosial komunitas Lorong Wisata di Kota Makassar.

Kedua, pada dimensi lingkungan; menjadi aspek vital dalam upaya penguatan resiliensi sosial Lorong Wisata di Kota Makassar, mengingat masalah kebersihan dan pengelolaan sampah yang dihadapi oleh komunitas. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada estetika dan daya tarik Lorong Wisata sebagai destinasi wisata, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan degradasi lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu, upaya penataan dan revitalisasi lingkungan Lorong Wisata harus menjadi prioritas utama dalam strategi penguatan resiliensi sosial.

Implementasi sistem pengelolaan sampah terpadu menjadi langkah krusial dalam mengatasi permasalahan lingkungan di Lorong Wisata. Ini meliputi pengadaan infrastruktur persampahan yang memadai, seperti tempat sampah terpilah, bank sampah, dan unit pengolahan sampah skala komunitas. Selain itu, edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan perlu dilakukan secara intensif untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Program-program seperti lomba kebersihan antar lorong, insentif untuk praktik pengelolaan sampah yang baik, dan pelatihan daur ulang sampah dapat menjadi strategi efektif dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Aspek penghijauan dan pengembangan ruang terbuka hijau juga perlu menjadi perhatian dalam dimensi lingkungan. Penanaman pohon, pembuatan taman vertikal, dan pengembangan kebun komunitas tidak hanya akan meningkatkan estetika Lorong Wisata, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan kualitas udara, pengurangan efek urban heat island, dan peningkatan keanekaragaman hayati perkotaan. Selain itu, inisiatif seperti penerapan teknologi ramah lingkungan, seperti penggunaan lampu hemat energi dan sistem pemanenan air hujan, dapat menjadi langkah konkret dalam mewujudkan konsep eco-tourism di Lorong Wisata. Dengan pendekatan holistik terhadap dimensi lingkungan, diharapkan dapat tercipta Lorong Wisata yang tidak hanya resilient

secara ekologis, tetapi juga menjadi model bagi pengembangan wisata perkotaan berkelanjutan.

Ketiga, pada dimensi sosial; Dimensi sosial merupakan inti dari upaya penguatan resiliensi sosial di Lorong Wisata Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan adanya potensi konflik sosial antar warga, yang dapat menjadi hambatan serius dalam pembangunan resiliensi komunitas. Namun, di sisi lain, keberadaan kelompok-kelompok sosial seperti kader posyandu, kader PKK, majelis taklim, dan kelompok pemuda merupakan modal sosial yang sangat berharga. Penguatan kohesi sosial dan pemanfaatan optimal modal sosial yang ada menjadi kunci dalam membangun komunitas Lorong Wisata yang resilient.

Strategi penguatan dimensi sosial dapat dimulai dengan program-program yang mendorong interaksi dan kerjasama antar warga. Ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti gotong royong berkala, festival budaya lorong, atau program pertukaran keterampilan antar warga. Selain itu, pembentukan forum dialog warga yang regular dapat menjadi wadah untuk mengatasi potensi konflik secara dini dan membangun kesepahaman antar kelompok masyarakat. Pelatihan resolusi konflik dan mediasi komunitas juga perlu diberikan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan kelompok sosial yang ada.

Pemanfaatan dan penguatan kelompok-kelompok sosial yang sudah ada juga menjadi strategi penting dalam dimensi sosial. Kader posyandu dan PKK dapat diberdayakan tidak hanya untuk urusan kesehatan dan kesejahteraan keluarga, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam pengembangan Lorong Wisata. Majelis taklim dapat berperan dalam mempromosikan nilai-nilai sosial dan budaya lokal kepada pengunjung, sementara kelompok pemuda dapat dilibatkan dalam pengembangan atraksi wisata kreatif dan pengelolaan media sosial Lorong Wisata. Dengan mengoptimalkan peran kelompok-kelompok ini, diharapkan dapat terbangun jaringan sosial yang kuat dan terorganisir, yang merupakan fondasi penting bagi resiliensi komunitas Lorong Wisata di Kota Makassar.

Ketiga, pada dimensi ekonomi; Dimensi ekonomi memainkan peran vital dalam penguatan resiliensi sosial Lorong Wisata di Kota Makassar, terutama mengingat masalah kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal menjadi kunci utama dalam membangun ketahanan ekonomi komunitas. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan sektor UMKM berbasis potensi lokal, yang tidak hanya

menciptakan lapangan kerja baru tetapi juga mendiversifikasi sumber pendapatan masyarakat.

Implementasi program-program pelatihan kewirausahaan yang spesifik dan relevan dengan konteks Lorong Wisata menjadi langkah strategis. Pelatihan ini dapat mencakup aspek-aspek seperti manajemen usaha kecil, pemasaran digital, dan pengembangan produk wisata kreatif. Selain itu, fasilitasi akses terhadap modal melalui skema kredit mikro atau kemitraan dengan lembaga keuangan lokal dapat membantu masyarakat dalam memulai atau mengembangkan usaha mereka.

Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal juga menjadi peluang menarik dalam konteks Lorong Wisata. Ini dapat meliputi produksi kerajinan tangan khas Makassar, kuliner tradisional, atau pertunjukan seni budaya. Dengan demikian, tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga melestarikan dan mempromosikan warisan budaya lokal. Pembentukan koperasi atau asosiasi usaha mikro Lorong Wisata juga dapat menjadi strategi untuk memperkuat posisi tawar masyarakat lokal dalam rantai nilai pariwisata, sekaligus membangun semangat gotong royong dalam aspek ekonomi.

Keempat, pada dimensi infrastruktur; menjadi aspek krusial dalam membangun resiliensi komunitas Lorong Wisata di Kota Makassar, mengingat kurangnya infrastruktur dan fasilitas umum yang memadai. Peningkatan kualitas infrastruktur tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, tetapi juga memperkuat daya tarik Lorong Wisata sebagai destinasi wisata perkotaan.

Prioritas utama dalam dimensi ini adalah perbaikan dan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, saluran air, dan sistem sanitasi. Perbaikan jalan setapak dengan material yang ramah lingkungan namun tahan lama dapat meningkatkan aksesibilitas sekaligus mempertahankan karakter unik lorong. Pengembangan sistem drainase yang efektif dan instalasi pengolahan air limbah komunal dapat mengatasi masalah banjir dan pencemaran air yang sering menjadi kendala di kawasan padat penduduk.

Selain itu, pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata juga perlu diperhatikan. Ini meliputi penyediaan toilet umum yang bersih, tempat istirahat (*rest area*) yang nyaman, serta pusat informasi wisata. Pemasangan penerangan jalan yang memadai tidak hanya meningkatkan keamanan tetapi juga dapat

dirancang untuk menciptakan suasana yang menarik di malam hari. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi, seperti akses wifi gratis di titik-titik strategis, juga dapat meningkatkan daya saing Lorong Wisata di era digital. Semua pengembangan infrastruktur ini harus mempertimbangkan prinsip-prinsip desain yang inklusif untuk memastikan aksesibilitas bagi semua kelompok, termasuk lansia dan penyandang disabilitas.

Sebagai kesimpulan pada konsep resiliensi sosial pada program lorong wisata melalui lima dimensi diatas memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan kelima dimensi resiliensi sosial tersebut: institusional, lingkungan, sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Melalui penguatan aspek institusional, diharapkan tercipta tata kelola yang efektif dan partisipatif. Perbaikan dimensi lingkungan akan menciptakan Lorong Wisata yang bersih, hijau, dan berkelanjutan. Penguatan dimensi sosial akan membangun kohesi sosial yang kuat dan memanfaatkan modal sosial yang ada. Pemberdayaan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan peluang usaha baru. Sementara itu, peningkatan infrastruktur akan memperkuat fondasi fisik bagi pengembangan Lorong Wisata.

Implementasi strategi penguatan resiliensi sosial ini memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi. Pemerintah berperan dalam menyediakan kerangka kebijakan dan dukungan sumber daya. Masyarakat sebagai aktor utama harus dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan pengembangan. Sektor swasta dapat berkontribusi melalui investasi dan kemitraan strategis, sementara akademisi dapat memberikan masukan ilmiah dan melakukan monitoring evaluasi.

Akhirnya, penguatan resiliensi sosial di Lorong Wisata Makassar harus dipandang sebagai proses jangka panjang yang memerlukan komitmen berkelanjutan. Evaluasi dan adaptasi strategi secara berkala diperlukan untuk merespon dinamika perubahan dan tantangan baru yang mungkin muncul. Dengan pendekatan yang komprehensif dan adaptif, diharapkan Lorong Wisata di Kota Makassar tidak hanya menjadi destinasi wisata yang menarik, tetapi juga menjadi model pengembangan komunitas perkotaan yang resilient dan berkelanjutan.

4.2 Implikasi

1. Reformasi Struktur Kelembagaan:

Temuan penelitian mengindikasikan perlunya reformasi struktur kelembagaan pemerintah kota untuk mengatasi masalah koordinasi antar lembaga. Ini dapat melibatkan pembentukan unit koordinasi khusus atau restrukturisasi departemen yang ada untuk memfasilitasi pendekatan yang lebih terintegrasi dalam pengembangan Lorong Wisata. Implementasi reformasi ini memerlukan analisis mendalam terhadap struktur organisasi yang ada, identifikasi tumpang tindih dan kesenjangan dalam tanggung jawab, serta perancangan struktur baru yang lebih efisien. Proses ini juga harus melibatkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa struktur baru dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan Lorong Wisata.

2. Pengembangan Kapasitas Pranata Sosial

Pemerintah kota perlu merancang dan mengimplementasikan program pengembangan kapasitas yang komprehensif untuk pranata sosial seperti Dewan Lorong dan Penanggung Jawab Lorong. Ini dapat mencakup pelatihan manajemen komunitas, resolusi konflik, dan perencanaan partisipatif. Program pengembangan kapasitas ini harus dirancang dengan pendekatan yang berkelanjutan dan berjenjang. Dimulai dari pelatihan dasar hingga program lanjutan yang memungkinkan pranata sosial untuk terus meningkatkan kemampuan mereka seiring dengan perkembangan program Lorong Wisata. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan untuk mengembangkan sistem mentoring dan pertukaran pengetahuan antar pranata sosial di berbagai lorong untuk memfasilitasi pembelajaran dan berbagi praktik terbaik.

3. Desain Mekanisme Koordinasi Lintas Sektor

Pembentukan badan khusus untuk program Lorong Wisata memerlukan desain yang cermat tentang mekanisme koordinasi lintas sektor. Ini melibatkan pemetaan peran dan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan, serta pengembangan protokol komunikasi dan pengambilan keputusan yang efektif. Implementasi mekanisme koordinasi ini harus didukung oleh sistem informasi manajemen yang terintegrasi untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan pengambilan keputusan yang cepat

dan akurat. Perlu juga dipertimbangkan untuk mengadopsi pendekatan agile dalam manajemen proyek, yang memungkinkan fleksibilitas dan adaptasi cepat terhadap perubahan kondisi atau kebutuhan dalam pengembangan Lorong Wisata.

4. Program Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah kota perlu merancang dan mengimplementasikan program edukasi dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Ini dapat mencakup kampanye kesadaran publik, workshop komunitas, dan program mentoring untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan Lorong Wisata. Program ini harus dirancang dengan mempertimbangkan keragaman masyarakat lorong, termasuk perbedaan usia, latar belakang pendidikan, dan status sosial-ekonomi. Penggunaan berbagai metode komunikasi dan edukasi, termasuk media sosial dan teknologi digital, dapat membantu menjangkau berbagai segmen masyarakat. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan kewirausahaan dan akses ke modal usaha juga perlu diintegrasikan untuk memastikan keberlanjutan partisipasi Masyarakat

5. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi:

Diperlukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif untuk mengukur kemajuan dan dampak program Lorong Wisata. Sistem ini harus mencakup indikator kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan berbagai dimensi resiliensi sosial dan kualitas hidup masyarakat. Implementasi sistem ini memerlukan pengembangan set indikator yang relevan dan terukur, serta metode pengumpulan data yang efisien. Penggunaan teknologi seperti aplikasi mobile untuk pengumpulan data *real-time* dan *dashboard* visualisasi data dapat meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan untuk melibatkan masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi melalui mekanisme seperti *citizen reporting* atau *community-based monitoring*.

6. Revisi Kebijakan dan Regulasi

Pemerintah kota perlu melakukan revisi terhadap kebijakan dan regulasi yang ada terkait pengembangan Lorong Wisata. Ini mencakup peninjauan kembali target kuantitatif dan pengembangan indikator kinerja yang lebih berorientasi pada kualitas dan dampak. Proses revisi kebijakan ini

harus melibatkan konsultasi publik yang luas untuk memastikan bahwa kebijakan baru mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Perlu juga dipertimbangkan untuk mengadopsi pendekatan kebijakan adaptif yang memungkinkan fleksibilitas dan penyesuaian berdasarkan pembelajaran dan pengalaman implementasi. Selain itu, harmonisasi kebijakan Lorong Wisata dengan kebijakan perkotaan lainnya juga penting untuk memastikan konsistensi dan sinergi dalam pembangunan kota secara keseluruhan.

7. Pengembangan Model Kemitraan Publik-Swasta

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, pemerintah kota perlu mengembangkan model kemitraan publik-swasta yang inovatif dalam pengembangan dan pengelolaan Lorong Wisata. Ini dapat melibatkan skema investasi bersama, program tanggung jawab sosial perusahaan, atau kemitraan dengan lembaga filantropi. Implementasi model kemitraan ini memerlukan pengembangan kerangka hukum dan regulasi yang jelas untuk melindungi kepentingan publik sambil memberikan insentif yang menarik bagi sektor swasta. Perlu juga dipertimbangkan untuk mengembangkan mekanisme pembagian risiko dan manfaat yang adil antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Selain itu, pengembangan kapasitas pemerintah dalam negosiasi dan manajemen kontrak kemitraan juga penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan kemitraan jangka panjang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dalam hasil penelitian ini diuraikan pada penggambaran temuan sebagai berikut:

1. Penguatan resiliensi sosial dalam menangani masalah-masalah sosial di dalam masyarakat lorong wisata cenderung masih bersifat lemah. Kesadaran penuh masyarakat terhadap program lorong wisata sebagai upaya resiliensi yang diberikan pemerintah belum berujung pada optimalisasi keberdayaan masyarakat lorong, sehingga resiliensi sosial juga ikut melemah. Oleh karena itu, efektifitas program lorong wisata dalam menangani masalah-masalah sosial masyarakat dalam lorong belum mampu dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan termasuk didalamnya aparat penyelenggara di tingkat bawah.
2. Sinergitas antar dinas/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*), belum cukup memadai sehingga implementasi kebijakan dalam bentuk program cenderung dilakukan secara fragmentaris (sendiri-sendiri). Dukungan kebijakan dalam bentuk struktur kelembagaan, sumber daya manusia dan finansial, serta sistem pengendalian (monitoring dan evaluasi) belum memadai.
3. Pemanfaatan kelompok sosial sebagai penguatan resiliensi sosial masyarakat dalam program lorong wisata masih berada pada tataran sederhana. Sehingga optimalisasi pelibatan kelompok sosial dalam serangkaian inovasi program lorong wisata belum cukup memadai dan terbatas pada kegiatan-kegiatan sederhana dan sporadis.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan pada temuan penelitian, untuk meningkatkan atau menguatkan resiliensi sosial maka dibutuhkan langkah-langkah strategis, yang merupakan rekomendasi dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penguatan kebijakan aparat pemerintah dalam hal pengalokasian anggaran maupun program, karena selama ini intervensi pemerintah kota terhadap masyarakat lorong dalam program lorong wisata masih terkesan sektoral dan tidak terkoordinasi dengan baik. Setiap dinas atau lembaga

pemerintah seolah berjalan sendiri-sendiri tanpa ada suatu central holistik yang sama dalam membangun sineritas dan koordinasi antar lembaga terhadap program lorong wisata.

2. Penguatan fungsi pranata sosial dalam program lorong wisata, diantaranya Dewan Lorong dan Penanggungjawab Lorong. Dalam kondisinya secara faktual fungsi dan peran pranata sosial yang ada di setiap lorong belum mendapatkan pembinaan dan pelatihan secara optimal, sehingga dalam menjalankan perannya belum berjalan secara fungsional.
3. Perlu dibentuk suatu badan khusus yang bertanggungjawab atas program lorong wisata dalam pengembangan masyarakat lorong. Fungsinya tidak hanya sebagai koordinator, tetapi juga sebagai pusat perencanaan dan pelaksanaan program lorong wisata yang holistik dengan melibatkan berbagai dinas/lembaga terkait.
4. Perlu dibangun kesadaran masyarakat untuk memperkuat resiliensi sosial sehingga membentuk partisipasi aktif masyarakat dalam program lorong wisata. Kesadaran ini dapat dibangun ini melalui edukasi yang intensif dan berkelanjutan terkait program lorong wisata.
5. Perlunya peninjauan kembali regulasi terkait target kuantitas jumlah lorong wisata. Dibutuhkan penguatan lorong wisata yang telah terbangun secara kualitas, dibandingkan memenuhi tuntutan untuk mencapai target yang secara faktual kurang optimal dalam penerapan aplikatifnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, A. L. (2019). Interelasi Pengeluaran Pemerintah dan Kesempatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(2), 230. <https://doi.org/10.24252/ecc.v6i2.10957>
- Izudin, Ahmad. (2022). *Analisis Perencanaan Kebijakan dan Pelayanan Sosial*. Jakarta: Kencana
- Klohn, E.C. (1996). Conceptual Analysis and Measurement of The Construct of Ego Resilience. *Journal of Personality and Social Psychology*, Volume. 70 No 5, p 1067-1079.
- Mariana, Dede. 2010. Otonomi Daerah dan Inovasi Kebijakan. *Journal of Governance*, Vol. 1, No. 1. Diunduh pada <http://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/governance/article/download/702/588>. Diakses 12 Februari 2024
- Noor, Dr. Iwan. (2017). *Desain Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang: UB Press.
- Nugroho, Rian (2018). *Kebijakan Sosial untuk Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nurainayanti, R., & Atiudina. (2011). *Makna kebersyukuran dan Resiliensi: Telaah Pustaka tentang Pengaruh Kebersyukuran dan Pengaruhnya Terhadap Daya Resiliensi Pada Korban Erupsi Merapi DIY 2010*. Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada
- Nurcholish, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Permana Chrisna T, dkk., (2023). *Heritage and Resiliensi Kota*. Sleman: Deepublish.
- Putri, Lusy Dian. 2016. *Inovasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Mengatasi Kekeringan (Studi tentang Program Pembangunan 1000 Embung Tahun 2013)*. Malang: Skripsi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang.
- Prawoto, N., & Selatan, J. L. (2009). Memahami Kemiskinan dan Mengatasi Penanggulangannya. *In Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* (Vol. 9, Issue 1).
- Reivich, K., & Shatte, A. (2002). *The Resilience Factor: 7 Keys To Finding Your Inner Strength And Overcome Life's Hurdles*. New York: Broadway Books
- Rumoharbo, Yulita Ika. 2016. *Inovasi Pemutakhiran Data Pemilih Melalui Keterlibatan Mahasiswa (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015)* Lampung: Skripsi Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung.
- Soetomo. (2010). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sururi, Ahmad. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. *Journal of Spirit Public*,

- Vol. 12, No. 2. Diunduh pada <https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/16236>. Diakses 12 Februari 2024
- Suwarno, Yogi. (2008). Inovasi di Sektor Publik. *Journal of STIA-LAN*. Diunduh pada https://www.researchgate.net/publication/328202667_INOVASI_DI_SEKTOR_PUBLIK. Diakses 12 Februari 2024
- Suryawati, C. (2005). *Memahami Kemiskinan secara Multidimensional*.
- Suharto, Edi (2020). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Theresia, A., Andini, K. S., Nugraha, P. G. P., & Mardikanto, T. (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Abdul Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Makassar 90111

Makassar, 1 April 2024

Nomor : 070/398/BPPD/IV/2024
Lampiran : -
Perihal : Pengambilan Data
Penelitian

Yth. Camat Se-Kota Makassar
(Daftar Terlampir)
Di -
Makassar

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Nomor 070.02/042/KEP/III/2024 Tentang Penetapan Tim Peneliti Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan ini menugaskan kepada :

1. Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si
2. Marta Suharsih, S.Sos., M.Si
3. Pratiwi Wulandari, S.Sos., M.Si

untuk melakukan pengumpulan data penelitian terkait dengan topik **"Penguatan Resiliensi Sosial Inovasi Lorong Wisata di Kota Makassar"**. Dimohon kepada Bapak/Ibu agar dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan terkait penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN

NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST., MAP.
NIP. 491304252005021001

Tembusan :

1. Bapak Walikota Makassar (Sebagai Laporan) di Makassar ;
2. Paringgal



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Makassar 90111

Makassar, 7 Agustus 2024

Nomor : 070/623/BPPD/VIII/2024
Lampiran : -
Perihal : **Pengambilan Data
Penelitian**

Yth. Lurah Parang Tambung
Kecamatan Tamalate Kota Makassar

Di -
Makassar

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Nomor 070.02/042/KEP/III/2024 Tentang Penetapan Tim Peneliti Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan ini menugaskan kepada :

1. Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si
2. Marta Suharsih, S.Sos., M.Si
3. Pratiwi Wulandari, S.Sos., M.Si

untuk melakukan pengumpulan data penelitian terkait dengan topik "**Penguatan Resiliensi Sosial Inovasi Lorong Wisata di Kota Makassar**". Dimohon kepada Bapak/Ibu agar dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan terkait penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN



NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST., M.AP.
NIP. 491304252005021001

Tembusan :

1. Bapak Wali Kota Makassar (Sebagai Laporan) di Makassar ;
2. Paringgal



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Makassar 90111

Makassar, 7 Agustus 2024

Nomor : 070/624/BPPD/VIII/2024
Lampiran : -
Perihal : Pengambilan Data
Penelitian

Yth. Lurah Kaluku Bodoa
Kecamatan Tallo Kota Makassar

Di -
Makassar

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Nomor 070.02/042/KEP/VIII/2024 Tentang Penetapan Tim Peneliti Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan ini menugaskan kepada :

1. Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si
2. Marta Suharsih, S.Sos., M.Si
3. Pratiwi Wulandari, S.Sos., M.Si

untuk melakukan pengumpulan data penelitian terkait dengan topik "Penguatan Resiliensi Sosial Inovasi Lorong Wisata di Kota Makassar". Dimohon kepada Bapak/Ibu agar dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan terkait penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN



IRMAN NISWAN MUNGKASA, ST., M.A.P.

NIP. 491304252005021001

Tembusan :

1. Bapak Wali Kota Makassar (Sebagai Laporan) di Makassar ;
2. Paringgal



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)**

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Makassar 90111

Makassar, 7 Agustus 2024

Nomor : 070/622/BPPD/VIII/2024
Lampiran : -
Perihal : Pengambilan Data
Penelitian

Yth. Lurah Bara - Baraya Selatan
Kecamatan Makassar Kota Makassar

Di -
Makassar

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Nomor 070.02/042/KEP/III/2024 Tentang Penetapan Tim Peneliti Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan ini menugaskan kepada :

1. Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si
2. Marta Suharsih, S.Sos., M.Si
3. Pratiwi Wulandari, S.Sos., M.Si

untuk melakukan pengumpulan data penelitian terkait dengan topik **"Penguatan Resiliensi Sosial Inovasi Lorong Wisata di Kota Makassar"**. Dimohon kepada Bapak/Ibu agar dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan terkait penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN



SIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST., M.AP.
NIP. 197304252005021001

Tembusan :

1. Bapak Wali Kota Makassar (Sebagai Laporan) di Makassar ;
2. Peringatan

DOKUMENTASI KELURAHAN PARANGTAMBUNG















DOKUMENTASI KELURAHAN KALUKU BODOA







DOKUMENTASI KELURAHAN BARA-BARAYA SELATAN











